



Penelitian ini mengangkat permasalahan mengapa pada masa pemerintahan Gandasubrata terjadi perkembangan yang paralel antara perekonomian dan kebudayaan dan apakah perkembangan ekonomi dan kebudayaan saling berkaitan satu sama lain. Tujuannya untuk menjelaskan terjadinya perkembangan ekonomi dan kebudayaan masyarakat Banyumas pada masa Bupati Gandasubrata, tahun 1913-1942, menguji apakah ada pertalian antara perkembangan ekonomi dan kebudayaan, dan memperkaya historiografi lokal terutama yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi dan kebudayaan. Menggunakan metode sejarah yaitu prosedur sistematis dalam merekonstruksi masa lampau melalui pengumpulan sumber tertulis berupa memoar dan arsip, serta wawancara dengan Keluarga Gandasubrata dan budayawan Banyumas. Hasilnya bupati berfungsi sebagai penguasa pribumi yang mempunyai martabat tinggi di lingkungan masyarakatnya. Bupati berperan sangat besar dalam mewujudkan stabilitas di wilayah kekuasaannya sekaligus menjadi media penghubung antara para pejabat kolonial dengan rakyat jelata di lingkungan kekuasaannya. Peranan bupati sebagai agen perubahan di wilayahnya sangat penting untuk menentukan pemekaran wilayah, perkembangan sosial ekonomi dan kebudayaan. Meskipun belum menjelaskan hubungan timbal balik, namun ada indikasi pengaruh ekonomi terhadap perkembangan kebudayaan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ISBN 978-979-8971-52-5



SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEBUDAYAAN DI BANYUMAS MASA GANDASUBRATA TAHUN 1913-1942



SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEBUDAYAAN DI BANYUMAS MASA GANDASUBRATA TAHUN 1913 - 1942



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yustina Hastrini Nurwanti
Darto Harnoko
Theresiana Ani Larasati

**SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI
DAN KEBUDAYAAN DI BANYUMAS
MASA GANDASUBRATA TAHUN 1913-1942**

Oleh:

Yustina Hastrini Nurwanti

Darto Harnoko

Theresiana Ani Larasati



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNB) YOGYAKARTA

Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942

© Penulis

oleh :

Yustina Hastrini Nurwanti

Darto Harnoko

Theresiana Ani Larasati

Disain Sampul : Tim Kreatif Kepel Press

Penata Teks : Tim Kreatif Kepel Press

Diterbitkan pertama kali oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)
Yogyakarta

Jl. Brigjend Katamso 139 Yogyakarta

Telp: (0274) 373241, 379308 Fax : (0274) 381355

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Yustina Hastrini, dkk

Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas

Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942

Yustina Hastrini, dkk

VIII + 116 hlm.; 16 cm x 23 cm

I. Judul

1. Penulis

ISBN : 978-979-8971-52-5

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

**SAMBUTAN KEPALA
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
YOGYAKARTA**

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas perkenan-Nya, buku ini telah selesai dicetak dengan baik. Tulisan dalam sebuah buku tentunya merupakan hasil proses panjang yang dilakukan oleh penulis (peneliti) sejak dari pemilihan gagasan, ide, buah pikiran, yang kemudian tertuang dalam penyusunan proposal, proses penelitian, penganalisaan data hingga penulisan laporan. Tentu banyak kendala, hambatan, dan tantangan yang harus dilalui oleh penulis guna mewujudkan sebuah tulisan menjadi buku yang baik dan menarik.

Buku yang berjudul **“Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942”** tulisan Yustina Hastrini Nurwanti, dkk merupakan tulisan tentang sejarah kolonialisme yang terjadi di Banyumas pada masa 1913-1950. Buku ini terutama menyoroti kondisi ekonomi dan kebudayaan yang terjadi di Banyumas ketika daerah ini dipimpin oleh Bupati Sudjiman Gandasubrata. Adanya proses perubahan yang terjadi di masa itu, tentu menimbulkan persoalan yang terjadi di masyarakat. Buku ini menjadi menarik untuk dibaca karena mengungkap berbagai persoalan kota yang timbul antara lain persoalan budaya, gaya hidup, transportasi maupun kehidupan warga secara sosial-ekonomi.

Oleh karena itu, kami sangat menyambut gembira atas terbitnya buku ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para peneliti dan semua pihak yang telah berusaha membantu, bekerja keras untuk

mewujudkan buku ini bisa dicetak dan disebarluaskan kepada instansi, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, peserta didik, hingga masyarakat secara luas.

Akhirnya, ‘tiada gading yang tak retak’, buku inipun tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, masukan, saran, tanggapan dan kritikan tentunya sangat kami harapkan guna peyempurnaan buku ini. Namun demikian harapan kami semoga buku ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Yogyakarta, Oktober 2015

Kepala,

Christriyati Ariani

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN KEPALA BPNB YOGYAKARTA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR FOTO	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Pikir	7
G. Ruang Lingkup	9
H. Metode	10
BAB II GAMBARAN UMUM BANYUMAS AWAL ABAD XX	13
A. Kondisi Geografis	13
B. Kondisi Lingkungan	17
C. Kondisi Penduduk	21
D. Sarana Pendidikan	25
E. Sarana Kesehatan	28
F. Sarana Peribadatan	30

BAB III	EKONOMI BANYUMAS MASA KOLONIAL	33
	A. Eksploitasi Ekonomi di Banyumas	33
	B. Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula	38
	C. Pengembangan Jaringan Transportasi	44
	D. Pelayanan Publik	49
	1. Hotel dan Gedung Pertunjukan	50
	2. Bank dan Pasar	51
	3. Pabrik	52
	E. Malaise di Banyumas	53
BAB IV	KEBUDAYAAN DI BANYUMAS MASA BUPATI GANDASUBRATA	59
	A. Pelapisan Sosial Masyarakat di Banyumas	64
	B. Arsitektur	68
	C. Kerajinan Batik	81
	D. Kesenian	90
	1. Calung dan Gamelan	90
	2. Wayang Kulit Gagrag Banyumasan	92
	3. Lengger	95
BAB V	PENUTUP	105
	A. Kesimpulan	105
	B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
DAFTAR INFORMAN	116

DAFTAR FOTO

Foto 1.	“ <i>Sociteit Slamet</i> ” sekarang Gedung RRI Purwokerto	65
Foto 2.	Para Pemuda Sedang Bermain Bilyard	66
Foto 3.	Foto Atas: Jalan Yang Membelah Alun-Alun. Foto Bawah: Jalan Yang Membelah Alun-Alun Sampai Pintu Masuk Rumah Bupati Banyumas.	69
Foto 5.	Kantor Listrik Purwokerto	70
Foto 6.	Gedung Algemene Volks Bank (AVB) Sekarang Museum BRI	70
Foto 7.	MULO Purwokerto (Sekarang SMAN II Purwokerto)	71
Foto 8.	Kios Balai Pustaka	71
Foto 9.	Suasana Jalan dan Pertokoan di Sekitar Pasar Wage	72
Foto10.	Bupati Mancanegara di Pendapa Si Panji Banyumas bersama Istri, Residen, dan Para Dokter Setelah Menghadiri Peresmian RS Joelliana tahun 1925	74
Foto 11.	Bupati Banyumas KPAA Gandasoebrata beserta Istri dan Staf di Pendapa Banyumas	74
Foto 12.	Mobil Bupati Dalam Rangka Peresmian Pendapa Si Panji di Purwokerto	76
Foto 13.	Ibu Sudjiman Mertadiredja Gandasubrata Beserta Istri Staf Kabupaten di Pendapa Si Panji Purwokerto tahun 1937	77
Foto 14.	<i>Dalem Pangeranan</i> Masih Terawat Hingga Saat Ini	78
Foto 15.	Koleksi Pot Antik Dari Masa Bupati Pangeran Aria Gandasubrata	79
Foto 16.	Bagian Depan dan Tengah <i>Dalem Pangeranan</i>	80
Foto 17.	Keluarga Pejabat Pabrik Gula Kalibagor Memakai Batik	85

Foto 18. Motif Parang	87
Foto 19. Motif Parang Gandasubrata	87
Foto 20. Motif Ayam Puger	88
Foto 21. Motif Kekayon	88
Foto 22. Motif Sido Luhung	89
Foto 23. Motif Lumbon	89
Foto 24. Pertunjukan Calung	91
Foto 25. Koleksi Gamelan Milik Keluarga Bupati Gandasubrata	91
Foto 26. Tarian Jawa Dalam Peresmian Pendapa Si Panji Tahun 1937 ..	92
Foto 27. Ronggeng atau Tarian Wanita Menurut Raffles	97
Foto 28. Penari Ronggeng Dengan Iringan gamelan Tahun 1870-1900	102
Foto 29. Penari Ronggeng	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyumas merupakan kabupaten yang secara administratif termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas kaya akan objek wisata sejarah, budaya, dan alam. Baturaden menjadi objek wisata alam yang terkenal. Objek wisata sejarah di Banyumas bisa dilihat dari bangunan peninggalan sejarah sebagai kawasan kota lama. Wilayah Banyumas dahulu merupakan daerah *mancanegara kilen* dari Kerajaan Mataram, Kartasura hingga Kasunanan Surakarta.

Memasuki abad ke-19 kehidupan masyarakat di daerah Banyumas masih bersifat tradisional. Ditinjau dari segi sosial-ekonomi, keadaan desa-desa juga masih merupakan pedesaan agraris yang dihuni oleh masyarakat petani yang menganut sistem ekonomi tertutup (Koentjaraningrat, 1984:210). Sampai pada saat itu, secara politis wilayah Banyumas masih berkedudukan sebagai daerah *mancanegara kilen* Kasunanan Surakarta (Pigeaud, 1962:29-34).

Dalam kondisi demikian, Banyumas juga masih dipandang penting ditinjau segi ekonomi bagi pemerintah pusat kerajaan. Daerah ini dikenal sangat subur sehingga memiliki arti yang penting sebagai basis ekonomi bagi pemerintah kerajaan. Pertimbangan pokok itulah yang mendorong pemerintah Kasunanan Surakarta tetap mengharapkan kesetiaan daerah *mancanegara kilen*. Letak daerah ini jauh dari pusat kerajaan, maka salah satu upaya untuk mengingatnya adalah dengan mempertahankan ikatan feodal (Legg, 1963:10).

Konsekuensi dari ikatan feodal itu, bupati Banyumas mempunyai kewajiban untuk menghadap raja di kraton sambil mempersembahkan upeti yang berupa sejumlah hasil bumi yang telah ditetapkan. Kegiatan menghadap raja dilakukan secara periodik setiap tahun bertepatan dengan upacara perayaan *grebeg*. Kelalaian terhadap kewajiban berakibat buruk bagi kedudukan dan jabatan bupati. Kelalaian kewajiban dianggap mengingkari kesetiaan terhadap raja (Mitsuo Nakamura, 1983:30).

Bupati sebagai penguasa lokal juga harus menjaga hubungan yang harmonis dengan rakyatnya agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Upaya ditempuh ditempuh dengan cara membangun legitimasi kekuasaan (Soemarsaid, 1985:19). Dengan jalan itulah para bupati di Banyumas dapat membina kesetiaan rakyat di wilayah kekuasaannya secara terus-menerus.

Pada tanggal 22 Juni 1830, daerah Banyumas dilepas dari Kasunanan Surakarta dan secara resmi di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Pihak kolonial untuk dapat menguasai Banyumas harus membayar uang reparasi kepada Kasunanan Surakarta sebesar f 90.000 (Kartodirdjo, 1986:146). Sejak saat itu Banyumas dieksploitasi secara politik dan ekonomi oleh pihak kolonial. Dengan demikian tahun 1830 dipandang sebagai awal era baru dalam kehidupan politik, ekonomi dan budaya di Banyumas. Pandangan itu beralasan mengingat pada saat itu Pemerintah Kolonial Belanda mulai melaksanakan eksploitasi ekonomi dan penetrasi kekuasaan yang luas. Sistem tanam paksa mulai dilaksanakan seperti pembukaan beberapa jenis perkebunan yang secara langsung dikontrol oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan penanaman wajib itu, diutamakan jenis tanaman yang dapat menghasilkan barang-barang komoditi ekspor bagi pasaran Eropa. Agar dapat memperoleh keuntungan maksimal, usaha itu dilakukan secara besar-besaran dengan menggunakan tanah pertanian dan tenaga penduduk (Furnivall, 1944:144).

Pembukaan perkebunan itu dipandang berpengaruh luas terhadap perubahan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini berarti semakin giat aktivitas pihak kolonial untuk memperluas ekonomi perkebunan, maka semakin besar pula ekonomi di dalam masyarakat

pedesaan. Peningkatan aktivitas itu tampak lebih jelas lagi setelah sistem pengelolaan perkebunan ditangani oleh pihak swasta akhir abad ke-19. Suatu gejala menarik yang perlu dikaji lebih jauh adalah berlangsungnya perubahan yang disebabkan oleh sistem penggunaan tanah dalam bentuk kontrak untuk keperluan perkebunan, pergeseran buruh paksa menjadi buruh upahan dan diberlakukannya mata uang sebagai alat tukar yang beredar di kalangan penduduk pedesaan (Bremen, 1984:120).

Dengan demikian maka perubahan sistem sewa tanah perekrutan buruh bebas dan penggunaan uang sebagai alat tukar dipandang sebagai penyebab utama perubahan ekonomi di pedesaan. Perubahan sistem sewa tanah dan dipraktikkannya sistem buruh bebas itu secara berangsur-angsur membawa perubahan yang berupa pergeseran ikatan adat menjadi ikatan kontrak, sedangkan penggunaan uang sebagai alat tukar secara luas di pedesaan dapat merubah sistem ekonomi tertutup menjadi sistem pertukaran bebas (Kartodirdjo, 1986:68). Oleh sebab itu, kebijakan perkebunan yang dipraktikkan oleh pemerintah kolonial di Jawa telah membawa dampak lebih jauh yang berupa berlangsungnya proses desintegrasi struktur sosial dalam masyarakat pedesaan (Furnivall, 1944:80).

Berbagai jenis perkebunan juga berkembang di Banyumas sejak sistem tanam paksa dilaksanakan. Jenis perkebunan itu di antaranya adalah kopi, indigo, tebu, teh, kayumanis, kapas, lada, dan tembakau. Dari beberapa jenis perkebunan yang dilaksanakan di daerah Banyumas, yang dipandang paling besar membawa dampak ekonomi bagi masyarakat pedesaan adalah perkebunan tebu.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada sejarah perkembangan ekonomi dan kebudayaan di Banyumas. Proses perubahan dalam masyarakat mendorong terjadinya berbagai persoalan baru. Hal ini merupakan konsekuensi dari suatu perubahan ekonomi yang sedang berlangsung, bahkan mendorong munculnya kebebasan individu yang semakin meluas di dalam masyarakat terutama gerakan budaya, baik berupa perkembangan arsitektur maupun kesenian di wilayah Banyumas.

B. Permasalahan

Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini mengenai bagaimana sejarah perkembangan ekonomi dan kebudayaan masa kolonial di Banyumas. Adapun kajiannya meliputi:

1. Mengapa pada masa pemerintahan Gandasubrata terjadi perkembangan yang paralel antara perekonomian dan kebudayaan?
2. Apakah perkembangan ekonomi dan kebudayaan saling berkaitan satu sama lain ?

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan terjadinya perkembangan ekonomi dan kebudayaan masyarakat Banyumas pada masa Bupati Gandasubrata, tahun 1913-1942.
2. Menguji apakah ada pertalian antara perkembangan ekonomi dan kebudayaan.
3. Memperkaya historiografi lokal terutama yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi dan kebudayaan.

D. Manfaat

1. Sebagai pijakan awal penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara perkembangan ekonomi dan kebudayaan di Banyumas.
2. Memberikan bacaan kepada masyarakat Banyumas tentang sejarah dan kebudayaan Banyumas sehingga akan menumbuhkan kecintaan terhadapnya.
3. Mendorong lahirnya kebijakan pemerintah daerah yang mengedepankan revitalisasi benda cagar budaya dan kota lama Banyumas.

E. Tinjauan Pustaka

Sudah banyak kajian tentang Banyumas dalam perspektif sejarah maupun budaya. Tulisan tentang Banyumas, di antaranya karya dari Budiono Herusatoto (2008) yang berjudul *Banyumas: Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*. Buku ini menyoroti dua hal yaitu tentang perjuangan elit Banyumas dalam sejarah tanah Jawa dan potret orang Banyumas dari bahasa, watak, seni budayanya. Buku ini memberi gambaran dan data yang berguna untuk mendukung tulisan.

Sugeng Priyadi (2002) menulis buku yang berjudul *Banyumas Antara Jawa & Sunda*. Buku ini menjelaskan tentang masyarakat Banyumas berada pada dua kutub kebudayaan yang disebabkan letaknya berada di perbatasan antara kebudayaan Jawa dan Sunda. Masyarakat Banyumas mengenal tradisi naskah. Tulisan ini bisa membantu penulis untuk merunut sejarah Banyumas tanpa melupakan kritik sumber.

Hasil penelitian Sugeng Priyadi (2007) tentang berbagai naskah sejarah lokal Banyumas dengan judul *Sejarah Intelektual Banyumas*. Buku ini berbicara tentang sejarah pemikiran yang memfokuskan pada pemikiran masa lampau. Buku ini menginventarisasi naskah sejarah banyumas yang berisi berbagai dokumen historiografi tradisional, memuat gambaran ekspresi kesejarahan masa lampau yang mendokumentasikan mengenai kebudayaan Banyumas.

Sunaryadi (2000) menyoroti satu seni pertunjukan di Banyumas dengan judul tulisannya *Lengger: Tradisi & Transformasi*. *Lengger* menjadi ciri khas masyarakat Banyumas. Tulisan difokuskan pada keberadaan *lengger* di daerah Banyumas rentang waktu sesudah tahun 1918. Mulai tahun ini penari *lengger* tidak lagi ditarikan oleh seorang pria tetapi telah berubah menjadi *ronggeng* atau *lengger* yang dimainkan perempuan.

Simbol, Makna, dan Nilai Filosofis Batik Banyumasan, tulisan Christriyati Ariani (2013) menyoroti tentang motif dan makna filosofi batik Banyumasan. Di dalamnya dibahas tentang sejarah keberadaan batik Banyumasan dan adanya batik motif baru ciptaan Bupati

Gandasubrata. Tulisan ini bisa menjadi data tertulis tentang batik Banyumasan.

Kenang-Kenangan 1933-1950, merupakan tulisan SM. Gandasubrata tentang kejadian yang penting dan kemajuan rakyat Banyumas masa kepemimpinannya. Tulisan ini merupakan penggalan-penggalan kejadian yang ada di Banyumas masa tahun tersebut. Tulisan ini merupakan data primer yang akan membantu peneliti.

Sebuah Pendopo di Lembah Serayu: Kisah Keluarga Bupati Banyumas Jaka Kahiman Hingga Gandasubrata tulisan Ratmini Soedjatmoko (2011). Tulisan ini merupakan curahan pengalaman hidup bersama antara cucu dengan eyangnya. Pengalaman Ratmini ketika hidup bersama dengan Gandasubrata. Tulisan ini bisa membantu peneliti untuk menggambarkan sedikit tentang kehidupan priyayi masa itu.

Gaya Hidup Bupati Pasisiran Pada Akhir Abad 19 Sampai Permulaan Abad 20, tesis Soekesi Soemoatmodjo (1985) menjelaskan bahwa gaya hidup bupati pasisiran menunjukkan adanya perubahan akibat masuknya nilai-nilai baru yang datang dari dunia Barat. Sikap bupati pasisiran terhadap pengaruh Barat yang masuk ke dalam masyarakat bersifat adaptif inovatif. Hal ini dapat dilihat dari cara berpakaian, bentuk rumah tempat tinggal, berpakaian, etiket, dan pendidikan. Banyumas sebagai daerah pedalaman apakah juga mengalami hal yang sama dengan pasisiran. Bupati Banyumas apakah juga bersikap adaptif inovatif dengan nilai baru yang datang dari dunia Barat.

Untuk memperkuat penelitian ini maka sumber-sumber yang berkaitan dengan kolonialisme, perkembangan perekonomian di wilayah Banyumas sekitar abad ke-19 sampai awal abad ke-20 antara lain buku tulisan Robert van Niel yang berjudul *Java Under The Cultivation System* terbitan tahun 1992. Buku ini menjelaskan tentang eksploitasi ekonomi di wilayah Banyumas yang berkaitan dengan ekspor gula cukup besar. Selain itu juga menjelaskan pelaksanaan kerja wajib penanaman tebu, sistem pajak tanah dan kebijakan perburuhan. Peran dan potensi golongan petani banyak ambil bagian dalam sektor industri gula akan tetapi tentang kehidupan kultural tidak nampak

disoroti, terutama yang berkaitan dengan perkembangan kesenian, bahkan hanya disinggung sedikit tentang perkembangan arsitektur tradisional di wilayah Banyumas.

Tesis Purnawan Basundoro (1999) berjudul *Transportasi dan Eksploitasi Ekonomi di Karesidenan Banyumas Tahun 1830-1940*. Menurutnya, kota-kota di Karesidenan Banyumas tumbuh dan berkembang karena adanya pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut. Hal ini bisa menjadi gambaran tentang pembangunan sarana dan prasarana yang nantinya bisa mendukung paparan tentang arsitektur terkait dengan tahun pembangunan.

Selanjutnya buku tulisan RE. Elson yang berjudul *Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry* terbitan tahun 1984 menjelaskan bahwa perkebunan tebu di wilayah Banyumas merupakan primadona dalam sektor industri. Jumlah penduduk pada masa itu dimungkinkan dapat memenuhi tenaga kerja untuk industri gula. Dalam buku ini dijelaskan munculnya *Volkscreditwezen* atau Bank Perkreditan Rakyat. Bank tersebut pada waktu itu sangat membantu kehidupan pribumi untuk mengembangkan usaha-usaha kecil lainnya. Terutama untuk mengembangkan usaha-usaha kecil lainnya. Terutama untuk mengembangkan kerajinan-kerajinan antara lain batik, perak, bambu, dan kerajinan membuat topi. Kehidupan budaya hanya menyinggung tentang kesenian *lengger*.

Dengan demikian penelitian dan kajian yang telah dilakukan tentang Banyumas belum merambah ke penelitian yang mengungkap budaya terkait dengan perkembangan ekonomi periode 1913-1950. Kondisi budaya yang ada dalam rentang waktu tersebut belum pernah diungkap sehingga akan menarik untuk dituliskan.

F. Kerangka Pikir

Perkembangan seni pertunjukan di dunia banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor non seni, dan yang paling kuat adalah faktor politik, perubahan sosial, dan ekonomi (Soedarsono, 2003:12). Perkembangan ekonomi sangat menentukan perkembangan seni pertunjukan di jagat ini. Contohnya perkembangan ekonomi di Amerika Serikat setelah

menang dalam Perang Dunia II tahun 1945. Tahun demi tahun negara tersebut mengalami perkembangan ekonomi, sains, dan teknologi yang luar biasa cepatnya. Dengan melimpahnya penghasilan serta tersedianya waktu luang yang cukup, mengakibatkan terjadinya ledakan budaya (Soedarsono, 2003: 8).

Ketika negara-negara maju dengan teknologi tinggi dan kekuatan ekonomi kapitalisnya menjajah negara-negara dengan identitas etnis, maka yang terjadi adalah hegemoni tafsir kebenaran dengan kuasa absolute. Apalagi ketika material ekonomi yang ditentukan oleh hubungan produksi dan kepemilikan kapital menentukan secara langsung apa yang disebut ideologi, agama, seni dan kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan hanyalah cermin atas ketimpangan hubungan kelas yang tertindas secara ekonomi dan penindasnya, yang terungkap dalam relasi penjajahan kultural mulai dari kolonialisme pikiran, simbolik, dan seni (Sutrisno, 2005: 318-319).

Selain itu Sartono Kartodirdjo (1993:11-13) menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi di wilayah Jawa sejak kolonialisme bercokol ternyata membawa perubahan yang cukup kompleks, terutama yang menyangkut tentang figur sebagai pelaku perubahan maupun faktor-faktor material dan imaterial/intangible. Proses berlangsungnya perubahan yang terjadi di masyarakat menyangkut dua hal yang saling berkaitan, pertama yaitu kelompok sosial tertentu sebagai pelopor perubahan dan kedua faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat itu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bupati mancanegara merupakan elit sosial yang menjadi pengemban kebudayaan istana di daerah kekuasaannya masing-masing.

Kondisi ekonomis dan teknologis itu berpengaruh besar terhadap terciptanya nilai-nilai masyarakat terutama mendorong perubahan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena sistem ekonomi kolonial posisinya lebih kuat sehingga kehidupan yang berkembang di masyarakat juga mengalami perubahan, baik itu yang berkaitan dengan gaya hidup maupun kehidupan budayanya.

Penjelasan tersebut di atas diperkuat oleh W.F.Ogburn yang berjudul *Social Change* terbitan 1950 yang menjelaskan bahwa perubahan sosial sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian di wilayah

Jawa terutama pada masa kolonial. Proses perubahan itu dapat diamati dari pergeseran bentuk penggunaan lahan perkebunan, produksi dan perekrutan tenaga kerja. Hal ini terlihat di wilayah Banyumas pada masa kolonial bahwa perkebunan tebu cukup menonjol yang kemudian diikuti peningkatan bidang perekonomian dengan berkembangnya industri gula.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, untuk mencari hubungan di antara unsur-unsur yang ada dalam pelaksanaan perkebunan tebu dengan terjadinya perubahan ekonomi di Banyumas, harus dipahami terlebih dahulu kondisi masyarakat tradisional. Oleh karena itu, perlu dilihat kondisi geografis, ekologis, kepadatan penduduk. Selanjutnya, perlu dikemukakan juga eksploitasi kolonial yang berkaitan dengan pelaksanaan perkebunan tebu. Hal ini menyangkut berbagai persoalan seperti pengerahan tenaga kerja, perluasan jaringan transportasi dan perkembangan produksi gula. Kesemuanya itu dalam perkembangannya akan mempengaruhi gaya hidup maupun kehidupan kebudayaan Banyumas terutama pada masa kolonial.

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup materi, waktu, dan wilayah. Banyumas jika dilihat dari sejarah dan budaya cakupannya sangat luas sehingga diperlukan pembatasan materi agar lebih fokus. Lingkup materi yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan Banyumas periode 1913-1942. Periode tersebut merupakan masa pemerintahan Bupati Gandasubrata. Masa pemerintahan Bupati Gandasubrata terjadi *malaise*, rakyat menyebutnya dengan *mlesed*. Namun, Gandasubrata berhasil mengatasi *malaise* dan meningkatkan perekonomian di Banyumas. Bagaimana kondisi kebudayaan di Banyumas, masa Bupati Gandasubrata.

Lingkup waktu sejak tahun 1913 sampai tahun 1942. Tahun 1913 dipakai sebagai batas awal penelitian karena menjadi awal berkuasanya Bupati Gandasubrata. Tahun 1942 merupakan akhir kekuasaan kolonial di Banyumas. Lingkup spasial meliputi Kabupaten Banyumas.

H. Metode

Tulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yakni berusaha mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain maupun hubungan sebab akibat dari keadaan yang diamati. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah dibangun dari dua kata, yaitu metode dan sejarah. Kata metode memiliki arti cara atau prosedur yang sifatnya sistematis. Sedangkan sejarah memiliki arti rekonstruksi masa lampau. Jadi, metode sejarah dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang sistematis dalam merekonstruksi masa lampau. Terdapat empat langkah metode sejarah yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh sejarawan dalam menulis karya sejarah. Empat langkah tersebut ialah: *heuristik* (pengumpulan sumber), kritik atau verifikasi, interpretasi (penafsiran), dan penulisan atau historiografi (Kuntowijoyo, 1995:89-105).

Pengumpulan sumber dilakukan dengan melacak sumber tertulis atau studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan penelusuran sumber primer dan sekunder untuk menggali informasi terkait ekonomi dan budaya Banyumas masa kolonial. Sumber pustaka didapat dari perpustakaan di Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, Kantor Dinas Kebudayaan Banyumas, dan koleksi kerabat Bupati Banyumas. Sumber arsip masa kolonial dirunut melalui Kantor Arsip Daerah Banyumas. Pelacakan sumber dokumenter berupa catatan harian dan foto lama dilakukan dengan mendatangi *Dalem Pangeranan*, bekas tempat tinggal Bupati Banyumas. Foto lama juga didapat melalui seorang kolektor yang tertarik dengan masalah budaya.

Penelitian ini selain studi pustaka juga menggunakan sumber lisan. Sumber lisan dengan melakukan wawancara pada keturunan Bupati Gendasubrata, sejarawan, dan budayawan di Banyumas. Adapun teknik pemilihan informan didasarkan pada kondisi yang terjadi dan dilakukan secara *snowballing method* sampai dipandang jenuh. Pemilihan informan yang diwawancarai didasarkan pada data dan informasi yang berkembang dari informan. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang diterima lebih komprehensif dan saling berkaitan. Digunakan metode *in depth interview* untuk menggali sedalam

mungkin informasi yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu dilakukan juga observasi atau pengamatan pada benda peninggalan sejarah yang ada di Banyumas, berupa bangunan, benda ataupun barang yang terdapat di dalamnya, serta foto-foto lama yang sejaman. Setelah data terkumpul kemudian diinterpretasikan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang didasarkan pada hubungan sebab-akibat suatu fenomena historis pada cakupan atau rentang waktu dan tempat tertentu.

BAB II

GAMBARAN UMUM BANYUMAS AWAL ABAD XX

A. Kondisi Geografis

Banyumas ditinjau dari sudut geografis lebih menunjukkan sebagai wilayah pedalaman yang terisolasi oleh pegunungan yang membentang, baik di sepanjang bagian utara maupun selatan. Daerah yang terletak di Jawa Tengah bagian barat ini, diapit oleh dua jalur pegunungan, yaitu Pegunungan Serayu selatan di sebelah selatan dan Pegunungan Serayu utara di bagian utara. Pegunungan Serayu utara merupakan sambungan dari Pegunungan Dieng di sebelah timur laut yang membujur ke arah barat. Gunung Slamet merupakan puncaknya, dengan ketinggian mencapai 3428 meter. Masih terdapat pula Gunung Pojok Telu dan Gunung Perahu, dengan memiliki ketinggian tidak kurang dari 2565 meter (Romein, 1985: 45).

Walaupun tanah di kawasan Pegunungan Serayu utara sangat subur, namun daerah yang terletak di bagian utara Banyumas itu, banyak terdapat lembah yang curam. Termasuk sungai-sungainya juga merupakan lembah yang dalam pula. Lembah-lembah itu berkelok-kelok dengan celah-celah yang sempit dan di situlah sungai-sungai induk membelahnya (Panekoek, 1952: 19).

Di sebelah selatan daerah Banyumas, membujur dari arah timur ke barat Pegunungan Serayu selatan yang merupakan perpanjangan dari Pegunungan Sumbing. Perbatasan antara Pegunungan Sumbing dengan Pegunungan Serayu selatan merupakan bukit-bukit terjal yang terletak di bagian timur Banyumas. Kemudian mengenai jalur Pegunungan

Serayu selatan ini, semakin ke barat justru semakin rendah, sehingga dataran rendah yang berada di daerah Banyumas bagian barat itu menjadi sangat luas.

Daerah itu membentang sampai ke Lembah Citanduy yang berbatasan dengan daerah Jawa Barat. Dataran di Banyumas bagian barat itu begitu rendahnya, sehingga sebagian besar tanahnya merupakan rawa-rawa yang cukup luas. Bahkan, sebagian wilayah yang berada di pantai selatan menjadi laut tertutup, yang dikenal dengan nama *Segara Anakan*. Para ahli memperkirakan, bahwa *Segara Anakan* itu merupakan lembah sungai di jalur selatan yang tenggelam di bawah permukaan laut, karena penurunan tanah yang terjadi di kawasan itu (Panekoek, 1952: 20-25).

Di antara dua pegunungan itu, terletak daerah inti Banyumas yang di tengah-tengahnya mengalir Sungai Serayu. Oleh sebab itu, wilayah Banyumas juga dikenal dengan sebutan Lembah Serayu. Kondisi tanah terdiri dari lapisan vulkanis muda yang subur dan sebagian besar wilayahnya berupa persawahan yang sangat cocok untuk budidaya padi. Sungai Serayu dengan anak-anak sungainya mampu mengairi lahan pertanian sesuai dengan kebutuhan, sehingga memungkinkan penanaman padi dilakukan sepanjang musim. Dengan demikian, pada jaman pra kolonial Banyumas telah dipandang penting dari segi ekonomi bagi pemerintah pusat kerajaan. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, ketika kolonial Belanda berkuasa di Banyumas, lahan pertanian semacam itu dipandang sangat sesuai untuk penyelenggaraan perkebunan tebu (Gilderer, 1974: 75).

Sebelum berada di bawah kekuasaan Belanda, Karesidenan Banyumas menjadi wilayah Kerajaan Mataram yang termasuk dalam teritorial *Mancanegara Kulon* (FA. Sutjipto, 1978:1-4). Wilayah *Mancanegara Kulon* meliputi: Purwokerto, Karang Anyar, Karang Bolong, Daya Luhur dan sekitarnya. Penentuan wilayah ke dalam salah satu dari ketiga golongan itu berdasar besarnya pengaruh pusat yaitu pengaruh raja yang dijalankan di daerah itu. Dengan demikian, hak hukum yang berlaku menjadi tidak stabil dan batas-batas kerajaannya mudah berubah, tergantung turun naiknya kekuasaan pusat (Soemarsaid, 1985: 131).

Hari jadi Karesidenan Banyumas tanggal 6 April 1582 yaitu pada masa Kasultanan Pajang menunjukkan kapan Banyumas berdiri (Sukarto K. Atmadja, 1989:2). Penetapan itu berdasar pada pengangkatan bupati pertama yaitu Adipati Wargantama II atau Adipati Mrapat pada tanggal 12 Maulud atau 6 April 1582. Dengan ditunjuknya Hallewijn pada tanggal 22 Juni 1830 untuk memimpin Banyumas, maka dimulailah Pemerintahan Belanda di Banyumas (Arsip Banjoemas No. 10.4).

Sebelum di bawah kekuasaan Belanda, wilayah Banyumas dibagi dalam Banyumas Kasepuhan dan Banyumas Kanoman. Banyumas Kasepuhan meliputi: Banyumas, Banjarnegara, Adirejo, Purwokerto, Ayah, Jeruk Legi, Daya Luhur; sedangkan Banyumas Kanoman meliputi: Banjar, Purbalingga, Sukaraja, Panjer (Sukarto K. Atmaja, 1989: 2-10).

Dengan dimulainya Pemerintahan Belanda di Banyumas, maka pembagian Kasepuhan dan Kanoman hilang dan selanjutnya hanya terdapat seorang Bupati di Banyumas. Berdasar keputusan Gubernur Generaal J.G. van den Bosch No. 1 tanggal 18 Desember 1830, Banyumas terdiri empat *Regentschap*, yaitu: Banyumas, Ajibarang, Dayaluhur dan Purbalingga (Arsip Banyumas 10.4).

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Desentralisasi 1903, maka kesatuan kenegaraan di Hindia Belanda dibagi dalam wilayah (*Gewest*) yang hanya merupakan daerah administratif dalam suatu pemerintah yang terpusat. Terbesar adalah *Gewest* (Karesidenan), di bawahnya *Afdeling* dan *Onderafdeling*. Untuk Jawa dan Madura, *Afdeling* bersamaan dengan lingkungan wilayah suatu *Regenschap* yang terbagi dalam distrik (kawedanan) dan *onderdistrik* (kecamatan). Berdasar pembagian wilayah tersebut maka *Gewest* Banyumas meliputi: Banyumas, Cilacap, Purwokerto, Banjarnegara dan Purbalingga (Staatsblad, 1934).

Pemerintah kolonial menggabungkan beberapa wilayah di Banyumas atau menghapuskannya untuk menjadi satu daerah, sehingga pada Januari tahun 1936 Kabupaten Purwokerto, Karanganyar dan Kutoarjo dihapuskan dan wilayah Purwokerto seluruhnya dimasukkan Kabupaten Banyumas. Distrik Purworejo Banyumas masuk Kabupaten Banjarnegara. Oleh karena itu, sejak 1 Januari 1936 Karesidenan

Banyumas terdiri dari 4 Kabupaten yaitu: Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara (SM. Gandasubrata, 1952: 17-18).

Karesidenan Banyumas merupakan daerah yang tanahnya terbentuk oval dan membentang dari timur ke barat. Lingkungannya tidak ramai karena tidak dilalui jalan kereta api, angkutan yang ada meliputi dokar, gerobak, dan mobil. Wilayah Banyumas merupakan salah satu yang terbesar dari empat wilayah di Jawa sesudah Kediri dan luasnya mencakup kesepuluh terbesar dari seluruh Karesidenan di Jawa.

Bagian utara dan timur laut karesidenan sebagian besar merupakan perbukitan. Garis batas utara melalui puncak Gunung Prabu dan Gunung Slamet yang terbelah oleh aliran sungai yang bermuara di Laut Jawa dan Samudra Hindia. Dengan pegunungan sebagai pemisahannya maka lereng selatan merupakan bagian terbesar dari wilayah Karesidenan Banyumas. Daerah sebelah timur menuju ke sungai Serayu terus ke pegunungan Daya Luhur dan dipisahkan oleh rawa-rawa luas dan jalan ke Nusakambangan. Dengan demikian, bagian terbesar Karesidenan Banyumas bagian timur hampir seluruhnya merupakan perairan Serayu yang bercabang-cabang ke sumbernya di gunung-gunung tersebut, dan di situlah sebagian besar penduduk bertempat tinggal.

Keadaan distrik di Karesidenan Banyumas terletak di tepi sebelah kanan sungai Serayu dan timur lautnya berbatasan dengan Banjarnegara. Batas alam Banyumas dari muara sungai Serayu ke arah mudik sampai Blimbing. Sungai ini menuju arah mudik sampai desa Binarong, ke arah barat daya sampai Gunung Semapur. Batas Karesidenan ini ke arah barat sampai di muara Sungai Serayu. Banyumas terdiri dari 4 distrik Banyumas, Kalirejo (Adireja), Sukaraja dan Purworejo (Resolusi, 22 Agustus 1931, No.1).

Distrik Banjarnegara, bagian sebelah baratnya berbatasan dengan Banyumas dan Purbalingga, sebelah utara dengan Pekalongan, bagian selatan dan timur berbatasan dengan Begelen. Bagian sebelah timur Banjarnegara terletak di sebelah utara sungai, ujung barat laut terletak di puncak Gunung Peringgen dan utara Gunung Selapan yang bersumber di Gunung Bener. Wilayah Banjarnegara meliputi empat daerah : Banjar, Singomerto, Karang-Koler, dan Batur.

Distrik Purbalingga berbatasan dengan Sungai Serayu, bagian selatan dan timur dengan Banjarnegara, utara dengan Kabupaten Pemalang dan barat dengan Purwokerto. Wilayahnya meliputi 3 daerah: Purbalingga, Kertanegara dan Cahyana.

Distrik Purwokerto menempati lereng sebelah selatan dari batas pegunungan sebelah utara karesidenan dan lembah Serayu. Sebelah timur berbatasan dengan Purbalingga, utara dengan Brebes dan barat daya dengan Cilacap. Wilayahnya meliputi 3 daerah: Purwokerto, Ajibarang, Jambu.

Distrik Cilacap membentang antara Serayu dan Kabupaten Priangan dan sebelah utaranya mencapai Cirebon dan Tegal. Wilayahnya mempunyai pantai yang datar dan rendah, dengan curah hujan mencapai 200 mm pada bulan Agustus yang dampaknya terasa sampai Banyumas. Wilayah Cilacap meliputi 6 daerah: Cilacap, Adireja, Pegadingan, Majenang, Daya Luhur dan Nusa Kambangan (Denys Lombard, 1996: 20-21).

Pemerintah Belanda berkepentingan dengan daerah sebelah selatan Banyumas sebagai pelabuhan dan tempat mengumpulkan barang-barang hasil setempat dan barang-barang yang baru datang. Berdasar Besluit No. 1 tanggal 17 Juli 1839, maka Cilacap, Pulau Nusa Kambangan, Adirejo dan Dayaluhur menjadi satu wilayah. Dipimpin oleh seorang Asisten Residen yang dibantu seorang *Ronggo* atau Bupati. Pelabuhan Cilacap menjadi wilayah yang penting untuk perdagangan dan perkembangan pertanian maupun perdagangan kecil setelah keluar Besluit No. 1 tanggal 29 November 1847 (Ikhtisar Politik Hindia Belanda, 1973: 39-40).

B. Kondisi Lingkungan

Pada awal abad 20, lingkungan Banyumas mulai berubah setelah terjadi eksploitasi wilayah oleh Belanda, terutama pembukaan lahan untuk areal perkebunan, pemukiman dan kegiatan industri. Selain itu, kondisi lingkungan Banyumas sangat relevan sebagai tempat berkembangnya nyamuk *anopheles ludlowi*, yaitu di daerah sungai yang kering pada musim kemarau maupun daerah pantai, juga daerah

rawa-rawa. Secara umum lingkungan Banyumas tidak menguntungkan terutama jika musim kemarau panjang. Sebaliknya, musim hujan terus menerus seperti yang terjadi pada tahun 1908 selama 187 hari; dilaporkan telah menyebabkan penyakit demam. Kondisi semakin buruk jika banyak angin dan udara yang lembab. Perubahan lingkungan membantu penyebaran penyakit semakin cepat terutama di bidang transportasi dan perluasan tanah pertanian (Memori Serah Jabatan Jawa Tengah, 1977: CIX).

Daerah Banyumas membentang dari utara ke selatan yang terisolir pegunungan Serayu utara dan selatan. Pegunungan Serayu utara merupakan sambungan pegunungan Dieng, sehingga wilayah ini termasuk subur. Secara umum wilayah Banyumas dibedakan antara daerah pantai dan pedalaman. Daerah pedalaman yang subur terletak di sekitar lembah Serayu adalah tanah pertanian dan perkebunan. Pelabuhan Cilacap merupakan wilayah perdagangan dan transportasi penting di daerah selatan wilayah Banyumas. Di daerah ini berkembang pusat kegiatan kecil yang sibuk seperti di Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, dan kota Banyumas. Di samping daerah yang subur, di sebelah timur muara Sungai Serayu terdapat bukit pasir yang terpotong oleh banyak sungai yang mengalir dari utara ke selatan. Hal tersebut menyebabkan pengendapan lumpur di muara sungai. Pada waktu air pasang terbentuk genangan air sehingga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk *ludlowi*. Untuk mengurangi masalah di sungai Bengawan Solo dan Telomoyo (keduanya di Karanganyar) ketika tinggi air perbukitan lebih tinggi dari waktu air surut maka permukaan sungai itu digali (Memorie van *Overgave*, 1932: 59).

Daerah Banyumas sebelah timur hampir seluruhnya merupakan daerah perairan Sungai Serayu. Daerah perairan itu bersumber dan mempunyai banyak cabang di gunung-gunung Slamet, Perahu, Sindoro yang kemudian membentuk waduk sepanjang punggung pegunungan. Daerah itu menjadi daerah terbaik sehingga sebagian penduduk Banyumas bermukim di tempat itu. Daerah bagian barat Karesidenan Banyumas mengalir beberapa sungai yang bermuara ke Laut Nusakambangan atau Teluk Segara Anakan.

Daerah pantai di Karesidenan Banyumas tidak ada yang merupakan perbukitan kecuali Nusakambangan yang berbukit batu dan dipisahkan oleh laut dan daratan. Bagian Timur Serayu dan Jeruk Legi merupakan daerah rawa-rawa dan jauh dari laut sehingga tidak berpenghuni. Sebaliknya, Daya Luhur sebagian besar wilayahnya merupakan delta berawa yang setiap tahun terkena aliran lumpur sungai. Kedua wilayah Karesidenan Banyumas baik di pedalaman maupun di pantai merupakan daerah sarang nyamuk malaria.

Wilayah Distrik Cilacap mempunyai banyak daerah yang rendah, sehingga banyak genangan air, rawa-rawa kecil dan besar maupun pembuangan air yang menggenangi di sepanjang perbukitan di Teluk Penyu. Kondisi lingkungan itu menjadikan daerah Cilacap sering mengalami epidemi malaria dan merupakan yang terbesar di wilayah Karesidenan Banyumas.

Daerah Serayu selatan adalah lahan yang penuh dengan lembah dan kaki gunung yang curam sebelum perkebunan dibuka di wilayah Karesidenan Banyumas. Sejalan dengan perkembangan perkebunan maka banyak pepohonan rusak dan menyebabkan timbulnya erosi. Daerah-daerah di karesidenan yang masih tertutup hutan alamiah lama kelamaan menjadi kering. Kondisinya itu telah berubah drastis karena hutan telah menjadi *oro-oro*, rumput liar dan semak belukar. Gambaran Jawa yang penuh dengan hutan lebat mulai sirna dan hutan telah berubah fungsinya sejalan dengan pertumbuhan penduduk.

Epidemi malaria di Karesidenan Banyumas pertama berjangkit di Lembah Serayu dan terbesar terjadi tahun 1845, 1847 dan 1848 dengan menelan korban 328.000 jiwa. Hal ini dapat dipahami karena Lembah Serayu merupakan pemukiman sebagian besar penduduk Karesidenan Banyumas, sedangkan Cilacap mulai banyak dihuni sejalan dengan berkembangnya pelabuhan Cilacap (Susanto Zuhdi, 1991: 10-20)

Pada awal abad 20, pemerintah membuka gudang-gudang untuk barang-barang dan mengadakan perluasan jalur kereta api sampai ke pelabuhan Cilacap. Sejalan dengan perkembangan infrastruktur tersebut, Cilacap menjadi pusat aktivitas ekspor dan transportasi. Perkembangan Cilacap berdampak pada perluasan pemukiman penduduk

yang didukung kesempatan untuk memperoleh pekerjaan di pebuhan dan sekitarnya (Susanto Zuhdi, 1991:103-105).

Cilacap kemudian berkembang menjadi pelabuhan dan kota perdagangan yang ramai untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Lingkungan Cilacap dikenal sebagai daerah penyebab malaria yang setiap tahun berjangkit dan dipastikan setiap lima tahun terjadi epidemi besar dengan menelan ratusan korban. Apa yang terjadi di Cilacap relevan dengan pendapat Boomgaard, bahwa perkembangan daerah pelabuhan Cilacap maupun kondisi alamnya mengalami perkembangan pesat dan menarik banyak orang untuk mendatanginya, tetapi di sisi lain Cilacap tidak didukung kondisi kesehatan yang baik (Boomgaard, 1989: 9-20).

Terlepas dari kondisi alam Banyumas, daerah lembah Serayu setelah Perang Diponegoro terintegrasi ke dalam sistem kolonial. Produk-produk daerah dipasarkan secara nasional maupun internasional melalui jalur laut dan darat. Produk terbesar dari pegunungan Serayu utara adalah tembakau dan produk dari bukit Serayu hilir adalah kopi, kopra, gula jawa, dan buah. Produk dari pegunungan utara langsung dibawa ke Pekalongan dan Tegal, sedangkan dari daerah hilir eksport melalui jalan kereta api di Purwokerto. Perkembangan transportasi darat dan laut maupun sungai ikut berperan dalam perkembangan Karesidenan Banyumas menjadi daerah yang tidak terisolir. Sejalan dengan itu, berbagai kemajuan teknologi maupun perkembangan kesehatan ikut mempengaruhi kondisi kesehatan di Banyumas secara umum (Peter J.M. Nas (ed), 1986: 258).

Lingkungan pemukiman penduduk tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat. Terdapat keseragaman dalam bentuk rumah dan bahan bangunan yang digunakan. Bahan dasar utama bangunan rumah baik di desa maupun kota adalah bambu dan kayu dengan atap rumbia. Di daerah pantai, hampir semua rumah didirikan di atas tiang dengan lantai beralaskan ranting dan dahan-dahan pohon, kecuali rumah kepala desa yang beralaskan tikar. Rumah di atas tiang tidak terpengaruh pada genangan air karena setelah air surut akan tergenang kembali dengan air pasang.

Rumah-rumah penduduk pedalaman juga mempunyai kesamaan bahan bangunan, yang menggunakan semen dan genteng tidak banyak. Dalam laporan Residen tahun 1928, di Banjarnegara terdapat 19.514 rumah di kota kecamatan dan baru 15.453 yang diperbaiki atapnya dengan genteng atau seng. Rumah dengan menggunakan atap rumbia kurang sirkulasi udara dan menjadi tempat berkembangnya tikus, nyamuk pembawa penyakit, maka diprogramkan untuk diganti dengan genteng atau seng. Demikian pula dengan bambu sebagai bahan bangunan. Rumah yang tidak memiliki jamban juga kurang baik bagi kesehatan karena menjadi tempat berkembangnya cacing tambang (Memorie Resident Banjoemas, 1928). Sebagian besar penduduk pribumi Banyumas tinggal di pedesaan, sebaliknya hampir semua penduduk asing (Eropa, Cina, Arab) tinggal di perkotaan dan rumah-rumah mereka umumnya sudah memakai semen dan genteng.

Air *ledeng* sejak awal abad XX sudah digunakan di beberapa wilayah di Karesidenan Banyumas dan dikelola oleh Perusahaan Air Minum dengan cara berlangganan. Air *ledeng* dipergunakan untuk keperluan sehari-hari sebagai air minum, memasak dan keperluan rumah tangga yang lain. Sumber air sungai dipergunakan untuk irigasi bagi tanah pertanian dan perkebunan yang sudah dibangun sejak tahun 1833 untuk dimanfaatkan di beberapa wilayah Karesidenan Banyumas. Penduduk daerah pantai memanfaatkan air hujan untuk keperluan sehari-hari, jika musim kemarau dengan memakai air sungai yang disimpan dalam kaleng minyak tanah dan kendi (Arsip Banyumas No. 20.16).

C. Kondisi Penduduk

Penduduk Banyumas sebagian besar adalah orang Jawa, sedangkan penduduk Eropa dan Timur Asing tidak banyak jumlahnya kecuali penduduk Cina. Mereka umumnya tinggal di kota-kota kabupaten, di ibukota karesidenan dan di kota pelabuhan. Penghitungan jumlah penduduk telah dilakukan orang sejak lama. Di Jawa, raja-raja telah lama melakukan semacam sensus yaitu untuk mengetahui jumlah penduduk, biasanya dikaitkan dengan kewajiban membayar pajak dan

upeti. Penghitungan jumlah penduduk berdasar cacah yang disamakan dengan rumah tangga. Pengertian cacah juga dikaitkan dengan “bumi” yaitu mereka yang telah tinggal di satu wilayah atau desa, termasuk *numpang*, yaitu orang-orang yang tinggal di sekitar desa tetapi tidak termasuk lajang (Bram Peper, 1985: 8).

Pada pertengahan abad 19 sampai awal abad 20 terutama periode 1830 – 1940 menunjukkan pertumbuhan penduduk Karesidenan Banyumas meningkat tajam mulai tahun 1860. Dengan perkiraan pertumbuhan penduduk Karesidenan Banyumas selama 70 tahun adalah 1,43% (Peter Boomgaard, 1989: 171).

Selanjutnya pada awal abad ke-20 dimungkinkan adanya wabah yang menyerang Jawa seperti wabah pes. Wabah ini diperkirakan untuk Indonesia berasal dari Cina Selatan dan menyerang Jawa tahun 1911, 1913, 1914, sedangkan wabah influenza menyerang Jawa tahun 1919. Wabah itu telah memakan banyak korban. Oleh karena itu, angka kematian di Asia dan terutama di Jawa melonjak karena penyakit tersebut (Arsip Banyumas No. 22.33).

Perlu diketahui bahwa epidemi yang terjadi di Karesidenan Banyumas menimbulkan banyak korban kematian adalah disebabkan oleh malaria dan menjadi penyakit rutin musim pancaroba (Arsip Medica No. 21). Mulai sekitar tahun 1920an sampai 1930an terjadi kenaikan penduduk yang disebabkan kemajuan kesehatan modern dan perluasan pasar. Hal tersebut mengurangi terjadinya kelaparan, dan membuka kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Keadaan ini pula yang diduga menyebabkan kenaikan populasi buruh.

Pada awal abad 20 banyak orang bepergian untuk mencari kerja tetapi mereka akan kembali ke daerah asal setelah beberapa bulan atau tahun. Namun, tidak tertutup kemungkinan banyak dari mereka yang merasa senang dan akan menetap di tempat baru. Migrasi untuk orang Jawa menurut van Deventer sangat tepat yaitu untuk mengembangkan daerah luar Jawa. Pemikiran van Deventer itu kemudian diikuti oleh Idenburg dan Fock tahun 1905 untuk mengembangkan perkebunan di luar Jawa (Arsip Banjoemas No. 19.4).

Peristiwa migrasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk di Banyumas lebih karena alasan ekonomi. Untuk

mendapat pekerjaan orang rela mencari di tempat yang jauh dari kampungnya dengan tujuan agar mendapat penghasilan lebih baik. Penduduk Banyumas melakukan migrasi ke beberapa wilayah di Jawa bahkan sampai luar Jawa. Ketika daerah Kandanghaur - Cirebon dibuka tahun 1921-1922 untuk lahan pertanian, membutuhkan banyak tenaga yang tidak dapat dipenuhi oleh penduduk setempat (Arsip Banjoemas 13.5). Lapangan kerja di bidang pertanian tersebut ikut menjadi penyebab mengalirnya penduduk Karesidenan Banyumas yang kurang subur. Ada beberapa daerah yang menjadi tujuan migrasi seperti Surakarta, Kediri, Banten, Madiun maupun daerah di luar Jawa seperti Sumatra dan Sulawesi. Daerah-daerah tujuan migrasi tersebut merupakan pusat-pusat industri dan perdagangan.

Musim kemarau panjang yang mengakibatkan panen tidak baik dan harga bahan pangan mahal. Hal tersebut menyebabkan penduduk kekurangan bahan pangan. Mahalnya bahan pangan pokok mendorong penduduk mencari tempat lain dan itu berarti pergi dari Karesidenan Banyumas. Pada awal abad 20, penduduk yang meninggalkan karesidenan adalah 7.698 orang dengan rincian: Banyumas 2.109 orang, Purwokerto 457 orang, Purbalingga 1.446 orang, Banjarnegara 59 orang dan Cilacap 3.627 orang. Sementara itu, ada yang pergi dengan tujuan daerah sekitar maupun ke Kalimantan dan Deli di Sumatera. Apabila dibanding jumlah penduduk Karesidenan Banyumas tidak mencapai satu persen. Mereka pergi hanya sementara, sifatnya hanya musiman. Begitu musim kemarau berakhir mereka akan kembali dan mengerjakan sawahnya kembali (Arsip Banjoemas No. 19.4).

Sejak Banyumas menjadi daerah perkebunan maka penduduk sekitar berdatangan untuk mencari kerja. Pada awal abad 20, penduduk yang berdatangan sebanyak 3.908 jiwa; antara lain dari Bagelen. Daerah yang memberi harapan adalah daerah surplus seperti perkebunan tebu. Daerah itu menunjukkan pertambahan penduduk yang positif. Bagi penduduk setempat, kegiatan di perkebunan kurang menarik karena mereka terserap di pertanian bersamaan dengan masa penanaman tebu. Pada waktu-waktu pekerjaan ladang selesai dan tidak ada yang bisa dikerjakan, penduduk justru meninggalkan Banyumas untuk migrasi mencari pekerjaan lain. Dengan datangnya musim penghujan dan

dimulainya kegiatan di sawah, penduduk mulai kembali, di lain pihak terjadi arus masuk penduduk sekitar Banyumas karena Banyumas juga merupakan daerah pertanian yang besar (Arsip Banjoemas No. 18.1).

Daerah Banyumas pada akhir abad 19 sampai awal abad 20 merupakan daerah terpadat penduduknya. Kepadatan penduduk asing di Karesidenan Banyumas terjadi di pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi (Gelderen, 1974:20). Pertumbuhan penduduk Banyumas yang meningkat dapat dikaitkan dengan perluasan industri perkebunan yang menyerap banyak tenaga kerja. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk sejalan dengan tingkat kemakmuran yang mempengaruhi kelahiran dan arus migrasi masuk. Daerah yang menjadi pusat kegiatan industri dan perdagangan menjadi daya tarik tujuan perpindahan penduduk.

Kepadatan penduduk satu wilayah dengan wilayah lain tidak sama dan itu berkaitan dengan tingkat kesuburan tanah yang dapat diolah dengan baik dan yang tidak dapat diolah atau dihuni. Jadi, kepadatan dapat bertambah jika pembandingnya hanya tanah yang subur dan dapat dihuni saja. Selain faktor kesuburan tanah, kepadatan penduduk juga ditentukan oleh intensitas dan produktivitas penggarapan tanah maupun kesempatan untuk mendapat penghasilan di luar pertanian (JH. Boeke, 1983:74-75).

Berkaitan dengan kepadatan penduduk ternyata pengaruh penjajahan Belanda cukup besar dalam kehidupan agraris penduduk Jawa yang sudah lama berlangsung turun-temurun. Setelah selesai Perang Diponegoro, Jawa relatif aman, suasana itu ikut mendukung pertumbuhan penduduk. Dari situlah kemudian perluasan tanah garapan berlangsung dan tanah perkebunan berkembang cepat di Karesidenan Banyumas (SM. Gandasubrata, 1952: 13).

Pembukaan areal perkebunan membawa dampak besar pada perkembangan transportasi darat dan laut untuk mengangkut barang produksi ke gudang penyimpanan. Kondisi infrastruktur transportasi Banyumas tidak menguntungkan bagi perdagangan dan ini memang tidak lepas dari kondisi alam Banyumas yang bergunung-gunung dan tidak rata. Transportasi darat menjadi lambat dan memberatkan penduduk, terutama untuk memasarkan barang produksi ke lain desa. Selain

jalan darat, Banyumas memiliki transportasi sungai melalui Sungai Serayu atau Sungai Winong ke Pelabuhan Cilacap. Perkembangan transportasi di Banyumas berkembang terus hingga menghubungkan kota-kota kabupaten dengan ibukota distrik dan *onderdistrik* serta menuju sumber aktivitas perekonomian. Lintas kereta api pertama yang dibangun sejak 1879 menghubungkan Cilacap – Yogyakarta, kemudian dikembangkan dengan jalur Maos–Purwokerto–Sokaraja–Banjarsari–Purworejo–Banjarnegara, disusul dengan dibukanya jalur kereta api yang menghubungkan dengan karesidenan lain (Purnawan Basundoro, 1999: 95-186).

Perkembangan transportasi selain mengembangkan komunikasi dan perekonomian juga menjadi tujuan migrasi penduduk ke wilayah-wilayah pusat aktivitas perekonomian dan perdagangan. Banyumas tidak lagi menjadi daerah yang terisolir dari kegiatan di sekitarnya dan berkembang menjadi salah satu daerah perkebunan besar di Jawa. Hal ini juga berpengaruh bagi perkembangan kehidupan budaya antara lain berupa arsitektur bangunan, gaya hidup dan berkembangnya seni pertunjukan maupun atraksi budaya (Memorie Resident Banjoemas, 1928).

D. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan memiliki peran yang amat penting bagi perkembangan sejarah wilayah Banyumas. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di wilayah ini tidak bisa dilepaskan dari peranan sektor pendidikan. Sebelum pemerintah kolonial Belanda membangun sekolah-sekolah di wilayah Banyumas, mayoritas penduduk Banyumas belum mengenyam pendidikan modern. Sebagian kecil mungkin hanya belajar di pesantren-pesantren atau langgar-langgar yang ada di sekitar mereka. Sistem pendidikan modern baru dikembangkan di wilayah Banyumas pada awal abad ke-20 ketika ada gerakan politik etis, yang meliputi edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan transmigrasi (pemindahan penduduk ke luar pulau).

Pendirian sekolah-sekolah di Banyumas pada awalnya ditujukan untuk anak-anak Belanda yang orang tuanya bekerja di daerah ini,

baik yang bekerja di pabrik gula, di pemerintahan, atau di lembaga-lembaga lain. Selain itu, yang berhak bersekolah di lembaga pendidikan modern tersebut adalah anak-anak para pembesar di daerah ini seperti anak bupati atau anak wedana. Sekolah pertama yang didirikan pada awal abad ke-20 adalah *Europeesche Lagere School* (ELS/Sekolah Rendah Eropa), yaitu sekolah dasar untuk anak-anak Eropa. Di pabrik gula Klampok juga didirikan ELS untuk anak-anak para pegawai pabrik gula tersebut yang berkebangsaan Eropa. Anak-anak pribumi bisa sekolah di tempat tersebut asalkan orang tuanya memiliki jabatan bupati (Memorie van Overgave Resident Banjoemas, 1928).

Anak-anak pribumi bisa sekolah di Sekolah Bumiputera (*Inlandsche School*) kelas dua (*Tweede Klasse*) atau yang dikenal dengan *sekolah angka loro*, atau di Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat (*Volksschool*). Sekolah Desa pertama kali didirikan di Indonesia tahun 1907. Sekolah-sekolah semacam ini pada awal abad ke-20 jumlahnya sudah cukup banyak di wilayah Banyumas.

Pada umumnya, jumlah murid di tiap sekolah *angka loro* pada tahun 1916 berjumlah 201 murid, sedangkan rata-rata di Sekolah Rakyat berjumlah 75 murid. Walaupun jumlah sekolah belum merata untuk masing-masing daerah/desa, namun jumlah tersebut cukup signifikan untuk melakukan perubahan sosial di Banyumas. Ketika kota Purwokerto berkembang menjadi kota yang ramai setelah dibukanya jalur kereta api SDS, berturut-turut di kota ini didirikan *Normaal School* (Sekolah Norma), *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO, setingkat SMP), *Kweekschool* (Sekolah Guru), *Ambachtsschool* (Sekolah Teknik/Pertukangan), dan Sekolah Mantri Kesehatan (Koloniaal Verslag, 1917).

Pendirian sekolah-sekolah Barat di Karesidenan Banyumas memiliki peranan yang sangat penting dalam melahirkan elit modern di wilayah ini. Mereka adalah kelompok terpelajar yang ikut berperan dalam menjalankan roda pemerintahan serta menjalankan fungsi-fungsi lainnya ketika sebagian besar masyarakat pribumi di wilayah ini belum dapat mengenyam pendidikan modern. Fungsi-fungsi lain yang dijalankan oleh elit modern di Banyumas antara lain sebagai dokter, guru, dan juru rawat. Bupati-Bupati di karesidenan Banyumas

pada abad ke-20 adalah elit terpelajar didikan sekolah-sekolah Barat. Bupati Banyumas tahun 1933-1950; SM. Gandasubrata, adalah lulusan ELS, kemudian melanjutkan ke HBS di Semarang dan Jakarta. Bupati lain pada periode sejaman, antara lain Bupati Banjarnegara Sumitro Kolopaking Purbonegoro adalah lulusan HIS Banjarnegara. Setelah itu, beliau melanjutkan ke HBS di Jakarta, dan akhirnya meneruskan sekolahnya ke negeri Belanda. Ia adalah salah seorang putra Banyumas yang ikut aktif dalam pergerakan nasional di negeri Belanda. Bupati Purbalingga Sugondho adalah lulusan HBS Semarang. Setelah bekerja beberapa saat di lingkungan *Pangreh Pradja* kemudian melanjutkan ke *Bestuurschool* di Jakarta. Bupati Cilacap Tjokrosiswojo adalah alumni *Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA); sekolah untuk Pendidikan Pegawai Bumiputera di Magelang. Setelah bekerja beberapa saat, ia juga melanjutkan ke *Bestuurschool* di Jakarta (Purwoto Suhadi Gandasubrata, 2003:10-14).

Bupati-bupati di atas adalah bupati terakhir yang diangkat berdasarkan keturunan (monarki). Pendidikan modern di Banyumas telah turut mempersiapkan generasi terpelajar yang nantinya akan mengisi berbagai jabatan berdasarkan kecakapan, bukan berdasarkan keturunan. Selain bupati-bupati di atas, banyak anak-anak dari masyarakat kebanyakan yang akhirnya bisa mengalami mobilitas vertikal karena mereka sekolah di sekolah-sekolah Barat di wilayah Banyumas.

Selain mereka yang aktif di Pamong Praja, putra Banyumas juga banyak yang melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi kedokteran. Ada yang ke *School tot Opleiding van Indische Artsen* (STOVIA) Jakarta, maupun di *Nederlandsche-Indische Artsen School* (NIAS) Surabaya. Beberapa putra Banyumas lulusan dari sekolah kedokteran antara lain: Dr. Bunyamin, Dr. Angka, Dr. Gumbreg. Perintis ilmu bedah di Indonesia; Prof. Dr. Margono Soekarjo, juga putra Banyumas. Namanya diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Daerah di kota Purwokerto. Dokter lain putra Banyumas adalah Dr. R. Djojosoemitro, putra Mantri Polisi Sokaraja, kelahiran tahun 1831, Dr. M. Wongsoredjo, dan Dr. R. Ranoeatmodjo. Ketiga nama terakhir adalah lulusan Sekolah Dokter Jawa, yang mendidik bumiputera menjadi ahli vaksin (Soedana Gandasubrata, tt: 15-25)

E. Sarana Kesehatan

Sistem pengobatan modern baru dikenalkan kepada masyarakat Banyumas sekitar akhir abad ke-19. Semula pengobatan modern hanya ditujukan untuk orang-orang Belanda yang ada di daerah ini, namun seiring dengan perjalanan waktu, pengobatan modern juga dikenalkan kepada masyarakat umum di Banyumas. Pada waktu itu, yang pertama kali memperkenalkan pengobatan modern kepada masyarakat luas bukan pemerintah tetapi misi *Zending Gereja-gereja Reformasi Rotterdam* (penyebar agama Kristen).

Rumah sakit pertama yang dibangun oleh misi *Zending* terdapat di Purbalingga, yaitu di desa Trenggiling, sekitar awal abad ke-20. Rumah sakit tersebut bernama Rumah Sakit *Zending (Zendingziekenhuis te Purbalingga)*. Masyarakat setempat menyebutnya “*Sendeng*” atau Rumah Sakit Trenggiling. Rumah sakit tersebut dibangun oleh bupati yang memerintah Purbalingga, yaitu Raden Adipati Ario Dipakoesoema VI. Pada awalnya, gedung yang digunakan untuk rumah sakit adalah bekas pabrik indigo (pewarna kain dari tumbuhan indigo) dan pengepakan gula. Masyarakat sekitar yang mau berobat ke rumah sakit tersebut biasanya mengatakan mau ke *Sendeng* (Memorie van Resident Banjoemas, 1925).

Pada tahun 1885 para pengusaha pabrik gula di Banyumas sebenarnya telah mendirikan balai pengobatan modern, tetapi masih berujud klinik yang ditujukan untuk para pembesar pabrik gula. Tidak untuk kepentingan masyarakat umum. Klinik tersebut diberi nama *Vereeniging Kliniek Poerwoekerto* (Perkumpulan Klinik Purwokerto). Setelah perusahaan kereta api SDS beroperasi di Banyumas, klinik tersebut juga mendapatkan sumbangan dana dari SDS (Arsip Banjoemas. 11.4).

Pada tahun 1914 *Vereeniging Kliniek Poerwoekerto* membangun rumah sakit umum di kota Purwokerto. Rumah sakit ini melayani masyarakat luas dengan kapasitas 90 tempat tidur. Pembangunan rumah sakit ini selesai tanggal 15 Agustus 1914. Direktur rumah sakit ini adalah Dr. P.R. D’Arnaud Gerkens. Ia dibantu oleh Dokter Jawa lulusan STOVIA bernama Dr. M. Samingoen. Rumah sakit ini

merupakan cikal bakal Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo. Pasien di rumah sakit ini datang dari berbagai tempat seperti dari Cilacap, Kedu-Barat, dan dari karesidenan Pekalongan (Memorie van Resident Banjoemas, 1922).

Tahun 1925 di kota Banyumas telah didirikan rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Juliana. Rumah sakit tersebut diresmikan tepat bersamaan dengan ulang tahun Putri Mahkota Belanda Sri Ratu Juliana pada tanggal 30 April 1925. Rumah sakit ini dibuat dan dibiayai oleh pemerintah daerah (*gewest*).

Tahun 1929 sampai tahun 1933 terjadi resesi ekonomi global atau yang dikenal dengan istilah *malaise*. Ekspor-impor macet di sana-sini, perekonomian dunia macet total. Berbagai komoditi ekspor dari Jawa tidak laku dan banyak menumpuk di gudang-gudang di pelabuhan. Kondisi ini berdampak pada rumah sakit di Purwokerto yang selama ini mendapat suntikan dana dari pabrik gula dan dari perusahaan kereta api SDS. Pabrik-pabrik gula di seluruh Banyumas ditutup akibat macetnya perdagangan (ekspor).

Penutupan pabrik gula tersebut tentu saja berdampak pada pendapatan perusahaan kereta api SDS yang selama ini banyak mengangkut gula dan segala peralatan pabrik gula. Akibatnya, dana untuk rumah sakit juga terhenti. Akibat kesulitan pendanaan, akhirnya rumah sakit diserahkan kepada misi Zending di Purbalingga. Akibat pemindahtanganan pengelolaan akhirnya nama rumah sakit diganti menjadi *Zendingsziekenhuis te Poerwokerto* (Rumah Sakit Zending Purwokerto) (Memorie van Overgave Resident van Banjoemas, 1933). Rumah sakit tersebut berkembang pesat setelah dikelola oleh Zending. Kapasitas tempat tidur bertambah pesat menjadi 200 tempat tidur pada tahun 1937 dan menjadi 375 pada tahun 1941.

Tahun 1935 *Zendingsziekenhuis te Poerwokerto* (Rumah Sakit Zending Purwokerto) membuka cabangnya di Sidareja-Cilacap dalam bentuk klinik. Klinik ini banyak dikunjungi pasien kurang gizi karena daerah Sidareja dan sekitarnya sering dilanda kelaparan. Pasien lainnya adalah penderita malaria dan *frambusia*. Dokter dari Purwokerto berkunjung sekali dalam seminggu ke klinik tersebut.

Dr. R.M. Wirasmo Partaningrat merupakan salah seorang dokter di Banyumas yang telah berjasa mengungkap kematian akibat *wuru bongkrek*. Ia mencurahkan tenaganya untuk meneliti penyebab kematian akibat tempe bongkrek selama dua tahun, yaitu pada tahun 1933 sampai tahun 1934. Ia mengumpulkan berbagai bahan yang diduga menjadi penyebab *wuru bongkrek* dan mengirimnya ke *Geneeskundig Laboratorium* di Jakarta. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ternyata berbagai ramuan bahan baku tempe bongkrek, terutama bungkilnya, seringkali menjadi media yang amat efektif untuk berkembang biak bakteri *pseudomonas coccovenenans* ketika dalam proses peragian. Bakteri itu menghasilkan racun kuat yang bisa menyebabkan orang meninggal dunia.

Pendirian berbagai fasilitas kesehatan modern di karesidenan Banyumas oleh pemerintah kolonial Belanda telah banyak menolong masyarakat daerah ini ketika mereka sakit. Berbagai budaya hidup sehat juga ditularkan oleh para dokter dan juru rawat kepada penduduk setempat. Fasilitas kesehatan modern ini kemudian diwariskan kepada masyarakat Banyumas ketika kekuasaan kolonial harus pergi dari daerah ini (SM. Gandasubrata, 1952: 7).

F. Sarana Peribadatan

Pada awal abad 20 di wilayah Banyumas berkembang tempat peribadatan Islam, Kristen, Katholik, dan Khong Hu Chu bagi etnis Cina. Bagi umat yang beragama Islam sebagian besar melaksanakan ibadahnya di kampung Kauman Lama. Masjid tersebut dibangun pada tahun 1922. Dalam perkembangannya muncul berbagai organisasi yang bernaifaskan Islam yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Sarekat Islam serta Ahmadiyah (Memorie Resident Banjoemas, 1922).

Selanjutnya bagi umat yang beragama Kristen dalam menjalankan ibadahnya juga ada di wilayah kauman lama Banyumas. Dalam perkembangannya pada tahun 1915, kegiatan Gereja Kristen Jawa berada di Grendeng. Selanjutnya pada tahun 1927 berkembang dengan membangun balai pertemuan di Ringweg yang juga sebagai tempat kebaktian (Memorie Resident Banjoemas, 1927).

Bagi yang beragama Katholik kegiatan ibadahnya pada Desember 1928 namun belum memiliki bangunan tetap sebagai gereja. Kemudian pada 9 Maret 1930 menempati lokasi di *Normaalschool laan*. Selanjutnya tempat peribadatan bagi etnis Tionghoa yang masih memegang teguh tradisi leluhurnya berupa kepercayaan Kong Hucu ialah Kelenteng Hok Tek Bio yang terletak di sebelah utara Pasar Wage, Pecinan (Memorie van Overgave Resident Banjoemas, 1928).

BAB III

EKONOMI BANYUMAS MASA KOLONIAL

A. Eksploitasi Ekonomi di Banyumas

Eksploitasi ekonomi ini diawali setelah Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 sampai tahun 1830. Selama perang berlangsung, pihak kolonial Belanda telah menanggung beban lebih dari f 30.000.000, di samping biaya perang yang ditaksir sekitar f 2.000.000. Semua dana itu harus diperoleh kembali melalui eksploitasi kolonial yang dijalankan secara intensif (Sartono Kartodirdjo, 1986: 141-147).

Banyumas sebagai daerah *mancanegara kilen* Kasunanan Surakarta, dilepas dan secara resmi ditempatkan sebagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan kolonial pada tanggal 22 Juni 1830. Pada mulanya pengaturan dan pengawasan seluruh Banyumas diserahkan kepada Residen Pekalongan (Arsip Banyumas, 64). Untuk dapat menguasai daerah itu, pihak kolonial membayar uang reparasi sebanyak f 90.000 kepada Kasunanan Surakarta. Apabila jumlah ganti rugi itu diperhitungkan secara lebih cermat, maka daerah Karesidenan Banyumas memiliki luas wilayah sekitar 5.500 kilometer persegi hanya dihargai f 22 setiap kilometer persegi. Biaya yang dikeluarkan itu juga diharapkan segera dapat diperoleh kembali melalui eksploitasi kolonial di daerah itu (Sartono Kartodirdjo, 1986: 146).

Untuk menetapkan kekuasaannya di Banyumas, pihak kolonial Belanda secara intensif mengadakan pembenahan wilayah. Usaha itu dipimpin oleh Residen Pekalongan yang pada waktu itu menjabat

oleh Hallawijn. Tujuan utama dari usaha pembenahan wilayah adalah untuk menginventarisasikan luas dan keadaan tanah, kondisi wilayah, jumlah penduduk maupun kondisi masyarakat pribumi. Dengan cara ini pemerintah kolonial akan segera memperoleh gambaran tentang berbagai permasalahan yang harus dihadapi di tempat itu, sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan dengan kebijaksanaan yang setepat mungkin (Arsip Banjoemas 11.4).

Tindakan pertama yang dipandang perlu untuk ditangani adalah memeriksa dan mengatur tanah untuk memudahkan penarikan pajak kepada penduduk. Pajak ini direncanakan akan dimulai penarikannya pada bulan September tahun 1830, untuk menggantikan penyerahan wajib yang pernah ditarik oleh kasultanan. Demi keberhasilan kebijaksanaan itu, pihak kolonial memandang perlu melibatkan berbagai unsur, termasuk para kepala pribumi di daerah itu.

Untuk melaksanakan tugas itu, Residen Pekalongan menunjuk tiga orang pembantunya yaitu Daendels, Tack dan Vitalis. Masing-masing mendapat tugas untuk melakukan pendataan di daerah yang telah ditentukan. Daendels melaksanakan tugasnya di bagian timur Banyumas, Sigaluh, Banjar dan Wonokerto serta Mandiraja. Tugas-tugas yang dibebankan kepada Tak adalah melaksanakan pendataan di wilayah Purbalingga, Kertanegara, Ayah, Jeruklegi dan Donan. Kemudian Vitalis, bertugas di daerah Purwokerto, Sokaraja, Ajibarang, Patikraja, Dayahluhur, Pancang dan Perdikan (Arsip Banjoemas 11.4).

Dalam waktu yang relatif singkat, para petugas dapat melaporkan hasil sementara pendataan itu. Laporan itu terutama berkaitan dengan jumlah penduduk yang dihitung dalam bentuk cacah. Jumlah penduduk dari dua daerah utama adalah sebagai berikut: Pertama, Banyumas Kasepuhan, yang terdiri dari Banyumas berpenduduk 500 cacah, Ayah 800 cacah, Patikraja 400 cacah, Purwokerto 400 cacah, Banjar 200 cacah, dan Pancang 416 cacah. Kedua, daerah Banyumas Kanoman terdiri dari Banyumas berpenduduk 500 cacah, Panjer 800 cacah, Sokaraja 400 cacah, Purbalingga 400 cacah, Banjar 200 cacah dan Perdikan 400 cacah (Arsip Banjoemas 11.4).

Dalam rangkaian laporan itu, dikemukakan pula tentang kemungkinan-kemungkinan membuka isolasi daerah Banyumas. Langkah yang ditempuh adalah melalui usaha untuk membuka pelabuhan laut Cilacap yang berada di sekitar pulau Nusakambangan. Daerah pantai ini dapat dijangkau dari pedalaman Banyumas melalui jalur Sungai Serayu.

Tentang batas-batas sebelah barat daerah Banyumas, juga merupakan bagian penting dari laporan Vitalis yang mendapat perhatian serius. Daerah Dayahluhur yang selama itu kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kerajaan Mataram maupun Surakarta, diperluas ke arah barat sampai Sungai Cijulang. Dengan cara ini diharapkan daerah Dayahluhur dapat terbuka dari kondisinya yang terisolasi, dengan menggunakan sungai itu sebagai sarana transportasi ke arah Cirebon (Arsip Banjoemas 64).

Sebagai akibat dari tindakan pihak kolonial itu, maka batas barat Jawa Tengah (Banyumas Barat) sampai sekarang bukan berdasarkan atas pertimbangan etnis. Hal ini sangat bertentangan dengan pendapat Kern, bahwa etnis Sunda dan Jawa merupakan batas antara Mataram dengan Hindia Belanda sesuai dengan perjanjian 1705 di Kartasura. Garis perbatasan itu lebih berdasarkan pada pertimbangan lingkungan alam atau geografis (Panekoek, 1952: 20).

Dalam perkembangan selanjutnya, pendataan diarahkan untuk membentuk Banyumas sebagai suatu Karesidenan tersendiri. Hal ini sangat memerlukan data-data yang lebih memadai mengenai kondisi tanah dan situasi kependudukan terutama yang berkaitan dengan tingkat sosial-ekonomi mereka. Dengan cara ini maka pemerintah daerah yang baru dibentuk itu mampu melaksanakan tugasnya secara baik. Berdasarkan data-data lapangan yang diperoleh, maka Karesidenan Banyumas dibagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kepatihan, yaitu: Banyumas, Purbalingga, Purwokerto dan Banjarnegara berstatus sebagai kabupaten, sedangkan Dayaluhur sebagai daerah kepatihan (Arsip Banyumas 20).

Selanjutnya diangkat residen pertama yang bernama der Sturler yang secara resmi dilantik pada tanggal 22 September 1830. Dalam melaksanakan tugasnya itu, residen berpedoman pada Surat Keputusan

(*besluit*) Gubernur Jenderal J.G. van den Bosch No. 1 tahun 1830, yang dikeluarkan pada tanggal 18 September tahun 1830 itu (Besluit Gubernur Jenderal, 1830).

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jendral No. 1 Tahun 1830, maka Karesidenan Banyumas secara resmi terbentuk pada tanggal 18 September 1830. Karesidenan Banyumas itu terdiri dari empat kabupaten dan satu daerah kepatihan. Daerah-daerah yang telah lama lepas dari kesatuan wilayah Banyumas dipersatukan kembali. Adapun daerah yang dipersatukan itu adalah meliputi wilayah Karangobar (Pekalongan), Tanah Madura (Cirebon), Karangsari (Tegal) dan Nusakambangan yang sejak tahun 1706 sudah berada di bawah kekuasaan kompeni (Arsip Banjoemas 11.4).

Dalam melaksanakan tugasnya, Residen Banyumas berkedudukan di Banyumas dan dibantu oleh tiga orang asisten residen. Setiap asisten residen ditempatkan pada wilayah yang berbeda, yaitu Ajibarang (ibukota Kabupaten Purwokerto), Purbalingga dan Banjarnegara. Asisten residen dibantu oleh seorang *upas* dan seorang sekretaris pengadilan negeri. Dalam ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Kolonial Belanda tentang sistem pemerintahan dalam negeri, maka secara administratif ditentukan melalui sistem dua jalur administratif, yaitu: 1) Untuk Pamong Praja Belanda, terdiri dari *gewest*, *afdeeling* dan *onderafdeeling*, 2) Untuk Pamong Praja Indonesia (pribumi) terdiri dari *regentschap* (kabupaten), *district* (kawedanan), dan *onderdistrict* (kecamatan) (Soejito, 1976: 34).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Residen Banyumas yang berkedudukan di Kota Banyumas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh asisten residen yang masing-masing ditempatkan di Ajibarang, Purbalingga dan Banjarnegara. Dibantu pula oleh seorang *upas* (*kommis*) dan seorang sekretaris pengadilan negeri. Asisten residen membawahi langsung bupati, karena pejabat ini bertindak sebagai pimpinan tiap-tiap *afdeeling*. Bupati disebut juga sebagai *hoof van plaatselijk* (kepala pemerintah setempat) (Soejito, 1976: 40). Dengan demikian, kedudukan bupati berada langsung di bawah asisten residen. Keadaan semacam ini berlangsung hingga tahun 1931. Sesudah tahun itu kedudukan bupati tidak lagi di bawah, tetapi di samping

asisten residen. Baik bupati maupun asisten residen masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri dan tugas bersama. Keduanya juga berada di bawah pimpinan residen yang bersangkutan.

Adapun tugas asisten residen dibantu oleh beberapa kontrolir, yang masing-masing mempunyai suatu wilayah tugasnya sendiri (*controleafdeeling*). Luas wilayahnya pada umumnya sama dengan luas wilayah kabupaten. Akan tetapi di kabupaten-kabupaten yang besar, kadang-kadang mempunyai lebih dari satu *controleafdeeling*. Dalam praktiknya, kontrolir seperti itu bertindak seolah-olah sebagai seorang wakil (*bevoogden*) dari Pangreh Praja Pribumi. (Soejito, 1976: 40).

Kemampuan dalam sistem kekuasaan, mendorong pemerintah kolonial untuk melaksanakan eksploitasi ekonomi, yang menyangkut pengerahan sistem pajak, sistem penyerahan wajib, dan sistem pengerahan tenaga kerja paksa. Dalam sistem pajak di Banyumas, penduduk diharuskan membayar pajak tanah, pajak keluarga, pajak kepala, dan pajak pemilikan (Sartono Kartodirdjo, 1986: 166).

Penetapan pembayaran pajak keluarga dipengaruhi oleh kemampuan seseorang. Pertama, diukur dari banyaknya jumlah tenaga pembantu atau *rayat*, jumlah *brayat* (*huisganoten*) yaitu anggota keluarga (*familiesleden*) maupun bukan (*vreemden*) yang berada di bawah perlindungannya atau yang hidup berada di bawah satu atap. Kedua, diukur dari tingkat kekayaan atau kepemilikan seperti bangunan rumah, status pemilikan rumah dan kekayaan yang dimiliki, sehingga dikenal juga dengan nama pajak *plawang*. Dengan demikian, setiap keluarga dikenai beban pajak yang bervariasi tergantung dari kondisi perumahan, kekayaan dan jumlah anggota *brayat* yang berada di bawah perlindungannya (Tanto Sukardi, 2014: 53).

Selain itu, penduduk juga masih harus membayar pajak tanah yang dibebankan kepada setiap petani *sikep*. Jumlah pajak yang harus diserahkan kepada pemerintah juga bervariasi. Kelompok *sikep* berlahan luas, mempunyai tanggung jawab berbeda dibanding dengan kelas pemilik hak atas tanah yang lebih sempit. Dengan demikian, kelompok *numpang* yang tidak memiliki hak atas tanah tidak berkewajiban kepada *sikep* untuk melakukan kerja dan pelayanan sehubungan dengan tanah garapan yang dikerjakannya.

Kebijakan tentang pajak diikuti dengan kebijakan lain yang berkaitan dengan penyerahan wajib dari berbagai hasil perkebunan untuk kepentingan komoditi ekspor. Ada tiga jenis tanaman komoditi yang menjadi andalan selama awal abad XX yaitu kopi, indigo dan tebu (Arsip Banjoemas 20.1). Tanaman lain yang diusahakan dalam skala kecil di daerah ini adalah teh, kapas, kayumanis, tembakau, dan lada. Dengan demikian, maka sejak Banyumas dijadikan sebagai daerah kolonial (1830), eksploitasi ekonomi secara intensif dilakukan.

B. Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula

Dalam rangka memperoleh lahan pertanian untuk perkebunan tebu di Jawa pada akhir abad XIX, pemerintah menerapkan cara baru untuk mendapatkan tanah pertanian. Pemerintah perlu mendapatkan persetujuan penduduk yang memegang hak atas tanah yang bersangkutan. Mengenai luas tanah yang diperlukan, tidak lebih seperlima dari tanah pertanian yang digarap oleh penduduk desa (G.J. Schutte, 1994: 152-153).

Secara tradisional, semua tanah adalah milik kerajaan yang pengelolaannya diserahkan kepada para penguasa lokal. Untuk tingkat lokal urusan tanah diserahkan kepada bupati, sedangkan di tingkat desa wewenang pengurusan tanah itu menjadi hak para kepala desa. Mereka juga bertugas sebagai pengumpul pajak dan mengorganisasi tenaga kerja paksa. Para petani sebagai penduduk desa memiliki status sebagai penggarap tanah pertanian ini di desanya. Berdasarkan pertimbangan ini, maka pemerintah kolonial Belanda juga merasa memiliki hak yang luas untuk menguasai tanah-tanah pertanian yang digarap oleh penduduk pedesaan.

Pada pertengahan abad 19 sampai awal abad 20 mulai dicoba penanaman tebu pada lahan sawah dengan luas sekitar seluar 64 bau, dari luas areal 100 bau yang tersedia. Perkembangan areal perkebunan tebu pada masa berikutnya terjadi begitu lambat. Dalam tahun 1840, lahan yang digunakan untuk perkebunan tebu hanya dapat diperluas menjadi sekitar 400 bau (Arsip Banjoemas 20.1).

Tentang perjanjian penggunaan tanah untuk keperluan perkebunan tebu itu dilaksanakan oleh wakil dari pihak perkebunan yang dipimpin oleh G.E. Dorrepaal dan J.W. van Barneveld dengan para kepala desa, yang berlangsung secara tertutup. Pada saat itu ditetapkan penggunaan tanah seluas 500 bau. Dalam kesempatan itu pemerintah juga menyewa tegalan yang direncanakan untuk perkebunan kelapa dan lada di distrik Sokaraja seluas 100 bau (Arsip Banjoemas, 104/56).

Pabrik gula pertama yang didirikan di Karesidenan Banyumas adalah pabrik Kalibagor dalam tahun 1838. Areal perkebunan tebu untuk pabrik itu berada di dua kabupaten, yaitu Purbalingga dan Banyumas. Antara tahun 1840-1855 luas areal yang disewa relatif tetap yaitu sekitar 400 bau, dengan 111 bau sampai 280 bau sebagai lahan produktif (Arsip Banjoemas 105/56).

Prosedur pengambilalihan tanah yang dipergunakan untuk perkebunan tebu bagi pabrik gula Kalibagor secara resmi diatur dengan Surat Keputusan tanggal 29 November 1855 No. 11. Dalam surat keputusan itu ditetapkan, bahwa kontrak tanah sawah untuk perkebunan tebu di Karesidenan Banyumas berlangsung untuk jangka waktu selama tiga tahun. Adapun luas tanah yang dapat digunakan masih berkisar 400 bau. Proses itu dilakukan secara tertutup antara pihak perkebunan dengan para kepala desa (Arsip Banjoemas, 105/56). Hal ini membuktikan bahwa tanah pertanian merupakan tanah desa dengan hak pemilikan komunal.

Kemudian pada tahun 1857, berdasarkan Surat Keputusan tanggal 11 April No. 54, jangka waktu penggunaan tanah yang semula berlaku untuk tiga tahun dirubah untuk jangka waktu 20 tahun. Sampai saat itu pihak perkebunan merasakan, bahwa pelaksanaan perkebunan tebu di Karesidenan Banyumas masih menjumpai banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Kesulitan yang paling utama adalah masalah transportasi (Arsip Banjoemas 107/56).

Mengingat tingkat kesulitan yang tinggi, pemerintah membuat peraturan tentang target produksi gula di Banyumas yang ringan. Pihak pemerintah hanya menetapkan produksi gula di daerah ini minimal mencapai 17 pikul per bau. Walaupun ketetapan ini merupakan persyaratan yang cukup ringan, namun usaha untuk memenuhi target

produksi gula di daerah itu bukan merupakan persoalan yang mudah. Oleh sebab itu, untuk mencapai ketetapan yang telah digariskan, pemerintah masih memberikan kelonggaran kepada pengelola perkebunan untuk mencapai produksi dengan cara yang dipandang lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada (Arsip Banjoemas 109/56).

Pada tahun 1870, *Agrarische Wet* dikeluarkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) No. 110 tahun 1870. Perkembangan baru di bidang agrarian 1870 itu besar pengaruhnya terhadap pengelolaan usaha perkebunan. Sesuai dengan perkembangan yang sedang terjadi, perkebunan tebu di Banyumas secara berangsur-angsur diserahkan penanganannya kepada para pemilik modal swasta. Pedoman pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Residen Banyumas tahun 1873 yang berkaitan dengan kontrak tanah perkebunan tebu (Arsip Banjoemas 122/56).

Prosedur kontrak tanah tidak dilakukan secara langsung dengan para petani, tetapi diwakili oleh kepala desa dengan pihak perkebunan. Sistem kontrak yang selalu melibatkan kepala desa menunjukkan, bahwa tanah pertanian masih dipandang sebagai milik komunal bagi masyarakat desa yang bersangkutan. Dalam upacara kontrak tanah itu, kehadiran penduduk hanya diperlukan untuk menyaksikan dan memberikan cap jari mereka. Dengan cara ini penduduk tidak dapat menikmati uang sewa, karena uang itu baru dapat diserahkan kepada penduduk setelah dipotong pajak tanah dan berbagai pungutan lain (De Indische Gids, 1879: 746).

Pada prinsipnya, peraturan itu menyatakan bahwa para pemilik modal swasta diperkenankan membuka usaha perkebunan di Banyumas. Khusus untuk penanaman modal di sektor perkebunan tebu dan pabrik gula serta untuk mengatasi masalah pengangkutannya, dapat bekerja sama dengan para penguasa pribumi. Dengan adanya peraturan baru ini, Banyumas dapat memancing para pengusaha swasta yang berminat menanamkan modalnya, terutama pada perkebunan tebu. Dengan demikian, para pengusaha swasta dapat melakukan kontrak tanah dengan para kepala desa yang berlangsung cukup sederhana. Model perjanjian seperti itu dianggap sah bagi hukum kolonial (Arsip Banjoemas 108).

Perubahan yang terjadi itu sangat berpengaruh terhadap perluasan areal perkebunan tebu di Banyumas. Akan tetapi, pengaruh itu baru tampak jelas pada sekitar tahun 1890. Pada masa itu perluasan areal perkebunan tebu mencapai dua kali lipat dari masa-masa sebelumnya. Peningkatan ini terjadi terutama disebabkan bertambahnya pabrik penggilingan gula baru di Klampok (Banyumas). Dari lahan perkebunan seluas itu, sekitar 500 bau milik pabrik gula Kalibagor, sedangkan pabrik gula Klampok dengan luas areal perkebunan 600 bau (A. Booth, 1988: 207).

Penggunaan tanah untuk keperluan perkebunan tebu di daerah Karesidenan Banyumas oleh para pengusaha swasta pada umumnya dalam bentuk kontrak. Sistem kontrak itu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam kaitan ini undang-undang terpenting yang mengatur tentang sewa tanah adalah *grondhuur ordonantie*. Pengaturan ini diberlakukan untuk seluruh Jawa dan Madura, kecuali daerah *Vorstenlanden* (Mubyarto, 1992: 38).

Dalam sistem sewa tanah yang baru itu, dikenal sistem sewa yang bersifat jangka panjang (*langjaarige verhuur*). Untuk menjaga kemungkinan buruk antara petani di satu sisi dan para penguasa di pihak lain, di Karesidenan Banyumas dikeluarkan surat keputusan tentang harga sewa tanah yang digunakan untuk perkebunan tebu. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Residen Banyumas tanggal 11 Juni 1878 No. 16 itu, mengatur tentang harga sewa tanah. Di Karesidenan Banyumas ditetapkan bahwa harga sewa tanah dalam setiap tahun adalah f.50 per bau. Dalam perkembangan selanjutnya harga sewa tanah untuk perkebunan itu ternyata mengalami kenaikan menjadi f.67 pada tahun 1890 (Arsip Banjoemas 108).

Masuknya modal swasta yang ditanam pada sektor perkebunan tebu di Karesidenan Banyumas memang terlihat sangat mencolok sejak tahun 1895. Perkembangan itu dapat dibuktikan dari penambahan lahan yang cukup drastis, terutama perluasan areal perkebunan tebu yang dikelola oleh pengusaha swasta. Pada masa itu telah berdiri empat buah perusahaan swasta, di samping satu perkebunan milik pemerintah yang sejak tahun 1838 telah beroperasi.

Dalam tahun 1895 di Karesidenan Banyumas telah berdiri lima buah perusahaan perkebunan tebu, dengan luas areal yang disewa 2.934 bau. Dari lahan seluas itu 2.833 bau merupakan lahan produktif. Dalam tahun 1895 perkebunan tebu dan pabrik gula milik pemerintah di Kalibagor juga diserahkan pengelolaannya kepada pengusaha swasta. Secara operasional perusahaan itu ditangani oleh *Maatschappij tot Exploitatie der Suikerfabriek Kalibagor* (Tanto Sukardi, 2014: 71).

Para pengusaha yang mengelola perkebunan tebu dan pabrik gula di Karesidenan Banyumas dalam tahun 1895 adalah *Maatschappij tot Exploitatie der Suikerfabriek Kalibagor*, Pabrik Kalimanah oleh *Naamlooze Vennootschap Suikerfabriek Kaliklawing*. Pengelola pabrik Klampok adalah *Naamlooze Vennootschap Kultuur Maatschappij Klampok* dan pabrik Purwokerto oleh *Naamlooze Vennootschap Suikerfabriek Poerwokerto*.

Keadaan tersebut mengalami pergeseran dalam tahun 1900. Areal perkebunan tebu di Kabupaten Banyumas telah mencapai 2.525 bau. Pada masa itu, perkebunan tebu beroperasi di tiga kabupaten, yaitu Purbalingga, Purwokerto dan Banyumas (Memori Serah Jabatan, 1977: 147). Secara keseluruhan areal perkebunan tebu yang berhasil disewa seluas 4.725 bau, dengan areal produktif sekitar 3.077 bau (Tanto Sukardi, 2014: 72).

Sampai tahun 1900, perkembangan luas areal perkebunan tebu ternyata lebih menunjukkan peningkatan perluasan lahan perkebunan yang sangat tajam. Untuk setiap daerah, peningkatan rata-rata luas areal perkebunan mencapai lebih dari dua kali lipat, bahkan dalam perkembangan selama lima tahun, perkebunan tebu di Banyumas menunjukkan peningkatan kehidupan perekonomian yang cukup berarti.

Dalam tahun 1910 luas areal perkebunan tebu terus menunjukkan grafik peningkatan yang cukup tajam. Peningkatan luas areal perkebunan disebabkan oleh masuknya modal swasta, terutama dalam sektor perkebunan tebu dan pabrik gula. Pada tahun tersebut di atas konsentrasi lahan perkebunan tebu ditinjau dari prosentase lahan pertanian yang disewa berada di Kabupaten Banyumas mencapai sekitar (8,3%), kemudian Purbalingga mencapai sekitar (3,1%) dan

Kabupaten Purwokerto mencapai sekitar (2,2%) (Tanto Sukardi, 2014: 72-73).

Hal ini berarti daerah Banyumas yang luas tanah pertaniannya tidak seluas Purbalingga mendapat beban penanaman yang lebih besar. Indikasi semacam ini menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Banyumas yang merupakan daerah inti di karesidenan itu benar-benar sangat sesuai bagi pengembangan perkebunan tebu untuk kepentingan kolonial, terutama jika dilihat dari kondisi tanah dan sektor tenaga kerja.

Dalam penggunaan lahan untuk penanaman tebu, digunakan sistem pergiliran yang ketat. Tanah perkebunan itu dibagi menjadi bagian-bagian, sehingga disebut dengan *glebagan*. Pada umumnya dibagi menjadi tiga bagian. Dalam setiap tahun, satu bagian ditanami tebu dan dua bagian lainnya tetap digarap oleh petani untuk ditanami tanaman pangan baik tanaman padi maupun palawija.

Kenyataan di lapangan menunjukkan perbedaan yang sangat kontras. Dalam praktiknya mengingat umur tebu lebih dari satu tahun (15-19 bulan), maka selama masa peralihan jumlah areal yang ditanami tebu mencapai dua bagian. Dengan demikian, maka lahan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan hanya tersisa satu bagian saja (Akira Nagazumi, 1986: 72).

Bergilirnya penanaman tebu pada tanah yang disewa itu dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan para pemilik modal. Tanah yang disewa dibagi penggarapannya berdasarkan waktu, sehingga menjamin kontinuitas produksi. *Glebagan* juga dapat menjamin tingkat kesuburan tanah, sehingga produksi perkebunan tetap maksimal. Kemudian ditinjau dari hak penguasaan tanah, sistem itu dimaksudkan untuk mencegah agar penguasa perkebunan tidak menguasai tanah desa untuk selama-lamanya. Dengan cara itu, gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan perkebunan tebu tidak merusak organisasi komunal desa yang hidup secara tradisional. Oleh sebab itu, maka prosedur kontrak tanah untuk perkebunan biasanya dilakukan dengan para kepala desa. Para petani tidak dapat secara langsung mengadakan hubungan kontrak, karena masih tetap ada anggapan bahwa tanah sebagai milik desa. Dalam proses itu, rakyat juga dipandang belum mampu untuk

melakukan hubungan kontrak tanah secara langsung dengan para pengusaha Eropa (Geertz, 1974: 96).

Tanah pertanian yang dipergunakan untuk perkebunan di Karesidenan Banyumas dikenal dengan sebutan sawah *doleg*. Istilah itu diduga merupakan ejaan bahasa Belanda, yaitu *daggled*. Istilah itu berkait erat dengan kata *dagloner* yang dapat diartikan melakukan pekerjaan sebagai buruh atau pekerja harian. Berdasarkan pendapat itu maka dapat dinyatakan, bahwa tanah *doleg* mempunyai arti sebagai lahan yang biasa ditanami tebu yang dikerjakan oleh penduduk desa sebagai pekerja upahan (Pigeaud, 1948: 103).

Selanjutnya perkembangan sesudah tahun 1910 menunjukkan perluasan lahan perkebunan tebu tampak lebih pesat lagi. Dalam tahun 1920 para pengusaha swasta telah menguasai sekitar 10.265 bau lahan pertanian yang disewa untuk keperluan perkebunan tebu. Dari lahan seluas itu sekitar 6.700 bau merupakan lahan produktif. Perlu dicatat pula, bahwa pada masa itu pabrik gula Bojong menguasai lahan perkebunan seluas 2.600 bau, pabrik gula Purwokerto dengan luas areal sekitar 1.800 bau, sedangkan Klampok dengan luas areal perkebunan 3.425 bau. Pabrik gula yang terdapat di Kalibagor, menguasai areal perkebunan seluas 2.240 bau dan pabrik Kalirejo memiliki areal seluas 2.000 bau (Memori Serah Jabatan, 1977: 155). Hal ini terbukti bahwa perekonomian di Banyumas pada awal abad 20 semakin meningkat bahkan pengembangan kebudayaan semakin nampak terutama perubahan gaya hidup serta berkembangnya pelayanan publik. (Memori Serah Jabatan, 1977: 150-155).

C. Pengembangan Jaringan Transportasi

Pada akhir abad 19 transportasi sedikit demi sedikit dibenahi, keterlibatan pihak swasta dalam perekonomian pun semakin meningkat. Tahun 1889 berdiri pabrik gula di Klampok yang dipimpin oleh administrator J.T. de Ruijter. Tahun 1891 berdiri dua pabrik gula swasta masing-masing di Bojong yang dipimpin oleh administrator H.C.C Fraissinet dan di Kalimanah yang dipimpin oleh administrator Ch. Conradi. Dua tahun kemudian tepatnya tahun 1893 berdiri pabrik

gula di Purwokerto yang dipimpin oleh administratur M.C. Brandes. Disusul kemudian berdiri pabrik gula di Majenang (Purnawan Basundoro, 1999: 167).

Berdirinya pabrik gula-pabrik gula dan semakin luasnya perkebunan tebu memberikan timbal balik terhadap perkembangan transportasi, baik bagi peningkatan jalan-jalan yang ada serta pada jenis angkutan yang ada. Berdirinya pabrik-pabrik gula tersebut telah mendorong semakin baiknya jaringan-jaringan jalan yang telah ada sebelumnya.

Dalam periode selanjutnya pengembangan jaringan transportasi membawa dampak yang tidak sedikit terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Hal ini dijelaskan dalam laporan penguasa kolonial setempat setempat yang mengaitkan proyek-proyek peningkatan jalan dengan keberadaan pasar yang ada di sepanjang lintasan jalan.

Selanjutnya memasuki abad ke-20 hampir seluruh ruas jalan yang ada di Banyumas terutama yang menghubungkan kota-kota kabupaten dengan ibukota distrik dan *onderdistrik* sudah dalam keadaan baik. Jalan-jalan lain yang cukup penting dan kemudian ditingkatkan adalah jalan yang menuju sumber aktifitas perekonomian, baik yang menghubungkan pasar-pasar desa maupun ke wilayah-wilayah produksi komoditi perdagangan.

Di Banyumas sebelah selatan dan barat perbaikan jalan juga terus dilakukan. Sebagian jalan dari Wanareja melalui Desa Madura menuju perbatasan Cirebon, yaitu sejak Ciawitali sampai Sungai Cijolang, juga dirasakan. Ruas jalan ini apabila musim hujan datang selalu banjir dari Sungai Citandui dan Sungai Cijolang. Sehingga di samping diperkeras dengan batu kerikil juga ditinggikan dengan cara *diluruk*. Biaya yang dikeluarkan adalah f.6000. Ruas jalan ini akhirnya menyambung ke Karesidenan Cirebon (Memorie Resident Banyumas, 1922).

Perbaikan serta pengembangan jalur-jalur jalan di samping memperlancar mobilitas penduduk juga memperlancar arus barang. Perluasan perkebunan tebu pun menjadi lebih mudah. Penduduk pun menjadi tertarik untuk menggarap tanah-tanah kosong yang sebelumnya belum

digarap. Dampak lain perbaikan jalan adalah arus migrasi jauh lebih besar. Industri dan perkebunan swasta menjadi berkembang, pajak tanah dan pajak usaha meningkat. Arus perdagangan yang dilakukan oleh penduduk setempat pun menjadi lebih lancar (Memorie Resident Banjoemas, 1922: 21-25).

Oleh karena itu sistem transportasi yang bersifat massal dirasakan oleh para pengusaha swasta sebagai hasil kebutuhan yang sangat mendesak. Pengangkutan hasil-hasil perkebunan serta pengangkutan barang-barang impor dari pelabuhan ke daerah pedalaman sudah tidak dapat dipenuhi oleh transportasi lewat jalan darat maupun lewat sungai. Kemudian muncul gagasan untuk mengoperasikan kereta api untuk mengangkut barang-barang dari Hindia Belanda dengan lebih cepat terutama hasil-hasil perkebunan.

Dalam konteks wilayah Banyumas jaringan kereta api terpenting adalah jaringan yang dibuat oleh SDS (*Serajoedal Stoomtram Maattsschppij*), sebuah perusahaan trem swasta yang diberi konsesi oleh pemerintah selama 99 tahun. Trem merupakan salah satu jenis kereta api yang digunakan untuk jalur dekat. Walaupun pembangunan transportasi trem swasta di Banyumas ini merupakan salah satu upaya bangsa Eropa untuk membuat jalur distribusi barang-barang mereka, pembangunan jaringan trem tersebut tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan pabrik gula.

Bagi perkebunan tebu maupun pabrik gula keberadaan jaringan trem yang menembus pedalaman Banyumas dirasa sangat penting dalam rangka pengembangan industri perkebunan serta untuk pengangkutan hasil pabrik gula. Kenyataan inilah yang dalam masa-masa selanjutnya menjadi salah satu daya tarik pihak swasta untuk menanamkan modal di wilayah Banyumas dalam sektor transportasi modern. Sehingga beberapa pihak swasta berebut untuk menanamkan modalnya di Banyumas dalam sektor transportasi.

Sebenarnya yang tertarik untuk mengeksploitasi sistem transportasi untuk wilayah ini tidak hanya pihak swasta, karena pihak pemerintah juga tertarik untuk menanamkan modalnya bagi pemasangan jaringan kereta api di sini. Hal yang selalu terjadi sejak kereta api menjadi jalan keluar yang dianggap terbaik untuk mengatasi persoalan transportasi di

Hindia Belanda. Keinginan pihak pemerintah untuk ikut menanamkan modalnya dalam perkeretaapian di Banyumas dapat diketahui dari usulan-usulan mereka sebelum pihak SDS (*Serajoedal Stoomtram Maattsschppij*) memenangkan konsesi untuk wilayah ini. Hal ini telah terjadi sebelum pabrik-pabrik gula swasta berdiri di Banyumas. Bagi pemerintah, membangun jaringan kereta api di sepanjang wilayah Banyumas tidak saja akan mendatangkan keuntungan dari pengoperasian kereta api tetapi juga akan mendapatkan keuntungan di luar itu terutama dikaitkan dengan dibukanya Pelabuhan Cilacap sebagai pelabuhan niaga (Memorie Resident Banyumas, 1925).

Pembangunan perkeretaapian baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta di Hindia Belanda telah mendorong kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang. Kemajuan ini terutama bagi pertumbuhan perekonomian. Dengan dibangunnya jaringan kereta api kemudahan dan kemurahan juga didapatkan oleh penduduk dalam bepergian. Sebagai contoh, sebelum tahun 1900 biaya angkutan dirasakan oleh penduduk pribumi sangat mahal. Ketika itu masyarakat yang bepergian ke arah timur-barat Pulau Jawa atau sebaliknya, biasanya menumpang kapal. Akan tetapi sejak kereta api mulai dioperasikan untuk umum, alat angkut ini menjadi pilihan utama penduduk yang akan bepergian.

Di Banyumas dalam perkembangannya muncul angkutan komersial. Hal ini disebabkan karena mulai beroperasinya kereta api dan trem untuk masyarakat umum. Dengan beroperasinya kereta api dan trem, fungsi alat angkut tradisional untuk jarak jauh memang mulai tergeser. Perahu-perahu yang semula menyusuri Sungai Serayu dengan muatan hasil bumi atau gerobak yang mengangkut kopi dari Banjarnegara ke Banyumas mulai surut peranannya tergantikan oleh trem.

Seiring dengan semakin ramainya lalu lintas umum maka di daerah-daerah yang padat dengan arus lalu lintas jalan-jalannya pun sedikit demi sedikit ditingkatkan lagi. Kondisi yang susul menyusul inilah mendorong semakin membaiknya pola pengangkutan di wilayah Karesidenan Banyumas. Kondisi jalan yang semakin baik pula yang mengakibatkan setiap jenis kendaraan yang dibuat di Eropa diperkenalkan di daerah ini.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul kendaraan bermotor. Kendaraan ini rata-rata dari jenis autobus. Munculnya kendaraan bermotor menjadi kendaraan umum dilatarbelakangi oleh beberapa keadaan. Pertama, pada pertengahan tahun 1920-an beberapa jalan utama di Karesidenan Banyumas sudah menjadi jalan beraspal walaupun masih sederhana. Kedua, walaupun jalur kereta api sudah menghubungkan kota-kota di Karesidenan Banyumas tetapi lintasan jalan tersebut tidak seluruhnya tepat melewati pemukiman penduduk sehingga penduduk seringkali kesulitan untuk bepergian dengan kereta api. Ketiga, teknologi otomotif yang semakin maju menjadikan kendaraan bermotor jenis ini sebagai kendaraan yang praktis serta bisa melewati medan yang sulit yang tidak bisa dijangkau oleh kereta api, trem atau dokar.

Pada tahun 1922 autobis mulai beroperasi untuk umum di Karesidenan Banyumas. Pada awalnya memang tidak begitu diminati, sehingga untuk beberapa bulan dihentikan operasinya. Tetapi ketika ruas-ruas jalan mulai diperbaiki jenis angkutan ini justru menjadi pilihan penduduk (Wirjaatmadja, 1932: 59).

Perusahaan angkutan yang pertama kali berdiri di Banyumas adalah milik seorang Cina bernama H.B. Njoo yang berkedudukan di Purwokerto. Pada tahun 1920-an kota Purwokerto sudah menjadi kota yang ramai, jauh lebih ramai dari kota Banyumas. Pada awal beroperasi H.B. Njoo hanya memiliki lima buah bus yang melayani trayek Purwokerto – Patikraja – Cilacap. Purwokerto – Ajibarang – Wangon, serta Purwokerto – Purbalingga – Klampok. Ketika peminat jenis kendaraan bermotor ini semakin banyak, Njoo menambah armadanya, sehingga pada tahun 1927 ia mempunyai 12 bis (Purnawan Basundoro, 1999: 211).

Dengan semakin bertambahnya angkutan umum, trayek yang dilayani pun diperluas sampai ke Banjarnegara. Dari hari ke hari minat penduduk yang ingin menggunakan bis memang semakin tinggi. Hal ini disebabkan keunggulan-keunggulan jenis kendaraan ini. Dari segi kecepatan bis lebih cepat dibandingkan kereta api atau trem, karena kereta api dan trem masih menggunakan tenaga uap dengan bahan bakar kayu, sedangkan bis sudah menggunakan mesin dengan bahan

bakar bensin. Bisa juga lebih fleksibel dalam menyusuri jalur. Asal jalur tersebut memenuhi syarat maka bus dengan mudah bisa melewatinya. Di samping itu bisa dapat berhenti di manapun sesuai keinginan penumpang. Berbeda dengan kereta api dan trem yang hanya berhenti di halte atau stasiun.

Munculnya pemukiman-pemukiman baru di Banyumas juga mendorong semakin bertambah panjangnya jalur jalan raya. Di sini terjadi proses yang susul-menyusul antara mekarnya wilayah-wilayah pemukiman dengan panjangnya jalur jalan raya. Kenyataan ini bisa dilihat di seluruh daerah Banyumas pada akhir tahun 1940, ketika antara jalur jalan darat dan jalur jalan kereta api telah membentuk sebuah jaringan yang sangat rumit satu dengan yang lainnya. Di sela-sela jaringan jalan tersebut tumbuh pemukiman-pemukiman penduduk yang semakin padat. Kemudahan-kemudahan untuk bepergian menjadikan wilayah pemukiman penduduk semakin melebar ke daerah-daerah yang semula dikategorikan sebagai daerah pinggiran.

Stasiun atau terminal juga menjadi unsur yang sangat penting bagi tumbuh dan berkembangnya pemukiman penduduk. Dengan adanya stasiun itu maka muncullah aktifitas-aktifitas perekonomian seperti toko-toko kelontong, rumah makan, penginapan, penitipan sepeda, perubahan gaya hidup dan pertunjukan kesenian. Kondisi seperti ini diperlihatkan secara jelas oleh Bupati Banyumas dan pada waktu itu gaji bupati mencapai 1350 gulden (*Memorie Serah Jabatan*, 1922: 10-20, lihat juga SM. Gandasubrata, 1952: 17).

D. Pelayanan Publik

Pada pertengahan abad 20 berkembang pesat di bidang pelayanan publik. Hal ini terlihat dengan adanya perkembangan hotel, bank dan pasar, serta pabrik. Dengan berkembangnya pelayanan publik ini ternyata sangat mendukung untuk meningkatkan perekonomian di wilayah banyumas.

1. Hotel dan Gedung Pertunjukan

Pada awal abad XX di wilayah Banyumas bermunculan tempat hiburan. Hiburan yang ada antara lain gedung pertunjukan, dan *Societeit Slamet*. Lain daripada nama-nama *societeit* yang biasanya bernama *harmonie*, *concorde* maupun *der vereeniging*. Gedung *Societeit Slamet* ini dibangun oleh orang-orang Belanda, antara lain pemilik-pemilik perkebunan, administratur-administratur pabrik dan manager-manager perkeretaapian dan sebagainya. Pelindung *societeit* ialah Residen Banyumas, sedangkan anggotanya hanya terbatas kalangan Belanda (Memorie van Overgave Resident Banjoemas, 1928).

Pada masa itu nampak terasa ada diskriminasi sosial ekonomi antara ketiga lapisan penduduk. Lapisan pertama adalah orang Belanda, lapisan kedua adalah para pedagang yang terdiri dari orang Tionghoa dan lapisan ketiga adalah orang bumiputera. Orang Belanda pada masa itu mempunyai gaya hidup sendiri dan hidup secara eksklusif. Mereka mempunyai tempat pertemuan dan tempat rekreasi sendiri. Mereka membangun suatu *societeit* seperti tersebut di atas beserta gedung yang luas. Bahkan pada masa itu ada tulisan yang menyakitkan penduduk pribumi yang berjudul “*Verboden voor inlanders en honden*“ yang berarti tempat tersebut dilarang untuk orang bumiputera dan anjing. Gedung *Societeit Slamet* ini semakin menampakkan diri secara eksklusif beserta gaya hidup orang-orang Belanda di tempat tersebut.

Untuk itulah masyarakat elit pribumi di wilayah Banyumas mendirikan *societeit* Panti Soemitro di dekat alun-alun. Bertindak sebagai pelindung ialah Bupati Banyumas. Di Panti Soemitro juga disediakan bermacam-macam sarana rekreasi seperti ruang permainan bilyard, pingpong dan sarana pertunjukan kesenian Jawa seperti gamelan, ruang pertunjukan, pakaian wayang dan perlengkapan lain (Memorie van Overgave Resident Banjoemas, 1928). Beberapa kegiatan yang pernah dilakukan di *societeit* ini antara lain kursus umum Ahmadiyah yang dihadiri oleh sekitar 230 orang laki-laki dan perempuan. Kursus ini menampilkan Mirza Wali Ahmad Baiq, mubaligh Ahmadiyah asal Lahore yang juga berperan besar dalam berdirinya Gerakan Ahmadiyah Lahore di Indonesia (Oetosan Indonesia, 3 Mei 1933).

Ada beberapa hotel yang terdapat di wilayah Banyumas yaitu Hotel Van de Beek, Tram Hotel, Hotel Semarang, Hotel Besar, Hotel Station. Hotel Van de Beek, Tram Hotel, Hotel Besar, Villa Krandji yang dimiliki oleh P.J Tadema, semua terletak di *Groote Postweg*. Hotel Semarang berdiri di depan Pasar Wage begitu pula Restoran Bandoeng yang terletak di dekat Pasar Wage. Hotel Station terdapat di *Stationweg*, Bantarsoka, dekat dengan stasiun kereta api serta Tram Hotel yang berdiri tahun 1915. Selain itu juga dibangun tempat rekreasi bagi para pejabat belanda di wilayah lereng Gunung Slamet yang dikenal dengan nama Baturaden (Memorie Resident Banjoemas, 1928).

Sejak tahun 1928, dataran tinggi Baturaden yang terletak di lereng Gunung Slamet sudah menjadi sarana rekreasi bagi para pejabat Belanda maupun pejabat pribumi. Tempat peristirahatan ini berjarak 14 km arah utara pusat Kota Purwokerto. Biasanya mereka memiliki villa di Baturaden sebagai tempat peristirahatan pada akhir minggu. Penginapan lain yang ada di Baturaden salah satunya ialah Hotel Batoeraden. Fasilitas yang tersedia antara lain pemandian air hangat dan lapangan tenis (Memorie van Overgave Resident Banjoemas, 1928).

2. Bank dan Pasar

Pada pertengahan abad 19 di wilayah Banyumas berkembang suatu lembaga yang berfungsi memberi bantuan kepada para pegawai pemerintah dan rakyat kecil. Lembaga tersebut bertujuan agar terhindar dari para lintah darat yang memberikan bunga sangat tinggi pada peminjam uangnya. Badan itu bernama “Bank Penolong dan Tabungan” bagi pejabat-pejabat pribumi di Purwokerto atau dikenal dengan sebutan “Bank Priyayi”.

Bank pribumi pertama ini adalah cikal bakal Bank Rakyat Indonesia yang berdiri atas prakarsa Patih Purwokerto; Wiryaatmaja. Selain itu, untuk meningkatkan perekonomian dibangunlah pasar dan pertokoan yang lokasinya ada di wilayah kota Purwokerto di Bantarsoka, Aji Barang dan Sokaraja. Juga muncul pertokoan yang sebagian besar didominasi orang-orang Cina. Salah satu yang terbesar adalah Toko

(sekaligus percetakan) “Providence” milik Tjoa Som Wan. Toko ini menyediakan bermacam-macam kebutuhan, antara lain alat-alat olahraga, alat-alat perkantoran dan sekolah serta arloji. Pertokoan banyak terdapat di Pasar Wage, Pasar Manis serta *Groote Postweg*. Di Pasar Wage antara lain terdapat Toko Nam, Toko Siem, Toko Adil, sedangkan di sekitar Pasar Manis berdiri antara lain Toko Tann, Toko Banjoemas, Toko Baroe, serta Toko Tokiwa. (Prima Nurahmi Mulyasari, 2014: 610).

3. Pabrik

Pada awal abad 20, sektor industri belum banyak berkembang di Kota Purwokerto yang hanya memiliki beberapa pabrik pada tahun 1930-an. Dari jumlah yang sedikit tersebut antara lain ialah pabrik gula, pabrik es, *Atlas & Aquasana Mineraalwaterfabrik*, serta pabrik minyak kelapa milik Rouwenhorst Mulder.

Untuk mendorong perkembangan industri pemerintah mendirikan berbagai *Consultatie-bureau* yang menyelenggarakan berbagai pelatihan dan praktik pembuatan macam-macam industri rumah tangga seperti sendok, garpu, kertas, anyaman bambu, sabun, kecap, payung, kain tenunan. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para penduduk dapat secara mandiri mendirikan industri rumah tangga dengan modal kecil. Sebuah perkumpulan pedagang ikan laut berdiri pada sekitar tahun 1930-an. Maksud didirikannya ialah supaya lelang ikan laut segar dapat dilakukan di wilayah Banyumas (Prima Nurahmi Mulyasari, 2014: 611).

Karakteristik kota pedalaman ditandai dengan perekonomian yang lebih banyak bertumpu pada sektor agraris. Untuk mendukung perkembangan sektor agraris di wilayah Banyumas, *landbouwconsulent* dan *zaadhoeve* didirikan untuk memberikan layanan di bidang pertanian. *Zaadhoeve* yang berdiri di wilayah persawahan Berkoh merupakan sebuah program intensifikasi pertanian di mana para petani diberi pelatihan tentang *groenbemesting*, *terrasering*, dan lain-lain. Di samping itu, jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk pribumi antara lain menjadi buruh di pabrik-pabrik dan perkebunan di sekitar wilayah Banyumas. Selain memiliki wilayah yang luas untuk menanam padi

dan tebu, wilayah sekitar Banyumas juga merupakan daerah perkebunan penghasil indigo, kopi, kelapa, coklat, dan tembakau (SM. Gandasubrata, 1952: 15-16).

E. Malaise di Banyumas

Memasuki tahun 1930-an dunia mengalami krisis ekonomi. Kondisi di tingkat global berdampak juga di Banyumas. Dampak terhebat, Banyumas mulai tahun 1933 berada dalam kesukaran-kesukaran yang menyedihkan (Purnawan Basundoro, 1999:251). Penutupan pabrik-pabrik gula di Kalibagor, Klampok, Sumpiuh, Purwokerto, dan Bodjong membawa dampak yang besar bagi masyarakat Banyumas. Masing-masing pabrik gula tersebut setiap tahunnya rata-rata mengeluarkan uang satu juta rupiah untuk sewa tanah, nafkah pegawai dan kaum buruh. Namun, dengan penutupan pabrik gula tersebut, beribu-ribu orang kehilangan mata pencaharian. Para petani harus mengembalikan uang *persekot* dari kontrak sewa tanahnya yang telah diterimanya. Bersamaan itu, tanaman padi banyak yang tidak berhasil panen akibat musim kemarau yang panjang dan terserang hama tikus (SM. Gandasubrata, 1952:3).

Kondisi di Banyumas menjadikan kemiskinan rakyat kian hari kian meningkat. Pengemis laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, tampak berkeliaran di kota-kota, terutama pada hari Minggu. Pakaianya koyak, badannya kurus kering, kakinya bengkak, tanda terjangkiti penyakit *honger oedeem* (SM. Gandasubrata, 1952:7).

Sumber pencaharian di pabrik-pabrik, kebun-kebun, dan *onderne-ming-onderneming* serta perburuhan telah hilang lenyap. Rumah gadai penuh sesak dengan pakaian, perhiasan, perkakas rumah tangga, perkakas dapur, dan alat-alat pertanian. Barang-barang yang digadaikan tidak dapat ditebus, sehingga terpaksa dijual di hadapan umum dengan harga yang sangat rendah.

Rakyat Banyumas tidak hanya menderita karena kekurangan uang, namun juga kekurangan makanan. Di desa-desa sebagian besar rakyat kekurangan makan, bahkan acapkali tidak ada makanan sama sekali. Meskipun demikian, jika mereka ditanya apakah sudah makan, maka

mereka selalu menjawab; “Sudah”. Setelah ditelusuri ternyata mereka sejak dua hari, tiga hari, bahkan lebih, tidak makan sesuap nasi, hanya makan daun-daunan, ares pohon pisang, gaber, atau gelang. Oleh karena sejak lama rakyat menderita kurang makan, badannya sangat lemah sehingga mudah diserang penyakit. Penyakit yang diderita terutama penyakit kulit seperti *gudig*, *koreng*, kaki bengkak, *patek* dan *borok*. Selain itu, penyakit influenza dan malaria juga meminta banyak korban (SM. Gandasubrata, 1952:7-8).

Rakyat yang tidak mampu membeli makanan sehat seringkali terpaksa makan tempe bongkrek, yaitu makanan yang terbuat dari kedelai dan ampas kelapa. Tempe bongkrek merupakan makanan rakyat yang disukai banyak orang akan tetapi kadang-kadang beracun. Beberapa keluarga meninggal dunia, menjadi korban “*bongkrek-vergiftiging*”, sehingga menarik perhatian ahli-ahli makanan dan para dokter untuk menyelidikinya.

Dr. R.M. Wirasmo Partaningrat, *residentie-arts* di Banyumas telah mencurahkan tenaganya dari tahun 1933-1934 guna menyelidiki dan mempelajari penyakit akibat tempe bongkrek di desa-desa. Beliau telah mengumpulkan bahan-bahan yang menimbulkan racun bongkrek dan mengirimkan laporan-laporan lengkap dengan bukti-buktinya ke laboratorium di Jakarta. Atas laporan yang akurat maka *Geneeskundig Laboratorium* di Jakarta dapat menentukan dengan pasti mengapa dan bagaimana timbulnya racun bongkrek tersebut. Selanjutnya bahaya *bongkrek-vergiftiging* dapat diperkecil dan dilokalisir.

Kemiskinan di desa-desa terus memuncak, ditandai dengan barang-barang rumah tangga bahkan hingga atap rumah (*zink*) habis dijual, pinjaman pada bank rakyat kian hari kian bertambah banyak dan tidak terbayar lagi, pajak bumi bertahun-tahun menunggak, serta mundurnya hasil pertanian. Beberapa usaha yang dilakukan Bupati Raden Sudjiman Mertadiredja Gandasubrata untuk mengatasi kemiskinan, diceritakan dalam memoarnya (1952) antara lain:

1. Kolonisasi; anjuran untuk pemegang sawah yang sudah tidak mempunyai harapan lagi karena uang sewa tanah sudah habis agar menyerahkan sawahnya kepada orang lain yang mampu mengerjakan sawah dengan baik, uang kerugian ditetapkan

sepentasnya. Anjuran dari Raden Sudjiman ini disambut dengan baik. Banyak orang menggunakan kesempatan untuk membereskan penghidupannya selaras dengan anjuran Bapak Bupati. Pertanian dikerjakan lebih giat, pajak bumi dibayar lancar, dan hasil produksi bertambah. Orang-orang desa yang dulu terkenal tidak suka meninggalkan desanya pada saat itu berduyun-duyun minta dipindahkan ke tanah seberang, yaitu ke tanah kolonisasi di Lampung dan Palembang (Basundoro, 1999:253). Pada tahun 1934, 1935, dan 1936 beribu-ribu *somahan* mengajukan permintaan supaya dikirim ke Tanah Seberang. Dari sekian banyak yang mendaftar, lebih dari separuh jumlah pelamar harus ditolak karena kondisi badannya lemah sebagai akibat penyakit malaria, *oedeem*, *tuberculose*, *mijnworm*, dan penyakit kulit. Mereka yang diterima dan diberangkatkan ke Tanah Seberang pada umumnya masih terikat bermacam-macam pinjaman, persoalan sulit yang harus dipecahkan oleh Pangreh Pradja sebelum mereka dikirim ke Tanah Seberang.

2. Dapur Umum; dapur umum didirikan bagi mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan. Dapur umum didirikan di distrik-distrik, onderan-nderan, maupun di desa-desa. Pertolongan tersebut diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Keperluan operasional dapur umum dipikul oleh penduduk secara gotong royong, sumbangan mengalir dalam bentuk uang, bahan makanan dan pakaian.
3. Gerakan Kaum Wanita; dipimpin oleh istri bupati yaitu Raden Ayu Siti Subindjei Gandasubrata. Kaum wanita Banyumas menyisingkan lengan bajunya demi melihat penderitaan warga masyarakat. Mereka mendirikan sebuah rumah miskin, ditempatkan di “Djajengan” di sebelah timur karesidenan, demikian pula di Pasarradja dekat kawedanan, dan di tiap-tiap ibukota distrik. Orang-orang yang dipelihara di rumah-rumah miskin tidak hanya diberi makanan dan pakaian melainkan juga dididik untuk memelihara badan dan kesehatannya. Mereka diberi pelajaran membuat keterampilan (pekerjaan

tangan), antara lain membuat bermacam-macam alat rumah tangga yang kemudian dijual. Pendapatan dari penjualan barang-barang tersebut dimasukkan ke kas perkumpulan.

Selain usaha untuk meringankan penderitaan rakyat tersebut di atas, di desa-desa diadakan pula pekerjaan-pekerjaan pertolongan (*relief-work*), seperti membuat selokan, melebarkan jalan, membuat bendungan (*dam*), mengerjakan tanah, dan membuka hutan. Usul-usul dari pemerintah daerah supaya diadakan pekerjaan besar-besaran meliputi: 1) mengadakan pengairan guna keperluan distrik Kroya, Sumpiuh, dan Cilacap, dengan mengambil air dari Sungai Serayu, 2) membuat jembatan besar di Rawalo, 3) mengadakan *electrise central* di Ketenger (SM. Gandasubrata, 1952: 10-13).

Pemerintah Belanda dalam usaha mengatasi jaman *malaise* melakukan penghematan pembiayaan pemerintahan. Jabatan wedana dan asisten wedana kota di Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara dihapuskan. Pekerjaan keduanya dilimpahgunakan ke patih. Nafkah pegawai negeri tidak dibayarkan sepenuhnya, bahkan dipotong. Gaji seorang bupati yang semula f1350 menjadi f1150 sebulan (SM. Gandasubrata, 1952:17).

Pemerintah menganjurkan untuk dilakukan pemupukan dengan tanaman hijau di lahan yang keras. Tanaman *orok-orok* ditanam di lahan sawah untuk menggemburkan tanah. Lahan miring yang mudah erosi dan tidak bisa mengikat air karena lahan yang gundul, ditanami pohon kemlandingan. Penanaman pohon kemlandingan membawa dampak pengurangan pengrusakan atau pencuruan pohon di hutan untuk kayu bakar.

Usaha tersebut berhasil, pengrusakan hutan menjadi berkurang sehingga erosi bisa dicegah. Para petani mulai merasakan hasilnya, sawah mudah mendapat pengairan dan tanahnya gembur untuk ditanami. Kondisi tersebut tentu saja membawa hasil panen yang baik. Pada tahun 1936, usaha ini semakin dipergiat, pemerintah menargetkan selesai untuk semua wilayah Banyumas lima tahun ke depan. Petani yang sudah merasakan hasil dari program pemerintah tersebut,

menyambut dengan senang hati rencana tersebut (SM. Gandasubrata, 1952:20).

Bupati Raden Sudjiman Mertadiredja Gandasubrata yakin bahwa kehidupan rakyat yang serba sederhana tersebut sangat tergantung pada hasil pertanian, pabrik-pabrik, dan *onderneming-onderneming*. Guna mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada, Raden Sudjiman beserta jajaran pemerintahannya berusaha agar pabrik gula Kalibagor dibuka kembali (SM. Gandasubrata, 1952:16).

Pada masa itu, lebih dari separuh dari jumlah pabrik gula yang ada di pulau Jawa telah ditutup sebagai akibat depresi umum. Pabrik-pabrik yang masih dapat beroperasi pada waktu itu hanya pabrik-pabrik yang ongkos produksinya rendah. Pabrik-pabrik gula di residen Banyumas merupakan pabrik yang terhitung mahal; sewa tanah tinggi demikian pula biaya pengangkutan tebu dari kebun ke pabrik. Untuk ekspor ke pelabuhan Cilacap melalui jalan kereta api SDS dikeluarkan ongkos-ongkos yang lebih banyak daripada yang terdapat di daerah lain.

Residen Banyumas sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam upayanya menghidupkan kembali pabrik gula di daerahnya. Pabrik gula Kalibagor diberi *toeslag* di atas *productie-aandeel* sehingga pemiliknya, yaitu *Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden* mau membuka kembali pabriknya. Akhirnya dapat ditetapkan uang sewa rata-rata F65.- untuk satu bau tanah selama satu kali tanam (18 bulan) beserta kontrak panjang, paling lama untuk 7 kali tanam. Pabrik gula Kalibagor pada tahun 1935 mulai tanam tebu dan pada tahun 1936 mulai giling lagi. Penanaman tebu dilakukan di areal pabrik-pabrik Kalibagor, Purwokerto, dan Bojong, letaknya di kabupaten Banyumas dan Purbalingga. Kaum buruh dapat bekerja kembali dan uang sewa tanah mulai mengalir lagi ke desa-desa (SM. Gandasubrata, 1952:17).

Pada tahun 1936, kondisi ekonomi masyarakat Banyumas sudah membaik. Persawahan, kebun, dan ladang dipenuhi tanaman yang hijau yang subur. Penanaman pohon damar secara besar-besaran memberikan andil yang besar bagi matapencaharian rakyat. Rakyat Banyumas sudah terbebas dari kekurangan makan dan bisa hidup layak cukup pangan dan sandang. Pada akhir tahun 1936, sampai

pertengahan tahun 1938 dilakukan pembangunan berbagai prasarana dan sarana untuk kemajuan Banyumas.

Pembangunan sentral listrik di Ketenger, Kalipagu di lereng Gunung Slamet selesai pada awal tahun 1938. Demikian juga untuk pengairan ledeng dibuka secara resmi di Desa Kebasen. Daerah Kebasen, Kroya, dan Sumpiuh pertaniannya semakin maju sehingga hasil bumi berlipat ganda. Desa-desa lain di Banyumas juga semakin makmur dengan dibangunnya prasarana yang menggunakan tenaga listrik. Pengairan yang diambil dari Kali Serayu dengan menggunakan tenaga listrik. Pabrik penggilingan beras dengan tenaga listrik didirikan di Purwokerto, Sokaraja, Kalimanah, Maos, dan Sumpiuh. Dibangun juga sanatorium di Karangmangu untuk penderita sakit paru-paru.

Kemajuan ekonomi membawa dampak dengan keinginan masyarakat Banyumas untuk rekreasi. Tidak jauh dari Karangmangu, tepatnya di Baturaden didirikan pesanggrahan atau pondokan kecil untuk melepaskan penat dengan menikmati keindahan alamnya yang sejuk. Di samping itu telah didirikan juga Hotel Baturaden. Pada tahun 1937, Bupati Sudjiman Gandasubrata juga mendirikan pesanggrahan di atas Dukuh Jurangmangu, dekat Baturaden. Pesanggrahan tersebut dinamakan Tjiptasari (SM. Gandasubrata, 1952:30-34).

Bupati Sudjiman Gandasubrata atas keberhasilannya membawa perbaikan ekonomi Banyumas pada tanggal 13 Desember 1938 ditunjuk sebagai anggota *suiker-commisie*. *Suiker-commisie* bertugas untuk melakukan penyelidikan aturan *suiker-productie* tahun 1933 dan *fabrieks-ordonantie* yang perlu ditinjau ulang. Atas jasanya tersebut, beliau mendapat gelar tambahan adipati pada tanggal 25 Agustus 1939 menjadi Raden Adipati Aria Sudjiman Martadiredja Gandasubrata. Tahun 1939 dan 1941, beliau diangkat sebagai anggota *Commissie van Bijstand voor de Post, Telegraaf en Telefoondienst* (SM. Gandasubrata, 1952:35).

BAB IV

KEBUDAYAAN DI BANYUMAS MASA BUPATI GANDASUBRATA

Banyumas sebagai tanah *gubernemen* memiliki dua bentuk pemerintahan yaitu sipil yang dipegang oleh orang Belanda dengan sistem administrasi modern (*Binnenlandsch Bestuur*) dan pemerintahan *Pangreh Praja* yang dikepalai seorang *regent* atau bupati. Penjelasan bagaimana peran bupati pada masa itu seperti kutipan berikut ini:

“Bupati merupakan jabatan tertinggi orang pribumi dalam administrasi pemerintahan kolonial Belanda. Wilayah dari seorang bupati dinamakan kabupaten (*regentschap*). Bupati merupakan fungsionaris administrasi pemerintahan kolonial, dengan demikian bupati telah terlibat dalam sistem modern, walaupun tidak secara mutlak. Unsur-unsur sistem modern digunakan dalam hubungan bupati dengan atasannya (pemerintah kolonial), sedang kepada rakyat bawahannya masih menggunakan cara-cara tradisional. Gaya pemerintahan di kabupaten menunjukkan sifat tradisional yang berkiblat pada kehidupan pemerintahan di kraton Jawa. Hubungan bupati dengan rakyatnya seperti hubungan raja dengan rakyatnya, demikian juga sebaliknya. Kewibawaan bupati dipertahankan dengan simbol kebesaran sebagai identitas seorang bupati” (Soekesi Soemoatmodjo, 1985:21).

Pengangkatan seseorang menjadi bupati ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda terikat pada prinsip pewarisan dengan beberapa syarat, yaitu calon harus cakap, rajin, dan setia. Calon bupati harus cakap karena ketika menjabat sebagai bupati, wajib mengetuai Dewan Kabupaten (*regentschapsraad*). Kewibawaan bupati terdahulu masih besar pengaruhnya terhadap rakyat, maka

pemerintah masih menganggap penting pengaruh pemimpin berdasarkan keturunan¹.

Pada tahun 1913, seiring perkembangan sosial dan semakin banyaknya kaum terdidik, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dalam pencalonan bupati berupa ketetapan yang isinya menyatakan bahwa para calon bupati harus paling sedikit telah dua tahun menjabat pangkat wedana atau patih dengan predikat sangat memuaskan. Selain itu, seorang calon bupati harus mengerti dan dapat berbicara dalam bahasa Belanda, berpendidikan minimal tamat sekolah pamong praja bumiputra (*hoofdenschool*). Adapun syarat yang tidak tertulis namun tetap dipegang teguh adalah seorang calon bupati merupakan putra *garwa padmi* yang berdarah ningrat. Apabila *garwa padmi* tidak mempunyai keturunan laki-laki, barulah diambil putra dari *garwa ampil*.

Pergantian bupati Banyumas dari Aria Gandasubrata ke Sudjiman Gandasubrata disebabkan dari *garwa padmi* tidak diperoleh keturunan. Aria Gandasubrata mempunyai dua istri, yaitu Raden Pudjasari dan Raden Ayu Sri Sumiyati. Raden Pudjasari semula bernama Raden Rara Sudjinem, putri ketiga dari R. Sastraatmadja, mantri guru di Purwokerto, yang terkenal dengan nama “Embah Meester” karena kepandaiannya dalam bidang kesusastraan Jawa (SM.Gandasubrata, RAA, 1952:5).

Status Raden Pudjasari lebih rendah dari Aria Gandasubrata sehingga dia tidak bisa menyandang status *garwa padmi*. Aria Gandasubrata kemudian memperistri perempuan yang status sosialnya sejajar dengannya, bernama Raden Ayu Sri Sumiyati. Ia merupakan *putri* bupati Wonosobo, selanjutnya dijadikan *garwa padmi*. Namun, dari *garwa padmi* tersebut Aria Gandasubrata tidak dianugerahi keturunan. Sedangkan dari Raden Pudjasari, Aria Gandasubrata

1 Dalam memoar SM. Gandasubarta, RAA (1952: 4-5) disebutkan bahwa kewajiban seorang bupati pada masa itu dapat dibagi dalam tiga bagian: 1) sebagai wakil dan tangan kanan pemerintah Hindia-Belanda, 2) sebagai ketua regentscapsraad, kepala otonoom ressort kabupaten yang mempunyai keuangan dan anggaran belanda sendiri serta pegawai-pegawainja, 3) sebagai kepala dan pemimpin rakjat “volkschoofd” seperti sedia kala. Pekerdjiaan seorang bupati diawasi oleh resident dan gouverneur. Tugas kewajiban bupati tidaklah ringan. Pekerdjiaannya berat lagi sulit, minta tenaga dan ketjakaan yang luar biasa, sungguh berbeda dengan kewajiban seorang bupati dimasa sebelum ada “ontvoogding”, desentralisasi dan otonomi daerah kabupaten.

dianugerahi delapan putra dan putri (Ratmini Soedjatmoko, 2011: 63-64).

Petikan wawancara dengan seorang keluarga Gandasubrata berikut ini menggambarkan saat terjadi pergantian bupati dan bagaimana peran seorang bupati sehingga dipilih oleh pemerintah kolonial Belanda.

“... pada tahun 1933, putra tertua Aria Gandasubrata, yaitu Sudjiman Gandasubrata menggantikan Aria Gandasubrata menjadi bupati Banyumas. Bupati merupakan jabatan atau pangkat tertinggi untuk penguasa dari pribumi. Semakin banyak jasa yang diberikan kepada pemerintah maka semakin panjang waktu menjabatnya, bahkan bisa sampai pensiun atau sampai meninggal dunia. Pemerintah kolonial Belanda sering melakukan mutasi. Mutasi dilakukan jika bupati mampu membantu pemerintah untuk menangani atau mengatasi keruwetan di suatu daerah, maka bupati dipindah ke daerah tersebut. Demikian juga apabila menimbulkan masalah atau dianggap kurang mampu, akan dipindahkan ke tempat lain atau diberhentikan...”²

Pada tahun 1936, Raden Tumenggung Tjokroadisurjo, Bupati Purwokerto pensiun. Pemerintah Hindia Belanda menyatukan Banyumas dan Purwokerto menjadi satu kabupaten. Sudjiman Gandasubrata selaku bupati Banyumas tetap menjabat sebagai bupati pada daerah hasil penyatuan dari Banyumas dan Purwokerto (SM. Gandasubrata, RAA, 1952:18).

Pemerintah kolonial Belanda membeda-bedakan tingkatan para bupati sesuai dengan jasa yang mereka berikan kepada pemerintah kolonial Belanda. Jasa tersebut dinilai baik secara langsung atau berdasarkan jasa yang telah diberikan oleh nenek moyangnya kepada pemerintah kolonial Belanda, atau penguasa Belanda sebelumnya. Perbedaan tingkatan tersebut ditandai dengan adanya gelar-gelar kebangsawanan yang disandang oleh para bupati, sebagai hadiah dari pemerintah atas jasa-jasa atau kecakapan yang telah mereka berikan.

Pemberian hadiah berupa gelar kepada seorang bupati yang telah berjasa dalam menunaikan tugas di wilayahnya terjadi pula pada seorang bupati Banyumas, yaitu Raden Tumenggung Sudjiman Mertadiredja Gandasubrata. Berdasarkan memoarnya, Bupati SM.

2 Wawancara dengan Ibu RA. Umiasih Setiati Gandasubrata (Yetty Gandasubrata) di Dalem Pangeranan Banyumas pada tanggal 15 April 2015.

Gandasubrata dinilai sangat berjasa dalam beberapa bidang, antara lain: perbaikan tata kota, sosial ekonomi, dan pendidikan³.

Berdasarkan memoarnya, SM. Gandasubrata, RAA menceritakan bahwa uang yang dibutuhkan untuk perbaikan kota Purwokerto sebagian diambil dari kas masjid dan sebagian lagi terdiri atas pinjaman dari *Steunfonds Algemeene Nut*. Maka dari itu, uang hasil sewa toko-toko yang telah didirikan tadi diserahkan kepada kas masjid. Sedangkan gedungnya menjadi milik masjid pula (SM. Gandasubrata, RAA, 1952:29).

Selanjutnya memoar SM. Gandasubrata, RAA juga menceritakan bahwa selain memperbaiki rumah-rumah, perbaikan kota dilakukan melalui pelebaran jalan. Pelebaran jalan seperti pada Jalan Karangandjing dari rumah saking Zending menuju ke utara dan stasiun S.D.S. Jalan-jalan tersebut dilebarkan dan dibentuk modern, artinya masing-masing dijadikan jalan yang bercabang dua sama lebarnya, dan tanah di antara kedua cabang itu kemudian hari akan dijadikan *trottoir* atau *plantsoen*. Selain itu, di bagian muka gedung karesidenan ditempatkan sebidang taman bunga untuk menambah keindahan pemandangan.

Semangat membangun dari SM. Gandasubrata tidak berhenti sampai di situ saja. Untuk mempermudah perjalanan ke Baturraden yang saat itu telah mulai ramai sebagai tempat peristirahatan, maka jalan menuju ke Baturraden dilebarkan. Jalan desa dari Rempoah ke Baturraden yang panjangnya kurang lebih 8 km dioper oleh *regentschap* dan di tempat-tempat yang perlu dilebarkan jalannya maka dasar jalan diperkuat pula. Jembatan di sebelah barat rumah sakit Zending juga dilebarkan. Dalam usahanya untuk memperbaiki keadaan kota, SM. Gandasubrata, RAA memperoleh pertolongan sepenuhnya dari penduduk maupun pegawai-pegawai *regentschapswerken*, terutama dari direktur M. Suparlan (SM. Gandasubrata, RAA, 1952:30).

3 Setelah kami pindah ke Purwokerto sedangkan resident tetap bertempat tinggal di Banjumas saja merasa perlu mengadakan perbaikan kota. Oleh karena alun2 Purwokerto tidak memberi pemandangan yang menenangkan maka tennisbaan yang berada dialun2 sebelah timur saja pindahkan kemuka Sekolah Pertukangan di Djalan Sekolah. Rumah ketoprak ditengah alun2 dimuka mesdjid dipindahkan ke Pasar Manis dan akhirnya rumah ini diperbaiki sampai merupakan sebuah gedung gambar hidup, yang dapat dipergunakan pula untuk pertundjukan wajah orang, sandiwara, rapat2, dsb. Warung2 yang berderet2 disebelah selatan halaman mesdjid dibongkar dan kemudian pada tempat itu didirikan sebuah bangunan beton terbagi dalam beberapa toko2 ketjil (SM. Gandasubrata, RAA, 1952:29).

Dalam memperbaiki bidang sosial ekonomi, SM. Gandasubrata selain melebarkan jalan dan jembatan serta mendirikan pertokoan, juga mendirikan pabrik beras. Pabrik-pabrik beras didirikan di Purwokerto, Sukaradja, Kalimanah, Maos dan Sumpiuh dengan tenaga listrik. Pabrik yang terakhir didirikan oleh Perusahaan Asuransi Bumi-putera di Yogyakarta, dengan nama “Srikaton”. Pemimpin pabrik adalah R.W. Dwidjosewojo, yang bercita-cita hendak memperbaiki pertanian Indonesia dengan menarik kaum petani dalam suatu koperasi penggilingan beras (SM. Gandasubrata, RAA, 1952:31).

Di bidang kesehatan, didirikan *Consultasie Bureau* untuk anak-anak, bayi dan jawatan propaganda kesehatan di desa-desa; poliklinik *regentschap* didirikan di tiap-tiap *onder district*. Kemajuan-kemajuan yang dicapai terutama di bidang kesehatan menyebabkan Banyumas menjadi contoh dan tempat penelitian para *studenten*, dokter-dokter, dan *ambtenar-ambtenar* BB. Di bidang pendidikan didirikan sekolah-sekolah, paling rendah sebuah sekolah rakyat satu *vervolgschool* di setiap *onder district*. Di samping itu, umumnya ada sebuah sekolah untuk anak-anak perempuan dari kalangan rakyat yang terkenal sebagai sekolah Kartini.

Sebagai tanda terimakasih pemerintah atas jasa-jasa tersebut, maka bupati SM.Gandasubrata diberi tanda jasa berupa gelar “Aria” yang diterimakan oleh Resident Banyumas HGF van Huls atas nama pemerintah. Berdasarkan Gouvernementsbesluit tanggal 15 Agustus 1936 No. 14, gelar lengkapnya menjadi Raden Tumenggung Aria Sudjiman Mertadiredja Gandasubrata (SM. Gandasubrata, RAA, 1952:32).

Pada tahun 1939, Bupati Raden Tumenggung Ario SM Gandasubrata mendapat hadiah gelar yang lebih tinggi lagi. Beliau berjasa antara lain dalam membuat tempat rekreasi dan tempat peristirahatan, terutama untuk orang-orang kulit putih di Baturaden, dan mendirikan sentral listrik di Ketenger. Gelar “Adipati” diberikan oleh pemerintah atas jasa-jasa tersebut. Melalui *Gouvernementsbesluit* No. 4, tanggal 25 Agustus 1939, gelarnya menjadi Raden Adipati Aria Sudjiman Mertadiredjo Gandasubrata (SM. Gandasubrata, RAA, 1952:34).

Selanjutnya dalam bab ini akan difokuskan pada beberapa aspek kebudayaan yang berkembang di Banyumas pada masa pemerintahan Gandasubrata, meliputi pelapisan sosial, arsitektur, batik, *lengger*, dan wayang. Hal tersebut sesuai yang digambarkan dalam *memoar* Gandasubrata dan beberapa sumber yang ada.

A. Pelapisan Sosial Masyarakat di Banyumas

Masyarakat Banyumas pada masa kolonial terdiri dari tiga lapisan masyarakat, meliputi: lapisan pertama adalah golongan orang Belanda, lapisan kedua atau pertengahan adalah golongan orang perdagangan yang terdiri dari orang-orang Thionghoa, dan lapisan ketiga adalah golongan pribumi, yang sekaligus merupakan mayoritas (Purwoto Suhadi Gandasubrata, 2003:14-15). Diceritakan pula bahwa pada masa tersebut sangat terasa adanya diskriminasi sosial ekonomi antara ketiga lapisan tersebut. Gaya hidup orang-orang Belanda terlihat sangat eksklusif. Mereka mempunyai tempat pertemuan atau tempat rekreasi sendiri yang dinamakan kamar bola atau *sociteit*.

Adanya pelapisan sosial dalam masyarakat Banyumas juga diutarakan oleh budayawan Banyumas, seperti dalam petikan wawancara berikut ini:

“bahwa pelapisan masyarakat di Banyumas sudah ada sejak jaman Belanda. Hal tersebut sangat kentara misalnya dalam pembagian sektor pekerjaan, seperti bidang pertanian dikerjakan oleh para pribumi, sektor perdagangan dikerjakan oleh penduduk Cina dan dari Asia Timur lainnya, mau tidak mau kemudian memunculkan pelapisan sosial di bidang ekonomi. Hal tersebut membawa dampak bahwa penduduk Cina menjadi lebih banyak pengalaman di bidang perdagangan, sedangkan penduduk pribumi hanya punya pengalaman bertani, itupun hanya untuk tujuan panen berikutnya atau dikonsumsi sendiri, hanya untuk dimakan, bukan untuk dijual. Demikian juga dengan adanya pelapisan golongan pribumi yang terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan priyayi dan wong cilik, di mana hal tersebut menurut saya merupakan hal yang kontra produktif untuk kondisi sekarang...”⁴

4 Wawancara dengan Bapak Ahmad Tohari di Jatilawang Banyumas pada tanggal 14 April 2015.

Kembali membahas tentang gedung pertemuan dan rekreasi milik orang-orang Belanda pada masa itu, bernama “*Sociteit Slamet*”. Gedung tersebut merupakan gedung yang sangat luas. Gedung *Sociteit Slamet* dibangun antara lain oleh para pemilik perkebunan, administratur pabrik, manager perkeretaapian, yang semuanya berkebangsaan Belanda. *Sociteit Slamet* diperuntukkan bagi orang-orang Belanda, dengan beberapa pengecualian bagi segelintir kalangan elite pribumi, dan orang Tionghoa yang statusnya tinggi. Pelindung *Sociteit Slamet* adalah Residen Belanda.



Foto 1. “*Sociteit Slamet*” sekarang Gedung RRI Purwokerto
(Repro Koleksi Soegeng Wijono)

Anggota *Sociteit Slamet* mempunyai hak bermain bilyard, berenang, tenis meja, tenis, juga melihat film bioskop yang diputar setiap malam minggu, atau menonton pertunjukan kesenian setiap perayaan ulang tahun Ratu Juliana. Bupati beserta keluarganya sebagai salah satu elite pribumi mendapatkan hak sama untuk menggunakan fasilitas sebagai anggota *Sociteit Slamet*. Meskipun demikian, seperti disebutkan oleh Bapak Purwoto Suhadi Gandasubrata, bahwa mereka sebagai keluarga bupati merupakan anggota minoritas di kalangan orang-orang Belanda, sehingga mereka merasa risih dan kurang berminat untuk menggunakan

fasilitas yang ada. Mereka lebih suka berenang di kolam renang desa Pancasan, Ajibarang, yang merupakan kolam renang terbaik dan bersih, walaupun letaknya agak jauh (Purwoto Suhadi Gandasubrata, 2003:15).

Kaum elit pribumi Purwokerto yang tidak bisa menjadi anggota *Sociteit Slamet* kemudian mendirikan *sociteit* atau kamar bola khusus untuk kaum pribumi yang diberi nama “Panti Soemitro”. Bupati Sudjiman Gandasubrata diangkat sebagai pelindung *Sociteit Panti Soemitro*. “Panti Soemitro” juga menyediakan berbagai macam sarana rekreasi seperti ruang permainan bilyard, *ping pong*, dan berbagai sarana pertunjukan kesenian Jawa (gamelan, pakaian tari dan pakaian wayang orang). Di samping itu, dibangun juga lapangan tenis untuk kaum pribumi di sudut alun-alun selatan. Keanggotaan *Sociteit Panti Sumitro* bebas untuk kaum pribumi. Di sinilah kemudian anak-anak kaum pribumi belajar bermain gamelan dan tarian Jawa.



Foto 2. Para Pemuda Sedang Bermain Bilyard
(Repro Koleksi Soegeng Wijono)

Dalam rangka mendidik anak-anak kaum pribumi di bidang kesenian Jawa, didatangkan seorang ahli kesenian dan tari Jawa dari

Surakarta yang bernama Bapak Sardjono. Melalui Bapak Sardjono inilah anak-anak pribumi mendalami kesenian Jawa. Bupati Sudjiman Gandasubrata kemudian mengangkat Bapak Sardjono menjadi pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan memimpin kursus kesenian Jawa di *Sociteit Panti Sumitro*. Semua anak-anak dari kalangan elit di Purwokerto menjadi muridnya. “Panti Soemitro” juga menjadi sarana atau tempat pertunjukan seni tari dan wayang orang (Purwoto Suhadi Gandasubrata, 2003:15).

Kehidupan elite pribumi, di antaranya keluarga bupati, terpengaruh dengan orang Belanda. Pengaruh penggunaan bahasa dalam berinteraksi dengan sesama anggota keluarga. Penggunaan bahasa Belanda di samping bahasa Jawa digunakan keluarga bupati dalam percakapan sehari-hari. Seperti yang dituliskan Ratmini Soedjatmoko (2011: 63) berikut ini:

“ Kami, cucu-cucu menyapa Pangeran Aria Gandasubrata dan istrinya (garwa padmi) dengan Bapak Ageng dan Ibu Ageng. Tetapi karena sejak kecil kami banyak bercakap-cakap dalam bahasa Belanda, kami juga menyebut mereka *grootpa* dan *grootma*, biarpun tidak untuk menyapa.”

Sebagai keluarga priyayi Jawa, keluarga Gandasubrata dalam mendidik anak-anaknya menggunakan tatakrama Jawa. Tata krma Jawa digunakan dalam pergaulan sehari-hari, misalnya untuk menyapa orang yang lebih tua, cara duduk yang sopan, cara makan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, etiket Barat juga diajarkan meskipun hanya sedikit. Bahasa yang dipakai di rumah keluarga Gandasubrata untuk percakapan sehari-hari merupakan perpaduan antara bahasa Jawa dan bahasa Belanda. Namun, menurut Ibu Ratmini, dalam berkomunikasi dengan kakek dan nenek (Pangeran Aria Gandasubrata dan istri), mereka harus menggunakan bahasa Jawa *krama inggil*.

Bupati Sudjiman Gandasubrata sendiri dalam memoarnya menjelaskan bahwa beliau mendapatkan pendidikan Jawa tulen dalam suasana *patriarchaal* dan feodal. Penghormatan terhadap kakek dan nenek atau orang tua yang berkedudukan tinggi adalah sangat besar. Di dalam kabupaten, hanya beliau yang berkedudukan tinggi yang biasa duduk di atas kursi. Bahkan, Bupati Sudjiman Gandasubrata

sekalipun sudah berpangkat tinggi selalu duduk di lantai bila menghadap orangtuanya. *Laku dodok, sila*, menyembah, berjongkok dan sebagainya merupakan kebiasaan yang dipegang teguh (SM. Gandasubrata, RAA, 1952:5).

Dalam hal berpakaian, pakaian sehari-hari anak dan cucu Gandasubrata sudah mengenakan jas, hem, celana, rok, atau gaun. Namun, ketika ada acara khusus, maka mereka harus mengenakan pakaian adat Jawa. Seperti misalnya saat Hari Raya Idul Fitri, seluruh keluarga besar Gandasubrata yang perempuan mengenakan kain kebaya. Semua putra-putri, menantu, cucu, maupun keluarga lain bergiliran untuk *sungkem* sambil *laku dodok*. Sungkeman pertama ditujukan kepada Bapak Ageng, baru kemudian Ibu Ageng (Ratmini, 2011:67).

B. Arsitektur

Tata ruang ibukota Banyumas masa kolonial dipengaruhi oleh pola sosiokultural Jawa dan masuknya kolonialisme. Kawasan alun-alun dengan *dalem* dan *pendopo* kabupaten, masjid, penjara, pasar, dan alun-alun sebagai jantung pemerintahan, merupakan satu kesatuan sebagai bagian dari kota-kota tradisional di Jawa. Hal itu merupakan contoh konkrit adanya upaya menjaga keseimbangan antara individu dengan Tuhan dan lingkungan, yang dilakukan secara bersama demi kepentingan bersama di dalam masyarakat (Daldjoeni, 1998:18-19).

Kedudukan ibukota kabupaten Banyumas baik ketika masih di Banyumas maupun ketika berada di Purwokerto memperlihatkan keadaan tersebut. Berdasarkan pengamatan di lapangan, rumah bupati ketika masih di Banyumas, memperlihatkan di bagian depan rumah bupati terdapat alun-alun. Pohon beringin ditanam di tengah-tengah alun-alun. Rumah bupati menghadap ke selatan, membelakangi Gunung Slamet, menghadap ke arah laut kidul. Masjid didirikan di sebelah barat alun-alun atau sisi kanan dari rumah bupati. Di sisi timur rumah bupati, atau sebelah kiri alun-alun didirikan penjara, kantor pengadilan, dan pegadaian. Jalan dibuat mengelilingi sepanjang alun-alun.

Demikian pula ketika rumah bupati berkedudukan di Purwokerto arahnya juga menghadap ke selatan membelakangi Gunung Slamet. Di depan rumah bupati terdapat alun-alun. Di tengah alun-alun ditanami pohon beringin. Sebelah barat alun-alun berdiri masjid. Penjara berada di seberang jalan, sebelah selatan masjid. Jalan dibuat mengelilingi sepanjang alun-alun. Campur tangan pemerintah kolonial menjadikan alun-alun dibelah menjadi dua, di tengah-tengah dibuat jalan hingga menuju pintu masuk rumah bupati.



Foto 3. Foto Atas: Jalan Yang Membelah Alun-Alun. Foto Bawah: Jalan Yang Membelah Alun-Alun Sampai Pintu Masuk Rumah Bupati Banyumas.

(Foto Tim, tanggal 17 April 2015)

Kabupaten Banyumas di Purwokerto pada masa pemerintahan Gandasubrata telah mempunyai sarana dan prasarana yang mencukupi. Sarana dan prasarana di antaranya terkait penerangan listrik, bank, sekolah, dan percetakan.



Foto 5. Kantor Listrik Purwokerto
(Repro Koleksi Soegeng Wijono)



Foto 6. Gedung Algemeene Volks Bank (AVB) Sekarang Museum BRI
(Repro Koleksi Soegeng Wijono)



Foto 7. MULO Purwokerto (Sekarang SMAN II Purwokerto)
(Repro Koleksi Soegeng Wijono)



Foto 8. Kios Balai Pustaka
(Repro Koleksi Soegeng Wijono)

Seperti telah disinggung di bagian sebelumnya, bahwa penduduk Cina lebih berperan dalam bidang perdagangan. Purwokerto pada awalnya merupakan pusat perdagangan (dengan Pasar Wage sebagai intinya) yang selanjutnya oleh pemerintah kolonial Belanda

dikembangkan melalui pembangunan pabrik gula, dan membangun kota baru di sebelah barat kota lama sebagai pusat pemerintahan. Hal ini diawali dengan pemindahan kabupaten, kantor dan rumah dinas Asisten Residen dari Ajibarang dan dilanjutkan dengan pemindahan Kabupaten dan Karesidenan dari Banyumas ke Purwokerto (Wawancara dengan Soegeng Wijono, tanggal 15 April 2015 di Banyumas).



Foto 9. Suasana Jalan dan Pertokoan di Sekitar Pasar Wage
(Repro Koleksi Soegeng Wijono)

Penduduk Banyumas secara umum dapat dikelompokkan dalam empat kelompok masyarakat. Penduduk asli Banyumas yang merupakan mayoritas penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Para bangsawan keturunan Kerajaan Mataram, yang sengaja ditempatkan di Banyumas atau bangsawan karena perkawinan dengan warga masyarakat setempat (Banyumas). Bangsa Belanda sebagai pejabat dan pegawai pemerintah kolonial Belanda maupun pabrik gula di Kalibagor. Bangsa Cina sebagai pendatang yang umumnya berprofesi sebagai pedagang (Wawancara dengan Widiyanto, tanggal 15 April 2015 di Banyumas).

Bangunan berarsitektur Cina dapat dijumpai dalam bentuk tempat tinggal, pertokoan, dan tempat peribadatan bagi orang Cina. Adapun bangunan berarsitektur kolonial didirikan oleh pemerintah kolonial untuk menunjang kegiatan pemerintahan, misalnya perkantoran dan perumahan pegawai. Pada umumnya bangunan perkantoran dan perumahan pegawai bercirikan arsitektur kolonial.

Menurut informasi dari keluarga Gandasubrata, perbedaan kondisi sosial ekonomi penduduk seperti tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap bentuk bangunan rumah tinggal mereka. Para bangsawan keturunan Kerajaan Mataram biasanya menggunakan bentuk *limasan pacul gowang*, sedangkan penduduk asli Banyumas menggunakan bentuk *tikelan* atau *joglo* (untuk tokoh masyarakat) atau *srotong* (untuk masyarakat biasa). Adapun bangsa Belanda dan Cina dengan bentuk masing-masing yang berbeda dengan bangunan tradisional Jawa yang tersebar hampir di seluruh wilayah kota Banyumas (Wawancara dengan Ibu Yetty Gandasubrata, tanggal 17 April 2015 di Banyumas).

Arsitektur atau seni bangunan tradisional daerah Banyumas pada umumnya tidak berbeda dengan arsitektur di daerah Jawa Tengah. Untuk membedakan jenis arsitektur tradisional di daerah Banyumas dapat dilihat dari model atapnya (Koderi, 1991:140). Secara garis besar model atap bangunan tradisional ada 5 jenis, yaitu: *panggungpe*, *kampung*, *tajug*, *limasan*, dan *joglo*. Dari lima dasar bentuk atap tersebut dapat dikembangkan menjadi berbagai variasi⁵. Variasi tersebut antara lain tampak pada bangunan rumah bentuk *tajug* yang dapat dijumpai pada pendapa Kabupaten Banyumas di Kota Purwokerto yang dikenal dengan sebutan “Si Panji”. Ciri-ciri bangunan *tajug* yaitu memiliki denah bujur sangkar, bertiang empat, dan mempunyai empat sisi atap

5 Penjelasan masing-masing bentuk dasar atap bangunan tradisional mengacu pada Koderi (1991:140) sebagai berikut: 1) *Panggungpe*; bentuk atap yang paling sederhana. 2) *Kampung*; bentuk bangunan yang paling umum dipakai di daerah pedesaan Banyumas adalah bentuk atap kampung atau bangunan (*omah*) kampung, 3) *Tajug*; bangunan rumah bentuk *tajug* biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan suci seperti masjid, langgar, makam, 4) *Limasan*; pada dasarnya hampir sama dengan model kampung, namun limasan mempunyai empat sisi atap, 5) *Joglo*; kerap juga disebut rumah *tikelan* karena merupakan jenis rumah yang paling banyak memerlukan bahan bangunan. Untuk membuat jenis rumah tersebut biayanya harus “*tikel-tikel*” atau berlipat-lipat, sehingga hanya orang-orang yang berkemampuan ekonomi tinggi yang mampu membangunnya. Banyaknya rumah *tikelan* di daerah Banyumas menandakan daerah yang subur dan makmur.

yang bertemu di puncak yang runcing. Bangunan bentuk *tajug* dapat dikembangkan dengan berbagai tambahan seperti: *Tajug Lawakan*, *Tajug Lambang Teplok*, *Tajug Semar Tinandu*, *Tajug Semar Sinongsong*, *Tajug Lambangsari*, dan *Tajug Semar Sinongsong Lambang Gantung*. Jenis yang terakhir tersebut merupakan *tajug* bertiang satu dengan bahu serta memakai lambang gantung. Lambang gantung tersebut sebagai penggantung atap penanggap pada *brunjung*. *Tajug* jenis ini dipakai di masjid Saka Tunggal Desa Cikakak Wangon dan Masjid Pakuncen, keduanya di Kabupaten Banyumas.



Foto10. Bupati Mancanegara di Pendapa Si Panji Banyumas bersama Istri, Residen, dan Para Dokter Setelah Menghadiri Peresmian RS Joelliana tahun 1925
(Repro Koleksi Soegeng Wijono)



Foto 11. Bupati Banyumas KPAA Gandasoebrata beserta Istri dan Staf di Pendapa Banyumas
(Repro Koleksi Soegeng Wijono)

Bangunan yang bergaya tropis dapat dilihat di rumah tinggal bupati. Dalam membicarakan tentang tempat tinggal bupati, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu istilah *regent* dan bupati. *Regent* adalah kepala pemerintahan pribumi (*het hoofd van het Inlandsche Bestuur*) di dalam lingkungan pemerintahan kolonial. Kedudukan seorang *regent* sebagai pegawai pemerintah kolonial, sedangkan bupati, terutama di daerah pesisiran adalah kepala daerah yang mandiri di luar lingkungan Negara Agung, tetapi masih mengakui kedaulatan Raja Mataram (Soekesi Soemoatmodjo, 1985: 42).

Menurut Soerjo Winoto (dalam Soekesi Soemoatmodjo, 1985:42) dijelaskan bahwa kabupaten merupakan rumah tempat tinggal seorang bupati beserta keluarganya. Kabupaten merupakan rumah tempat tinggal bupati yang masih mengikuti aturan seni bangunan Jawa, dalam bentuk, bahan yang digunakan, cara mengerjakan, maupun orang-orang yang mengerjakannya.

a). Kabupaten

Ada tiga unsur yang menjadi ciri tempat tinggal seorang bupati, yaitu alun-alun, pendapa, dan dalem. Ketiga unsur tersebut merupakan suatu bentuk miniatur yang diambil dari model keraton Jawa di tanah kerajaan. Sejak jaman Majapahit rumah tempat tinggal seorang raja ditandai dengan adanya alun-alun, pendapa, dan rumah tempat tinggal raja. Perkembangan selanjutnya, pendapa bagi istana di Mataram menjadi *siti hinggil* dan merupakan sentrum dari seluruh bangunan keraton, sedangkan di jaman Majapahit, yang merupakan sentrum dari seluruh kota kerajaan adalah alun-alun (Soekesi Soemoatmodjo, 1985:43).

Ketika Kabupaten Banyumas digabungkan dengan Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Banyumas bentuk baru mempunyai 2 buah kantor kabupaten lengkap dengan sekretariatnya, 2 buah kantor *regentschapswerken*, kantor keuangan, dan lain-lain (SM. Gandasubrata, RAA, 1952: 20). Penggabungan dua kabupaten tersebut berawal pada tahun 1936 saat Bupati Purwokerto RAA. Tjokro Adisuryo memasuki masa pensiun dan beliau tidak berputera yang dapat menggantikan kedudukan beliau sesuai

tradisi Hindia Belanda. Saat itu Pemerintah Hindia Belanda sedang mengalami kesulitan keuangan akibat malaise. Maka sebagai upaya penghematan, Pemerintah Hindia Belanda mengambil keputusan untuk menggabungkan Kabupaten Purwokerto dan Kabupaten Banyumas menjadi satu dengan nama Kabupaten Banyumas. Ibu kota Kabupaten Banyumas ditetapkan di Purwokerto. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda mengangkat Raden Sudjiman Mertadiredja Gandasubrata sebagai bupatinya (Purwoto Suhadi Gandasubrata, 2003: 8).

Rumah kabupaten di Purwokerto didirikan oleh almarhum Raden Adipati Aryo Mertadireja II yang juga merupakan leluhur keluarga Gandasubrata. Rumah Kabupaten Purwokerto dibangun sekitar tahun 1850, berarti saat ditempati Bupati Raden Sudjiman, bangunan tersebut berumur kurang lebih 86 tahun. Adapun rumah pendapa Kabupaten Banyumas yang dinamakan *Si Panji* pada waktu itu telah berumur kurang lebih 250 tahun dan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas sejak berdirinya Kabupaten Banyumas di jaman Kesultanan Pajang (Purwoto Suhadi Gandasubrata, 2003: 8).



Foto 12. Mobil Bupati Dalam Rangka Peresmian Pendapa Si Panji di Purwokerto
(Repro Koleksi Soegeng Wijono)

Bupati Sudjiman Gandasubrata memegang teguh kepercayaan yang merupakan wasiat leluhurnya untuk tidak mendiami rumah berbentuk *bale malang*. *Bale malang* berarti rumah yang menghadap jalan memanjang atau persegi panjang. Pendapa Kabupaten Purwokerto berbentuk *bale malang* (persegi panjang). Bupati Sudjiman menginginkan untuk mengganti pendapa Kabupaten Purwokerto dengan pendapa yang ada di Kabupaten Banyumas. Atas perkenan pemerintah kolonial, Bupati Sudjiman Gandasubrata memindahkan Pendapa Si Panji yang berbentuk segi empat ke rumah bupati di Purwokerto (Purwoto Suhadi Gandasubrata, 2003: 11).



Foto 13. Ibu Sudjiman Mertadiredja Gandasubrata Beserta Istri Staf Kabupaten di Pendapa Si Panji Purwokerto tahun 1937

(Repro Koleksi Soegeng Wijono)

Rumah Kabupaten Banyumas di Purwokerto luasnya kurang lebih 2 hektar dengan gedung induk yang besar menghadap ke alun-alun dikelilingi tembok setinggi kurang lebih 2,5 meter menghadap ke selatan. Di gedung utama di tengah-tengah terdapat delapan kamar yang besar dengan pendapa di depan serta ruang *pringgitan* yang terletak di antara pendapa dengan rumah.

Pringgitan biasa dipakai untuk pertunjukan wayang kulit lengkap dengan seperangkat gamelan pusaka Bupati Banyumas. Di bagian belakang ada ruang terbuka luas yang digunakan sebagai ruang duduk dan ruang tamu. Di sebelah timur dan sebelah barat terdapat paviliun masing-masing dengan dua kamar tidur, kamar duduk, dan kamar makannya. Paviliun sebelah timur dihuni Eyang Puteri Karawang, sedangkan paviliun sebelah barat digunakan untuk tamu. Di seberangnya terdapat garasi mobil dan *gedokan* untuk tempat kuda dan *dokar* (Purwoto Suhadi Gandasubrata, 2003: 6-7).

b). Dalem Pangeranan

Pangeran Adipati Aria Mertadiredja III saat memasuki masa pensiun membangun sebuah rumah di desa Sudagaran, di atas tanah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$, tidak jauh dari rumah Bupati Banyumas. Rumah tersebut kerap disebut *Dalem Pangeranan* atau *Pangeranan*. Adapun rumah tersebut sekarang beralamat di Jalan Budi Utomo No. 294. Setelah P.A.A Mertadiredja pensiun pada tahun 1913, beliau tinggal di Dalem Pangeranan sampai wafat pada tahun 1927 (Ratmini Gandasubrata, 2011:55).



Foto 14. Dalem Pangeranan Masih Terawat Hingga Saat Ini

(Foto Tim, tanggal 17 April 2015)

Seperti halnya rumah bupati Banyumas, *Dalem Pangeranan* juga menghadap selatan ke arah laut selatan, membelakangi Gunung Slamet. Di depan *Dalem Pangeranan* terdapat halaman yang cukup luas. Halaman depan ditebari kerikil dan batu-batu kecil. Di bagian tengah halaman depan terdapat lingkaran yang ditanami pohon mawar. Berbagai pohon buah-buahan, di antaranya kepel ditanam di halaman ini. Kondisi *Dalem Pangeranan* saat ini seperti terlihat dalam foto 14.

Serambi depan *Dalem Pangeranan* dapat dicapai melalui tangga yang lebar. Menurut informasi Ibu Yetty Gandasubrata, di tangga depan rumah tersebut merupakan lokasi favorit yang sering digunakan keluarga Gandasubrata untuk berfoto. Di tangga tersebut dahulu dihiasi dengan pot porselin Cina antik berisi tanaman kuping gajah. Ada pula porselin gajah penyangga pot tanaman. Pot-pot porselin antik tersebut hingga kini masih terawat baik dan disimpan di *Dalem Pangeranan*.



Foto 15. Koleksi Pot Antik Dari Masa Bupati Pangeran Aria Gandasubrata
(Foto Tim, tanggal 17 April 2015)

Menurut penuturan Ibu Yetty Gandasubrata, di bagian serambi depan rumah dahulu diisi dengan dua perangkat meja kursi, satu perangkat terdiri atas meja marmer bundar dikelilingi oleh empat

kursi goyang ukiran. Adapun untuk masuk ke dalam rumah, ada tiga buah pintu lebar dan di bagian tengahnya ada ruangan yang menghubungkan serambi muka dengan serambi belakang.



Foto 16. Bagian Depan dan Tengah Dalem Pangeranan

(Foto Tim, tanggal 17 April 2015)

Di sebelah kiri (barat) *Dalem Pangeranan* terdapat ruang duduk, dua kamar tidur dan ruang perpustakaan, di sebelah kanan (timur) terdapat tiga kamar tidur dan sebuah serambi yang sering disebut *emper wetan*. Serambi bagian belakang diisi dengan meja makan yang mampu menampung tempat duduk untuk 12 orang, dan seperangkat meja kursi tamu. Di bagian luar serambi ada ruang makan kecil dan gudang untuk menyimpan keperluan makan.

Kamar mandi, dapur, dan ruang pembantu *Dalem Pangeranan* terdapat di sebelah timur. Ada pula bangunan semacam paviliun, yang di sebelah barat disebut “loji kulon” dan satu lagi disebut “loji kidul”. Loji kulon sekarang sudah tidak ada lagi, namun loji kidul masih berfungsi. Dahulu ada langgar yang dibangun di halaman belakang. Selain itu, di halaman ada dua buah sumur. Satu sumur terletak di halaman depan, satunya lagi di halaman belakang. Di bagian depan garasi tersedia bejana batu yang diisi air untuk mencuci mobil.

C. Kerajinan Batik

Sektor kerajinan yang ada di Kabupaten Banyumas cukup variatif. Namun, kerajinan yang paling menonjol adalah batik. Penguasa Banyumas dalam usahanya memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan cara mengembangkan kerajinan rumah tangga. Menurut sumber dari *Indische Cultuur Geschiedenis* dijelaskan bahwa di wilayah Banyumas berkembang kegiatan yang menunjang kehidupan perekonomian. Penduduk di Karesidenan Banyumas terutama bermatapencaharian sebagai petani dan pekerja kerajinan. Sektor kerajinan yang berkembang pada waktu itu, antara lain meliputi: keranjang, tenun, genteng, jambangan bunga, batik, emas, perak, dan tembaga. Matapencaharian lainnya antara lain meliputi: pande besi, membuat kalengan untuk mengemas daging, pekerja bangunan, pengrajin bambu untuk peralatan musik dan payung, membuat batu bata, pembakaran gamping, membuat gula jawa, minyak kelapa, cerutu, dan penjahit pakaian (Java Instituut, 1931: 184-186).

Di wilayah Soekaraja kebanyakan penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dan umumnya mengembangkan kerajinan batik, minyak kelapa, dan gula jawa. Adapun di wilayah Sumpiuh berkembang aktivitas membuat kerajinan keranjang, tenun, batik, pengrajin emas dan perak, pande besi, kalengan untuk daging, pekerja bangunan, payung, kerajinan menyamak kulit, batu bata dan genteng, tepung dan kue, serta penjahit pakaian. Di wilayah Kota Purwokerto, masyarakat pada umumnya membuat kerajinan keranjang, pengrajin tenun, batik, emas, tembaga, dan perak, pande besi, pengrajin kalengan untuk daging, pekerja bangunan, pengrajin bambu untuk alat rumah tangga, kerajinan kulit terutama pembuatan untuk wayang kulit purwo, batu bata, pembakaran gamping, gula jawa, minyak kelapa serta pengrajin kertas (Java Instituut, 1931: 184-186).

Wilayah Banyumas yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa, tidak terlepas dari kaitan dengan kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa, begitu pula dengan masalah pengaruh budayanya. Sejarah mengenai asal-usul batik di Banyumas belum ada literatur yang pasti. Tetapi beberapa sumber mengungkapkan bahwa munculnya budaya batik

di Banyumas tidak terlepas dari sejarah dinamika kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Perkembangan batik di Banyumas yang berpusat di daerah Sokaraja dibawa oleh pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro setelah selesainya peperangan tahun 1830. Mereka kemudian menetap di wilayah Banyumas, dan lama-kelamaan budaya membatik ini merambah pada masyarakat di Sokaraja. Sedangkan menurut Nian S. Djoemena dalam *bukunya Batik dan Mitra*, menulis bahwa asal mula batik Banyumas dibawa oleh pengungsi-pengungsi dari daerah Solo ketika di Kerajaan Mataram terjadi perang saudara sekitar tahun 1680, perang saudara ini akibat politik pecah belah Belanda. Pangeran Puger dijatuhkan oleh Amangkurat II dan VOC melarikan diri ke daerah Banyumas. Pengungsi-pengungsi inilah yang diduga menyebarkan budaya batik di Banyumas (Djoemena, 1990).

Perkembangan pematikan di daerah-daerah luar selain dari Yogyakarta dan Solo erat hubungannya dengan perkembangan sejarah kerajaan Yogya dan Solo. Meluasnya pematikan keluar dari kraton setelah berakhirnya perang Diponegoro dan banyaknya keluarga kraton yang pindah ke daerah-daerah luar Yogya dan Solo karena mereka tidak mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Keluarga kraton membawa pengikut-pengikutnya ke daerah baru dan ditempat itu kerajinan batik terus dilanjutkan dan kemudian menjadi pekerjaan untuk pencaharian.

Perkembangan batik di Banyumas berpusat di daerah Sokaraja, dibawa oleh pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro setelah selesainya peperangan tahun 1830, mereka kebanyakan menetap di daerah Banyumas. Pengikutnya yang terkenal waktu itu ialah Najendra dan dialah pengembang batik celup di Sokaraja. Bahan mori yang dipakai hasil tenunan sendiri dan obat pewarna yang dipakai berasal dari *pohon tom*, *pohon pace* atau mengkudu yang memberi warna merah kesemuan kuning (Wawancara dengan Ibu Yetti Gandasubrata pada tanggal 17 April 2015, dan Bapak Ahmad Tohari tanggal 15 April 2015, di Banyumas).

Lama kelamaan, pematikan menjalar pada rakyat Sokaraja dan pada akhir abad ke-XIX berhubungan langsung dengan pematik di daerah Solo dan Ponorogo. Daerah pematikan di Banyumas sudah

dikenal sejak dahulu dengan motif dan warna khususnya, dan sekarang dinamakan Batik Banyumas. Setelah perang dunia kesatu pembatikan mulai pula dikerjakan oleh Cina di samping mereka dagang bahan batik.

Daerah pembatikan itu pada umumnya berada di sekitar pusat-pusat pemerintahan pada jaman dahulu. Banyumas, pusat pemerintahan di Kota Lama Banyumas, sekitar alun-alun, maka buruh batik ada di sekitar Pakunden, Sudagaran sampai Papringan. Di Sokaraja, pusat pemerintahannya itu di Sokaraja Kulon, wilayahnya lebih dekat dengan Kauman, sehingga banyak sekali orang-orang batik di Kauman, dan masih sampai sekarang. Keterkaitan antara pusat pemerintahan, baik itu keraton, kademangan, maupun kadipaten, adalah karena adanya budaya berbusana batik *nyamping* (memakai kain batik untuk bawahan pakaian) dari para petinggi, atau para orang-orang yang ada di lingkungan pemerintahan beserta keluarganya.

Kebiasaan berbusana *nyamping* kain batik ini juga sebagai identitas dari si pemakai, bahwa dia mempunyai jabatan tertentu, atau dari kalangan tertentu. Keluarga priyayi tidak bisa membatik sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Akhirnya mengambil tenaga dari luar, yaitu orang-orang di sekitar kraton untuk membatik. Setelah budaya dan seni membatik ini terbawa keluar dari lingkungan bangsawan, kemudian banyak masyarakat yang juga memakai kain batik untuk pakaian sehari-hari, terutama untuk kaum perempuan. Kain batik yang dipakai rakyat biasa cenderung memiliki motif yang sedikit berbeda dengan yang digunakan oleh kaum bangsawan. Selain sebagai pakaian, kain batik juga digunakan pada upacara-upacara adat, atau ritual yang berkaitan dengan siklus hidup manusia sejak dari dalam kandungan sampai meninggal dunia. Masing-masing acara tersebut menggunakan motif-motif batik tertentu yang mengandung simbolisasi petuah, nasihat, dan harapan dari tujuan acara tersebut.

Seiring dengan perkembangan jaman, batik yang semula hanya dipakai untuk *nyamping* dan upacara-upacara adat, kemudian mulai dikembangkan menjadi batik untuk berbusana secara umum. Hal ini karena semakin jarang orang yang memakai batik untuk *nyamping*. Orang-orang kemudian lebih banyak memakai pakaian seperti sekarang

ini; rok atau celana. Adapun yang masih menggunakan *nyamping* adalah generasi tua yang jumlahnya semakin berkurang dan ini yang menjadi salah satu mengapa batik semakin kurang berkembang

Batik masa kolonial tidak bisa dilepaskan dari pengaruh orang Indo Belanda yang pernah menetap dan hidup di Banyumas. Nn.Willemse dan Ny.Matheron seorang Indo-Belanda yang meneruskan usaha batik Chatarina Carolina van Oosterom. Lewat Chatarina Carolina van Oosterom inilah orang Belanda di Banyumas mengenal dan menyukai batik Banyumasan yang lebih dikenal sebagai batik Belanda. Batik Belanda sebenarnya hanya meniru motif batik Banyumasan (Veldhuisen, 1993:13).

Masa kejayaan batik Banyumas terjadi pada tahun 1930 an. Setelah perang dunia kesatu, pembatikan mulai pula dikerjakan oleh Cina di samping mereka berdagang bahan batik. Perusahaan batik yang terkenal, terbesar, dan mengalami puncak kejayaan adalah perusahaan batik milik Kho Siang Kie. Perusahaan ini mampu membeli peralatan batik (canting dan pola) dari pembatik bangsawan yang bangkrut karena tidak ada regenerasi (Ariani, 2013:588).

Batik Banyumas identik dengan motif Jonasan, yaitu kelompok motif non geometrik yang didominasi dengan warna-warna dasar kecoklatan dan hitam. Warna coklat karena soga, sementara warna hitam karena *wedel*. Motif-motif yang berkembang sekarang ini antara lain: *Sekarsurya, Sidoluhur, Lumbon (Lumbu), Jahe Puger, Cempaka Mulya, Kawung Jenggot, Madu Bronto, Satria Busana, dan Pring Sedapur* (Wawancara dengan Ibu Yetty Gandasubrata, tanggal 17 April 2015 di Banyumas).

Corak batik di daerah baru ini disesuaikan pula dengan keadaan daerah sekitarnya. Sampai awal abad ke-XX proses pembatikan yang dikenal ialah batik tulis dengan bahan morinya buatan dalam negeri dan juga sebagian import. Setelah perang dunia kesatu baru dikenal pembikinan batik cap dan pemakaian obat-obat luar negeri buatan Jerman dan Inggris. Pada awal abad ke-XX sudah dikenal mori import dan obat-obat import baru dikenal sesudah perang dunia kesatu. Waktu krisis ekonomi pembatik-pembatik ikut lesu dan baru giat kembali sekitar tahun 1934 sampai permulaan perang dunia kedua.

Peran keluarga bupati juga sangat mendukung untuk perkembangan batik di Banyumas. Batik tetap eksis karena menjadi pakaian yang selalu dikenakan oleh masyarakat pada waktu itu. Batik terutama menjadi pakaian keseharian anggota keluarga Bupati Gandasubrata. Pejabat kolonial Belanda pun senang memakai batik seperti terlihat pada foto berikut ini.



Foto 17. Keluarga Pejabat Pabrik Gula Kalibagor Memakai Batik
(Repro Koleksi SoegengWijono)

Pangeran Aria Gandasubrata yang beristrikan *garwa padmi* bernama Raden Ayu Sri Sumiyati sangat berperan dalam mengembangkan batik. Raden Ayu Sri Sumiyati seperti pada umumnya perempuan ningrat pada zamannya, beliau pandai membatik. Ratmini (2011:68-69) menuliskan pengalaman berikutnya ini:

“Seperti perempuan ningrat sezamannya, Ibu Ageng (RA Sri Sumiyati) pandai membatik. Beliau membatik untuk keperluan sendiri, untuk suami dan keluarga besar. Pembantu rumah tangga diberi hadiah lebaran berupa batik. Di rumah selalu ada beberapa pengobeng (pembatik) yang sedang membatik. Kadang-kadang terdengar suara *plong-plong*, seorang pembantu memukul-mukul kain katun putih (mori) yang telah direndam ramuan minyak (ngemplong). Mula-mula Ibu Ageng meramu sendiri cat pencelup batikan dari bahan tumbuh-tumbuhan, tetapi kemudian dicelupkan pada perusahaan batik Kho Siang Kie di Kota Banyumas, memakai cat kimia.”

Kain batik hasil karya RA. Sri Sumiyati yang dicelupkan ke perusahaan batik Kho Siang Kie selalu diberi identitas dengan huruf SG (Sumiyati Gandasubrata). Sedangkan penuturan tentang pemakaian kain batik dalam keseharian dan pengenalan corak batik di kalangan keluarga bupati ditulis oleh Ratmini (2005) sebagai berikut:

“Ibu selalu berkain kebaya dan ayah juga suka memakai busana Jawa. Dari mereka saya belajar nama-nama ragam batik. Ketika saya berumur 15 tahun, saya diajari ibu cara berkain kebaya: mulai dari membuat sanggul; rambut saya dipanjangkan sejak umur 12 tahun; kemudian menggunakan kain dan membelitkan setagen keliling panggul sampai pinggang.

Pada jaman itu, anak perempuan bangsawan Jawa harus pandai membatik. Kepandaian membatik diperoleh dari keluarganya. Hasil karyanya kemudian dipakainya sendiri. Hal ini seperti dituturkan oleh Ratmini (2005) berikut ini:

“Kenangan saya pada eyang-eyang dan tante-tante bila berkunjung ke rumah mereka adalah bau khas lilin batik atau malam yang menyambut. Juga terdengar tiupan kecil pada corong canting untuk melancarkan aliran lilin. Selalu ada kain dalam berbagai taraf pembatikanyang digantung di gawangan kayu atau bambu. Saya mulai menaruh perhatian pada batik waktu masih sekolah, dan mulai belajar membatik waktu liburan. Mula-mula nerusi (membatik di bagian dalam kain), meneruskan yang telah dibatik di bagian luar. Kemudian saya pernah membuat taplak meja dan beberapa kain panjang.”

Pada jaman itu, anak perempuan Jawa harus pandai membatik. Kepandaian membatik diperoleh dari ibunya, Hasilnya digunakan untuk keperluan sendiri. Setiap rumah dari keluarga bupati Banyumas, terdapat bau khas lilin dan malam batik. Perempuan sedang membatik yang memperdengarkan tiupan kecil pada corong canting untuk melancarkan lilin. Kain yang dalam berbagai proses tahapan membatik tergantung di gawangan kayu atau bambu. Kisah Ratmini Soedjatmoko (2005) menceritakan asal mulanya bisa membatik:

“Saya mulai menaruh perhatian pada batik waktu masih sekolah, dan mulai belajar membatik waktu liburan. Mula-mula nerusi membatik di bagian dalam kain, meneruskan yang telah dibatik di bagian luar. Kemudian saya pernah membuat taplak meja dan beberapa kain panjang.”

Banyumas dikenal sebagai pusat batik dengan ragam hias batik mirip batik Yogyakarta dan Solo, dengan warna biru nila (indigo), warna sofa agak kemerah-merahan dan warna putih kekuningan. Kecintaan Pangeran Aria Gandasubrata terhadap batik diwujudkan dengan menciptakan ragam batik untuk dipakai beliau dan keturunannya. Ragam batik yang diciptakan dinamakan *Parang Gandasubrata* yang merupakan selingan *parang gandasuli* dengan *madu bronto*. *Gandasuli* adalah lambang keharuman nama dan *madu bronto* adalah lambang kasih sayang yang manis bagaimana madu. *Parang Gandasubrata* sering dikenakan oleh semua keturunan Pangeran Aria Gandasubrata dalam acara keluarga, misalnya among tamu upacara pernikahan. Sedangkan motif *parang* dipakai oleh Bupati Gandasubrata dalam acara-acara resmi. Motif *sidoluhung* dipakai oleh Ibu Ratmini Gandasubrata, salah seorang cucu Bupati Gandasubrata saat pernikahannya. Berikut merupakan foto-foto batik koleksi Keluarga Gandasubrata.



Foto 18. Motif Parang
(Foto Tim, tanggal 17 April 2015)



Foto 19. Motif Parang Gandasubrata
(Foto Tim, tanggal 17 April 2015)



Foto 20. Motif Ayam Puger
(Foto Tim, tanggal 17 April 2015)



Foto 21. Motif Kekayon
(Foto Tim, tanggal 17 April 2015)



Foto 22. Motif Sido Luhung
(Foto Tim, tanggal 17 April 2015)

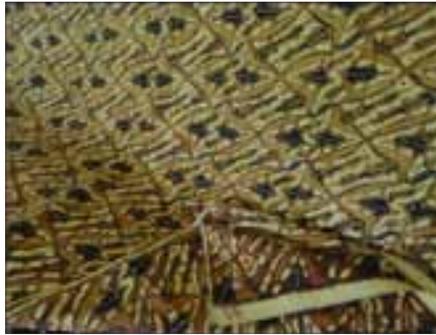


Foto 23. Motif Lumbon
(Foto Tim, tanggal 17 April 2015)

Menurut informasi dari Ibu Yetty Gandasubrata, batik Banyumasan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, penghargaan terhadap nilai demokrasi dan semangat kerakyatan. Nilai filosofis itulah yang kemudian tertuang dalam motif-motif batik yang khas seperti *Sekarsurya*, *Sidoluhung*, *Jahe Puger*, *Cempaka Mulya*, *Madu Bronto* dan *Satria Busana*. Dari segi warna, batik Banyumas cenderung lebih menyala dengan warna kemerahan, tidak seperti batik Jogja yang didominasi putih, atau Solo yang bernuansa keemasan.

Pada masa pendudukan Jepang, batik mengalami kevakuman karena kesulitan bahan baku. Mori (katun putih untuk membatik) hilang di pasaran. Mori mulai diimpor lagi pada tahun 1945. Pembatik mulai beraktivitas lagi. Golongan bangsawan menjadikan batik di samping digunakan untuk pribadi juga untuk diperjualbelikan untuk menambah penghasilan. Seperti yang dialami orang tua dari Ratmini Soedjatmoko (2005) berikut ini:

“Setelah ayah pindah ke Banyumas sekitar tahun 1947, ibu mulai membatik lagi. Ia juga menerima pesanan karena ayah sudah pensiun dan perlu tambahan agar dapur tetap mengepul. Untuk mengisi waktu iseng setelah pensiun, ayah mulai mendesain batik. Mula-mula untuk diri sendiri, kemudian juga untuk memenuhi pesanan. Sudah tentu yang membatik adalah ibu.”

D. Kesenian

1. Calung dan Gamelan

Menurut sejarahnya calung dibuat pertamakali oleh Kyai Nurdaiman pada tahun 1755. Kyai Nurdaiman merupakan tokoh agama Islam yang sedang berdakwah di daerah Banyumas. Kyai Nurdaiman dalam rangka mengumpulkan orang ketika peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW menciptakan instrumen calung. Instrumen terbuat dari bambu wulung yang dibelah dan dipotong-potong sepanjang 30 cm. Potongan belahan bambu ini diselaraskan sehingga menghasilkan bunyi dan nada yang merdu. Instrumen tersebut dibunyikan dengan cara diletakkan di atas kaki penabuh yang membujur. Calung pada tahun 1900an mengalami perkembangan ketika diminta pentas di pendapa Kabupaten Banyumas. Potongan bambu yang semula diletakkan di atas kaki kemudian diletakkan pada sandaran bambu. Semenjak dipentaskan di pendapa kabupaten, calung semakin dikenal masyarakat Banyumas. Perkembangan selanjutnya banyak warga masyarakat Banyumas yang meniru membuat alat instrumen ini (Koderi, 1991:60-61).

Adapun calung menurut Serat Centini merupakan perangkat musik tradisional Banyumasan yang terbuat dari bambu wulung. Kata calung berasal dari *jarwo dhosok* bahasa Jawa, yang terdiri dari dua kata yaitu *carang* (bambu) dan *lung* yang menggambarkan suara bambu dipukul berkali-kali. Perangkat musik calung terdiri atas *gambang barung*, *gambang penerus*, *slenthem*, *gong bambu*, dan *kendang*. Musik calung digunakan untuk mengiringi tari-tarian seperti gambyong Banyumasan disertai sinden. Di samping itu, musik calung dapat menyajikan aneka gending-gending Surakarta, Yogyakarta, dan Pasundan (Java Instituut, 1935:216).



Foto 24. Pertunjukan Calung

(Repro: Java Instituut, 1935:halaman antara 204-205)

Gamelan Jawa sering digunakan untuk mengiringi pertunjukan kesenian di kabupaten. Gamelan peninggalan leluhur Gandasubrata dipakai untuk mengiringi pertunjukan kesenian di pendapa kabupaten. Salah satunya seperti tampak dalam foto 26 berikut yang digunakan untuk mengiringi tarian saat peresmian pendapa Si Panji pada tahun 1937 di Purwokerto. Gamelan tersebut angka tahunnya bermacam-macam yang bisa dilihat pada tulisan pada perangkat gamelan tersebut. Gamelan tersebut ada yang berangka tahun 1829, dan tersimpan di *Dalem Pangeranan*.



Foto 25. Koleksi Gamelan Milik Keluarga Bupati Gandasubrata

(Foto Tim, tanggal 16 April 2015)



Foto 26. Tarian Jawa Dalam Peresmian Pendapa Si Panji Tahun 1937
(Repro Koleksi Soegeng Wijono)

2. Wayang Kulit Gagrag Banyumasan

Bupati Gandasubrata dan keluarga sangat memperhatikan kesenian Jawa, terutama gamelan dan wayang. Menurut Ratmini (2005) dipaparkan bahwa Sudirman, ayahnya, menyukai gamelan dan wayang. Lebih lanjut dia mengatakan demikian:

“Waktu kami tinggal di Magelang, dia membeli perangkat wayang dan gamelan. Wayang agak jarang dipakai, tetapi ia membentuk kelompok musik gamelan waktu di Banjarnegara dan Banyumas.”

Saat liburan panjang para pelajar atau mahasiswa yang berasal dari Kota Banyumas mudik sehingga kota Banyumas menjadi ramai. Para pelajar dan mahasiswa mendirikan *Banyumase Vacantie Bond* atau Ikatan Liburan Banyumas untuk mengisi liburan panjang mengadakan berbagai acara. Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain pertandingan olah raga, darmawisata, pembacaan syair, lawak, dan pertunjukan kesenian diadakan di pendapa kabupaten (Purwoto Suhadi Gandasubrata, 2003:7).

Pertunjukan wayang di Banyumas mempunyai ciri khas tersendiri yang kemudian dikenal sebagai wayang kulit gagrag Banyumasan. Wayang kulit gagrag Banyumasan merupakan salah satu gaya pedalangan di tanah Jawa, yang lebih dikenal dengan istilah pakeliran. Pakeliran ini mencakup unsur-unsur yaitu, lakon wayang (penyajian alur cerita dan maknanya), *sabet* (seluruh gerak wayang), *catur* (narasi dan cakapan), karawitan (gendhing, *sulukan* dan properti panggung) (Wawancara dengan Ahmad Tohari tanggal 15 April 2015 di Banyumas).

Pakeliran gagrag Banyumasan mempunyai nuansa kerakyatan yang kental sebagaimana karakter masyarakatnya, jujur dan terus terang. Wayang gagrag Banyumas hidup dan berkembang di daerah eks Karesidenan Banyumas. Wayang gagrag Banyumas bersifat ekspresif dan lebih bebas, sederhana, serta lugas sehingga mampu bertahan sampai saat ini dalam menghadapi perubahan zaman, karena memperoleh simpati dan dicintai masyarakatnya (Wawancara dengan Ahmad Tohari tanggal 15 April 2015 di Banyumas).

Pedalangan Gagrag Banyumasan memperoleh pengaruh serta memiliki tatanan atau pakem dari seni pedalangan Surakarta dan Yogyakarta, akan tetapi mempunyai ciri khas tersendiri dengan penokohan Bawor dengan lagu Kembang Lembang serta Gendhing Banyumasan (Wawancara dengan Ahmad Tohari tanggal 15 April 2015 di Banyumas, lihat Koderi, 1991:67).

Seperti juga seni pedalangan Indonesia yang lain, berkembang semenjak pengaruh Hindu, dengan berdirinya Mataram Hindu dengan serat Ramayana, era 898 M dalam bahasa Sansekerta dengan pengaruh India yang kuat, kemudian berkembang sejalan dengan penggunaan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Seni pedalangan memasuki zaman keemasan pada era Kediri (1042-1222) dalam pemerintahan Raja Jayabaya (1135-1157), berkembangnya penulisan dan karya sastra seperti serat Bharatayuda, serat Hariwangsa, serat Gathutkacasraya oleh Mpu Panuluh dan Wayang Purwa yang merupakan cikal bakal dan perkembangan seni pedalangan di Nusantara (Sekretariat Nasional Pewayang Indonesia "Sena Wangi", 1983:4-5).

Pengaruh kuat lainnya pada pedalangan Banyumasan, yaitu pada zaman kesultanan Demak (1478-1546), kemudian Kesultanan Pajang (1546–1587), sampai dengan pengaruh Mataram pada zaman Plered (1645-1677) era Amangkurat Tegalarum yang secara khusus mempunyai perhatian besar untuk Karesidenan Banyumas, dan mengutus dalang Ki Lebdajiwa ke Ajibarang, untuk lebih mengembangkan seni pedalangan Gagrag Banyumasan (Sekretariat Nasional Pewayang Indonesia "Sena Wangi", 1983: 5-7).

"Inggang wigati tumrap tuwuh saha ngrembakanipun seni pedhalangan gagrag Banyumas ing jaman Pajang, inggih puniko wiwit lumebetipun basa Jawi "wetanan" ingkap tumrap para sedherek Banyumas dipun sebat "basa bandhek" (basaning gandhek) jalaran ingkangnyebar basa puniko para gandhek (duta utawi utusan saking Pajang). Basa bandhek nembe saged ngrembaka saestu ing jagading pewayangan ing taun 1920-an, nalika pamrentah walandi nglebetaken pasinaon basa Jawi wetanan ing pamulangan dasar." (Sekretariat Nasional Pewayang Indonesia "Sena Wangi", 1983:9).

Pengaruh Gagrag Mataram (Surakarta dan Yogyakarta) lebih kuat, terutama melalui kawasan pesisir kidul, dan dikenal dengan seni pedalangan Banyumas pesisiran atau Gagrag Kidul Gunung, pengaruhnya dapat diketahui sampai dengan kisaran tahun 1920, dan terus berkembang melalui dalang trah Gombang, yaitu Ki Cerma yang dikenal sebagai Ki Dhalang Menganti (Sekretariat Nasional Pewayang Indonesia "Sena Wangi", 1983: 10).

"Ing bab cawuh manunggalipun gagrag Mataram –Surakarta-Yogyakarta-Kedu ingkang nuwuhaken seni pedalangan gagrag Banyumas Pasisiran ing kiwa tengenipun taun 1920-an, salah satunggalipun dhalang ing Menganti tlatah Gombang, inggih puniko Ki Cerma, ingkang ugi kawentar nama Ki Dhalang Menganti, kathah daya pengaruh saha lelabetanipun dhateng seni pedhalangan Banyumas kala semanten." (Sekretariat Nasional Pewayang Indonesia "Sena Wangi", 1983:10).

Sedangkan kawasan depan Banyumas (dari Purbalingga kemudian menyusuri Sungai Serayu, menuju ke arah Barat), mempunyai pakeliran tersendiri dan dikenal dengan Gagrag Lor Gunung, seperti berkembang melalui dalang trah Kesugihan (aslinya dari pengembangan pesisiran) diantaranya Ki Dalang Tutur, dan terus berkembang sampai dengan

era Ki Dalang Parsa, Ki Dalang Sugih. Akan tetapi yang cenderung tidak terpengaruh dalang pesisiran adalah Ki Dalang Waryan dari Kalimantan. Sehingga sampai sekarang tetap dikenal dan lestari seni tradisional yaitu, Pedalangan Gagrag Banyumasan Kidul Gunung dan Pedalangan Gagrag Banyumasan Lor Gunung (Redi Kendeng) (Wawancara dengan Kasirun, tanggal 13 April 2015 di Banyumas).

Dalam Wayang Gagrag Banyumasan mempunyai ciri khas dalam penceritaan yang lebih memperjelas peran rakyat kecil yang dimanifestasikan dalam tokoh punakawan seperti cerita Bawor Dadi Ratu, Petruk Krama dan lain-lain selain itu pula wayang Gagrag Banyumasan lebih menonjolkan peran para muda dalam penyelesaian kasus-kasus dan permasalahan. Cerita Srikandi Mbarang Lengger' yang merupakan terusan lakon Srenggini Takon Rama adalah salah satu contoh kongkrit bahwa peran pemuda seperti Antasena dan Wisanggeni menjadi sangat sentral (Wawancara dengan Kasirun tanggal 13 April 2015 di Banyumas).

Malam hari sesudah resepsi pelantikan Bupati Banyumas oleh Gubernur Jawa Tengah dengan segala upacara dan adat istiadat kebesaran Jawa, diadakan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk di pendopo Kabupaten Banyumas (Purwoto Suhadi Gandasubrata, 2003:5). Pringgitan biasa dipakai untuk pertunjukan wayang kulit lengkap dengan seperangkat gamelan pusaka Bupati Banyumas (Purwoto Suhadi Gandasubrata, 2003:7).

3. Lengger

Lengger atau *ronggeng* merupakan kesenian yang melekat dengan budaya Banyumas. Mengenai bagaimana penari *lengger* atau *ronggeng* ini oleh Thomas Stamford Raffles dalam karyanya yang berjudul *The History of Java* dikatakan bahwa *ronggeng* merupakan gadis penari yang tidak jarang juga menjual jasa seksual dalam layanan mereka. Penari *ronggeng* digambarkan tidak mempedulikan moral dan nyanyiannya "kasar dan aneh", sehingga dianggap jijik oleh bangsa Eropa. Namun, kesenian ini selalu disukai dan disambut riuh tepukan dan tawa penonton pribumi lokal (Raffles, 1817: 342-344).

Saat banjir bandang meluapnya Sungai Serayu melanda Banyumas pada tahun 1861, Raden Tumenggung Cakranegara I ditolong oleh Raden Dewa Kusuma. Raden Dewa Kusuma merupakan penguasa pemerintahan Distrik Sokaraja yang beristrikan Nyai Sekargadung. Nyai Sekargadung merupakan seorang seniman yang mengetuai kelompok lengger. Kelompok *lengger* ini mempunyai penari yang bernama Sari. Nyai Sekargadung menciptakan *tembang* dan *gending* yang dinyanyikan lengger Sari yaitu “*Gunung Sari*”, “*Eling-Eling*”, dan “*Gudril*” (Pudjianto Budoyonegoro, 2009:1-3).

Kedekatan petani dan lengger tidak bisa dilepaskan dari keyakinan bahwa tarian itu awalnya adalah ritual pemujaan yang berkaitan dengan kesuburan tanah dan keberhasilan panen. Petikan wawancara dengan budayawan Banyumas berikut ini menggambarkan bahwa lengger Banyumas sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan awalnya merupakan ritus pemujaan terhadap dewi kesuburan.

“Dari pengetahuan-pengetahuan yang saya peroleh, kesenian lengger sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu tadinya sebetulnya merupakan ritus pemujaan terhadap dewi kesuburan yang awalnya berkembang di India Selatan, kemudian karena waktu itu pengaruh India berkembang pesat sekali, maka ritus pemujaan tadi merambah juga ke seluruh Indonesia, dengan nama yang berbeda-beda, misalnya di Jawa Barat disebut *ronggeng*, di Betawi disebut *cokekan*, di Karawang disebut *dombret*, di Banyumas disebut *lengger*, dan di Jawa Tengah lainnya disebut *tayub*...”⁶

Beberapa legenda dan mitos menceritakan bagaimana ritual tarian *tayuban* dilakukan oleh sekelompok laki-laki untuk menghormati Dewi Sri. Keberadaan *lengger* dimaksudkan untuk menghormati Dewi Sri dalam prosesi penanaman padi. Penarinya laki-laki yang berdandan sebagai perempuan. Penari *lengger* ketika menari kerasukan *roh indhang*. Penari *lengger* mempunyai posisi yang terhormat dalam masyarakat. Masyarakat meminta berkah kepada penari *lengger*. Pandangan terhadap *lengger* mengalami perubahan dari menghormati Dewi Sri menjadi sarana hiburan. *Lengger* ditarikan seorang perempuan. *Lengger* masuk di kalangan priyayi dan penguasa kolonial, berubah tidak lagi sebagai media penghormatan namun sebagai sarana hiburan yang cenderung melekat dengan pemenuhan nafsu seksualitas laki-laki.

6 Wawancara dengan Bapak Ahmad Tohari pada tanggal 15 April 2015 di Jatilawang Banyumas

Namun, *lengger* tetap dipandang sebagai perempuan yang diberkahi, karena mereka masih sering diminta berkahnya untuk anak-anak kecil (Wawancara dengan Bapak Ahmad Tohari tanggal 15 April 2015 di Banyumas).



Foto 27. Ronggeng atau Tarian Wanita Menurut Raffles
(Repro: *The History of Java*, 2014:237)

Istilah *lengger* sampai saat ini masih dalam perdebatan para pakar kesenian di Indonesia. Ada yang mengatakan *lengger* adalah nama lokal Banyumas untuk tarian yang biasanya disebut *ronggeng*. Dalam budaya Bagelen para penari *teledhek* disebut *ronggeng*. Seorang penari *ronggeng* sudah mulai menari sejak berusia antara delapan sampai sepuluh tahun. Seorang penari anak-anak seperti itu biasanya adalah anak gadis ketua rombongan tersebut dan ia menarikan tarian teledhek serta menyanyikan nyanyian anak-anak (*dolanan lare*). Rakyat di daerah Bagelen menyebut penari *ronggeng* yang masih anak-anak itu dengan sebutan *lengger*. Seorang *lengger* belum tentu menjadi seorang *ronggeng* bila ia dewasa, akan tetapi sebaliknya seorang *ronggeng* biasanya berasal dari *lengger* (Koentjaraningrat, 1994: 221).

Berbeda dengan pendapat Koentjaraningrat, pendapat lain mengatakan bahwa *lengger* merupakan akronim dari *leng* dan *ngger*.

Dikiranya para penari itu adalah *leng* (lubang) artinya wanita, ternyata *jengger* (terjulur) artinya pria (Koderi, 1991: 60).

Kesenian sejenis *lengger* banyak dijumpai di daerah lain misalnya *ronggeng* di Tasikmalaya dan *tayub* di Jawa Tengah. Ada dua makna arti kata *lengger* dan *ronggeng* bagi masyarakat Banyumas. Seperti telah disebutkan di atas bahwa kata *lengger* ada yang mengartikan singkatan kata dari *leng* atau lubang dan *ger* dari kata *jengger*, maksudnya tempat laki-laki melakukan persetubuhan. Makna tersebut tidak berbeda jauh dari arti *ronggeng*, yaitu *rong* yang artinya lubang dan *geng* yang artinya *ketunggeng* atau tempat di mana laki-laki melakukan persetubuhan. Ada juga yang mengartikan *lengger* sebagai *leng* berarti lubang dan *jengger* lambang kejantanan, yang kemudian diartikan sebagai “*dikira leng ning jengger*” (*dikira* lubang tetapi *jengger*), artinya dikira perempuan ternyata laki-laki (lihat Sunaryadi, 2000: 32, dan wawancara dengan Ahmad Tohari pada tanggal 15 April 2015 di Banyumas).

Istilah “*dikira leng ning jengger*” menunjuk pada penari *lengger* laki-laki. Ada pendapat bahwa sebelum tahun 1918, *lengger* ditarikan oleh laki-laki. Penari *lengger* wanita mulai ada sejak tahun 1918. Pergeseran penari *lengger* laki-laki menjadi wanita, karena semakin sulitnya menemukan anak laki-laki yang memiliki kemampuan untuk menjadi penari *lengger*. Di samping itu, sosok wanita dianggap lebih luwes dan memiliki daya tarik sensual bagi penonton (Sunaryadi 2000: 38-39).

Pertunjukan kesenian *lengger* pada zaman dulu dilakukan dalam waktu semalam suntuk dengan penari laki-laki. Penari *lengger* menari sambil menyanyi atau *nyinden*, diiringi oleh gamelan calung, sehingga sering disebut *lengger* calung. Di dalam pertunjukan *lengger* terdapat kekuatan gaib yang merasuk dalam tubuh penari sehingga penari memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan penari-penari lainnya. Kekuatan gaib yang merasuki penari tersebut disebut *indhang*.

Keberadaan *indhang* sangat terlihat melalui para penari yang sedang menari dan menyanyi (*nembang*) pada babak awal yaitu *gambyongan* dan pada babak *ebeg-ebegan*. Pada babak *gambyongan*

penari akan sanggup menari selama berjam-jam tanpa lelah atau tariannya kelihatan indah dan erotis, serta memiliki daya tarik yang luar biasa. Pada babak *ebeg-ebegan*, penari yang telah kerasukan *indhang* akan mencapai keadaan *trance* yang membuatnya mampu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Hal tersebut misalnya: menari dan menyanyi dengan kekuatan yang lebih, memakan pecahan kaca tanpa terluka, memegang bara api tanpa terbakar, makan arang, makan bunga/kembang, kemenyan dan lain sebagainya. Kekuatan *indhang* juga diaktualisasikan dalam syair tembang yang lebih tepat disebut “mantra”. Mantra berfungsi untuk mendatangkan atau mengundang *indhang*.

Pada awalnya kesenian *lengger* digunakan dalam upacara desa sebagai alat untuk menghadirkan para dewa yang dapat membantu para petani menghasilkan panen yang baik. Gerakan-gerakan tarian *lengger* yang erotis sekaligus menyimbolkan perkawinan para dewa yang berbuah pada panen yang melimpah, sehingga orang yang tidak mengetahui latar belakang tarian ini akan memandang atau menilai bahwa tarian ini sebagai tarian yang seronok. Pada tahap selanjutnya manusia menyadari bahwa dunia tidak sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan gaib. Manusia adalah penguasa dunianya. Keberhasilan panen tidak tergantung kepada para dewa, tetapi tergantung pada kegiatan manusia. Masyarakat menyadari bahwa panen merupakan berkah dari yang Maha Kuasa, diiringi usaha manusia. Kesenian *lengger* pun berubah fungsi dari sakral untuk mendatangkan para dewa menjadi alat sosial masyarakat desa, yaitu untuk bersyukur atas keberhasilan panen. Bahkan, selanjutnya bergeser menjadi tarian profan, yaitu sekedar sebagai hiburan atau tontonan.

Meskipun kesenian *lengger* sudah bergeser menjadi sarana hiburan, tetapi di dalamnya juga masih terdapat keyakinan atau kepercayaan tertentu. Di dalam kesenian ini masih terdapat unsur-unsur yang mistis. Unsur mistis yang dimaksud adalah keyakinan adanya roh halus yang merasuk dalam diri penari yang disebut *indhang*.

Menurut wawancara dengan Bapak Ahmad Tohari, *lengger* yang berkembang di masyarakat memakai iringan calung sehingga dinamakan *lengger calung*. Sebagai penari *lengger*, seorang *ronggeng*

memang dituntut untuk memiliki keluwesan dan daya pikat yang mempesona, biasanya para perempuan yang beranjak remaja pada kisaran usia belasan tahun. Untuk menjadi seorang *lengger* terdapat beberapa macam syarat yang harus dipenuhi oleh para calon penari. Proses ini disebut *nguntil* dan orang yang melakukannya disebut *unthul*. Seorang calon *ronggeng* dapat diketahui sejak dirinya masih anak-anak, mereka biasanya mampu menyanyi dan menari melebihi kemampuan anak-anak pada umumnya. Masyarakat meyakini bahwa anak tersebut dimasuki oleh *indhang* atau roh *lengger* dan digariskan untuk menjadi *ronggeng* atau penari *lengger*.

Keterkaitan *indhang* pada *lengger* akan membuat para *lengger* memiliki keterampilan, kemampuan, dan daya tarik tinggi serta mempesona pada saat berpentas di depan khalayak. *Indhang* ini tidak mudah dan tidak datang begitu saja, tetapi diperoleh dengan cara “laku” atau bertapa dan prihatin. Mereka menganggap kedatangan *indhang* dalam kesenian *lengger* sangat berarti bagi penari, karena akan membawa berkah, rizki, pamor, dan dapat mengobati orang yang sakit. Kedatangan *indang* ditandai dengan adanya *trance* atau kesurupan (Wawancara dengan Ahmad Tohari tanggal 15 April 2015 di Banyumas).

Untuk menjadi seorang penari *lengger*, pada tahap pertama para calon *ronggeng* harus melakukan *laku*, atau perilaku khusus untuk mendapatkan sesuatu yang khusus dalam ritus Jawa, yaitu *topo broto* dan *topo ngrame*. *Topo Broto* adalah kegiatan prihatin, *ngasrep* atau mengurangi garam dan mengurangi makan. Hal ini ditujukan agar para *ronggeng* dapat terasah mentalnya dan menambah kepercayaan diri *ronggeng*. Adapun *topo ngrame* adalah kegiatan latihan menari yang dilakukan oleh para calon penari *lengger*. Tahap kedua adalah tahap dimana para *unthul* atau calon *ronggeng* mandi ditujuh sendang di dalam hutan di malam bulan purnama. Ditujukan agar *indhang* yang dimiliki oleh para *unthul* dapat memberikan kekuatan supranatural. Ritus ketiga adalah mandi di sumur keramat yang diyakini dapat memberikan aura cantik kepada para *unthul* (Wawancara dengan Ahmad Tohari tanggal 15 April 2015 di Banyumas).

Ritual puncak dari seorang calon ronggeng adalah upacara *gladhen* atau penobatan, yang dilaksanakan pada waktu malam Jum'at Kliwon dengan menyediakan *sajen* seperti *cemara*, kaca pengilon, minyak wangi, tembakau, rokok, bedak dan lampu *senthir*. *Gladen* diawali dengan acara *bukak kusan*, yaitu menutupi wajah ronggeng dengan *kukusan* atau alat untuk menanak nasi. Hal ini menyimbolkan bahwa dibuanglah rasa malu dari *ronggeng* agar dapat bebas berekspresi ketika dalam pertunjukan. Pada pelaksanaan *gladhen* ini diiringi oleh *gendhing* Banyumasan, *sekar gadhung* dan *eling-eling* (Wawancara dengan Ahmad Tohari tanggal 15 April 2015 di Banyumas).

Tahap yang dilakukan para *lengger* di daerah Jatilawang, yang diyakini sebagai tempat lahirnya para penari *lengger* atau *ronggeng*. *Topo broto*, *topo ngrame*, *gladhen* dan *bukak kusan* masih sering dijalankan di wilayah Banyumas. Setelah ritual-ritual tersebut dilakukan barulah sang *ronggeng* melakukan proses *midhang* yang maksudnya melakukan proses tujuh pertunjukan. *Midhang* ini menyimbolkan telah sahnya seorang *unthul* menjadi *ronggeng* dan mulai menjalani kehidupan dalam dunia *lengger*. Hal ini diharapkan agar para *ronggeng* atau penari *lengger* ini mampu mempromosikan dirinya dan meminta restu dari para warga sekitar (Wawancara dengan Ahmad Tohari tanggal 15 April 2015 di Banyumas).

Dalam beberapa pendapat terdapat tahap *bukak klambu*, istilah ini terkenal sejak novel Ahmad Tohari diterbitkan. Calon *ronggeng* harus menjalani ritual *bukak klambu*, yaitu menyerahkan keperawanannya pada lelaki yang memberi imbalan paling mahal. Tradisi *bukak klambu* menyimbolkan makna bertemunya *lingga* dan *yoni*, yang mewakili simbol kesuburan (Sunaryadi 2000:53). *Ronggeng* melambangkan sisi magis, kesucian, dan nafsu. Syarat pokok calon *ronggeng* harus pandai menari dan menyanyi. *Lelaku* dengan berpuasa dan mengunjungi beberapa pemakaman leluhur menjadi ritual yang harus dijalani calon *ronggeng*.



Foto 28. Penari Ronggeng Dengan Iringan gamelan Tahun 1870-1900.
(Repro: Koleksi KITLV Digital/ Tropenmuseum)



Foto 29. Penari Ronggeng
(Repro Cover Novel Ronggeng Dukuh Paruk)

Lengger sebagai sarana hiburan ketika masa Bupati Gandasubrata sudah masuk ke kehidupan bangsawan. *Lengger* sering ditanggap keluarga Gandasubrata untuk dipentaskan di pendapa kabupaten. *Lengger* ketika ada perjamuan di pendapa kabupaten dipentaskan

berdampingan dengan tarian dansa Eropa. Pembesar Eropa menyajikan dansa sedangkan pembesar pribumi di Banyumas menyajikan *lengger*. Di samping *lengger*, di pendapa kabupaten juga dipentaskan tarian *srimpi*, *gambyong*, dan *gambiranom*. Semua tarian tersebut merupakan pengaruh dari Surakarta. Tembang *lengger* hampir semuanya terpengaruh dialek Surakarta, kecuali pada parikan *lengger* (Wawancara dengan Bapak Ahmad Tohari tanggal 15 April 2015 di Banyumas).

Lengger yang pentas di rumah priyayi dengan iringan gamelan, sedangkan yang pentas di rumah penduduk menggunakan calung. Penari *lengger* merasa lebih mulia daripada perempuan lain karena merasa mewakili dewi kesuburan dan merasa tidak bersalah meskipun harus melayani banyak lelaki. Ada petuah yang berlaku di masyarakat waktu itu yang terkait dengan kehidupan penari *lengger*. Ketika ada seorang istri yang melahirkan sebelum masa 100 hari, pasangan suami istri tersebut diberi petuah: untuk perempuan jangan makanan bakaran singkong, sedang untuk laki-laki, awas jangan menggauli istrimu dulu, sana cari penari *lengger* (Wawancara dengan Bapak Ahmad Tohari tanggal 15 April 2015 di Banyumas).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kehidupan ekonomi dan budaya di Banyumas mengawali era baru sejak Banyumas dieksploitasi pihak kolonial. Pada akhir abad 19 sampai awal abad 20, pemerintah kolonial Belanda mulai melaksanakan eksploitasi ekonomi dan penetrasi kekuasaan yang luas. Pembukaan beberapa jenis perkebunan yang secara langsung dikontrol oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan penanaman wajib itu, diutamakan jenis tanaman yang dapat menghasilkan barang-barang komoditi ekspor bagi pasaran Eropa. Agar dapat memperoleh keuntungan maksimal, usaha itu dilakukan secara besar-besaran dengan menggunakan tanah pertanian dan tenaga penduduk.

Keberhasilan pemerintah kolonial dalam meningkatkan pelaksanaan perekonomian disebabkan oleh kemampuannya dalam mempelajari dan memahami serta memanfaatkan lembaga-lembaga pribumi. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, baik perkebunan tebu maupun industri gula menggunakan jalur-jalur wewenang tradisional di daerah pedesaan.

Perubahan bentuk kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan Jawa dipengaruhi oleh hubungan masyarakat petani dengan jaringan masyarakat yang lebih luas. Adanya jalinan hubungan masyarakat pedesaan dengan jaringan masyarakat yang lebih luas itu dapat memperlebar jaringan hubungan sosial mereka yang pada gilirannya

menyebabkan berlangsungnya proses perubahan sosial-ekonomi dan budaya dalam masyarakat pedesaan.

Proses perubahan dalam masyarakat mendorong terjadinya berbagai persoalan baru. Hal ini merupakan konsekuensi dari suatu perubahan ekonomi yang sedang berlangsung. Munculnya kebebasan individu yang semakin meluas di dalam masyarakat bahkan muncul gerakan perkembangan budaya baik itu berupa perubahan gaya hidup, perkembangan arsitektur maupun atraksi budaya.

Arsitektur bangunan kabupaten sebagai produk budaya berupa sebuah kompleks sebagai miniatur dari istana kerajaan. Di Kabupaten Banyumas, kompleks bangunan kabupaten terdiri dari pendapa, *pringgitan*, dilengkapi pula dengan alun-alun dan beringin kurung serta masjid agung. Alun-alun dan beringin kurung merupakan simbol dari *keagungbinatharaan*, yang menunjukkan pemerintahan yang tinggi dan berwibawa bagi pemerintah lokal yang bersangkutan. Kedudukan bangunan masjid agung bagi pemerintah lokal dipandang sebagai simbol kekuasaan di bidang keagamaan.

Bagi Bupati Banyumas, otonomi daerah bukan hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dalam masalah pewarisan kedudukan bupati kepada keturunannya atau suksesi. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai tradisi yang dibangun sendiri oleh para bupati secara turun temurun. Seorang bupati yang berkuasa selalu berupaya untuk menyiapkan calon penggantinya.

Ketika Kabupaten Banyumas menjadi karesidenan, maka legitimasi kekuasaan lokal, simbol-simbol kekuasaan, ataupun aturan-aturan suksesi tradisional lainnya dipertahankan dengan beberapa modifikasi. Hal ini mengingat fungsi penguasa tradisional tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan eksploitasi kolonial di daerah itu. Dalam ketentuan yang diatur oleh pemerintah kolonial, secara administratif mengikuti sistem dua jalur. Pertama untuk Pamong Praja Belanda, terdiri dari *gewest*, *afdeeling* dan *onderafdeeling*. Kedua, untuk jabatan Pamong Praja Indonesia (pribumi), yaitu *regentschap* (kabupaten), *district* (kawedanan), dan *onderdistrict* (kecamatan).

Dengan demikian, bupati merupakan jabatan puncak bagi birokrasi pribumi. Tugas utamanya, di samping melaksanakan pemerintah

langsung kepada penduduk di bawah kekuasaannya, juga menduduki Ketua Dewan Kabupaten (*regentschapsraad*). Dalam jabatannya itu digunakan juga simbol budaya tertentu, seperti wewenang menggunakan gelar tumenggung dan hak memakai *songsong* (payung) berwarna putih dan separuh hijau dengan tiga strip pinggiran berwarna kuning emas.

Dengan simbol-simbol itu, bupati tetap berfungsi sebagai penguasa pribumi yang mempunyai martabat tinggi di lingkungan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan begitu besar peran bupati dalam mewujudkan stabilitas di wilayah kekuasaannya dan yang lebih penting adalah merupakan media penghubung antara para pejabat kolonial dengan rakyat jelata di lingkungan kekuasaannya. Oleh karena itu peranan bupati sebagai agen perubahan di wilayahnya sangat penting untuk menentukan baik itu berupa pemekaran wilayah, perkembangan sosial ekonomi dan budaya pada waktu itu.

Bupati Banyumas menjadi tokoh yang penting dalam mengembangkan perekonomian wilayahnya. Usaha-usaha untuk memajukan ekonomi dan keberhasilan yang didapat mendukung terjadinya perubahan budaya yang terjadi di Banyumas. Perkembangan budaya khususnya kesenian, dilakukan dengan diberinya tempat dan sarana untuk berekspresi. Pertunjukan wayang yang memerlukan biaya mahal tidak terlalu sering dipertunjukkan. Wayang hanya dipertunjukkan saat atau moment peristiwa yang besar terutama terkait dengan penguasa atau bupati.

Di samping itu kontak antara kedua pendukung kebudayaan menjadikan penguasa pribumi terbuka menerima budaya baru yang datang dari barat (bangsa Eropa). Kehidupan bupati sudah terpengaruh budaya bangsa Eropa. Tempat tinggal, barang-barang di dalamnya, sarana transportasi, bahasa, dan pakaian. Demikian juga di kalangan bawah terutama yang ekonominya mapan, cara berpakaian, mencari hiburan dan rekreasi, dan barang-barang koleksi, dan sarana penunjang lainnya berusaha mengikuti trend yang sedang berkembang. Kehidupan budaya di kalangan bawah tetap terpelihara, terutama yang berkaitan dengan kesenian yaitu *lengger* dan *ebeg*.

Penelitian ini belum mampu menjelaskan hubungan timbal balik, pengaruh ekonomi terhadap perkembangan kebudayaan karena bukti-bukti yang tidak mencukupi. Namun, ada indikasi dari bukti-bukti yang ada bahwa Ganasubrata mendapat banyak dana dari perkembangan ekonomi itu, misalnya: kewajiban-kewajiban pabrik gula untuk menyetor uang ke kas pemerintah Banyumas. Kemungkinan besar bahwa dana-dana tersebut menjadi sumber utama pembangunan di bidang kebudayaan. Namun, untuk memastikannya diperlukan penelitian lebih lanjut.

B. Saran

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut guna mengungkap hubungan timbal balik antara ekonomi dan kebudayaan di masa Bupati Ganasubrata.
2. Pemerintah Daerah Banyumas diharapkan memiliki perhatian dan mendukung kebijakan yang mengedepankan revitalisasi bangunan dan kawasan cagar budaya di wilayah Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP KOLEKSI BADAN ARSIP DAERAH BANYUMAS HASIL FOTOKOPI MILIK ANRI

- Arsip Banjoemas 20. ANRI
- Arsip Banjoemas 20.1. ANRI
- Arsip Banjoemas 104/56. ANRI
- Arsip Banjoemas 105/56. ANRI
- Arsip Banjoemas 107/56. ANRI
- Arsip Banjoemas 108. ANRI
- Arsip Banjoemas 109/56. ANRI
- Arsip Banjoemas 122/56. ANRI
- Arsip Banjoemas 11.4. ANRI
- Arsip Banjoemas 64. ANRI.
- Arsip Banjoemas, 11.40. ANRI.
- Arsip Banjoemas No. 2233. ANRI.
- Arsip Banjoemas No. 13.5. ANRI.
- Arsip Banjoemas No. 19.4. ANRI.
- Arsip Banjoemas No. 18.1. ANRI.
- Arsip Banjoemas No. 10.4. ANRI.
- Arip Banjoemas No. 20.16. ANRI
- Arsip Medica No. 21
- Besluit Gubernur General, 1830
- Memorie van Overgave Resident Banjoemas, 1922
- Memorie van Overgave Resident Banjoemas, 1925
- Memorie van Overgave Resident Banjoemas, 1927
- Memorie van Overgave Resident Banjoemas, 1928

Memorie van Overgave, 1932.

Memorie van Overgave Resident Banjoemas, 1933.

Resolusi, 22 Agustus 1931, No. 1, ANRI

TERBITAN RESMI TERCETAK

Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848, Terbitan tahun 1973.

Koloniaal Verslag 1905

Koloniaal Verslag 1917

Memori Serah Jabatan Jawa Tengah, 1921 – 1930, Terbitan tahun 1977.

Memori Serah Jabatan 1930

Staatsblad 1934

SURAT KABAR

Oetusan Indonesia, 3 Mei 1933

BUKU-BUKU / MAJALAH / JURNAL :

Ariani, Christiyati,

2013 “Simbol, Makna, dan Nilai Filosofis Batik Banyumasan”, dalam *Patrawidya*, Vol. 14 No. 3, September 2013, hlm. 577-614.

Atmadja, Sukarta

1989 *Sekitar Hari Jadi Kabupaten Banyumas*. Banyumas.

Basundoro, Purnawan

1999 “Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan Banyumas 1830-1940”. *Tesis S2 UGM* (belum diterbitkan).

Boeke, JH.

1983 *Pra Kapitalisme di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan.

Boomgaard, Peter

1989 *Children of the Coloneal States: Population Growth and Economic In Java 1795 – 1880*. Amsterdam: University Press.

Booth, A.

1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES.

Breman, JC.

1986 *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES.

Budoyonegoro, Pudjianto,

2009 *Babad Kalibagor Mengungkap Terciptanya Tembang Banyumasan Pertama*, Banyumas.

Brandts Buys-Van Zijp, JS&A,

1933 “Omtrent Tamboerijnen”, *Djawa Tijdschrift van Het Java Instituut*, Jogjakarta: Java Instituut.

Daldjoeni, N.,

1998 *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Alumni.

De Indische Gids, I, 1879.

Djoemena, N.D.,

1990 *Batik dan Mitra*. Jakarta: Djambatan.

Elson, RE.,

1984 *Javanese Peasant and The Colonial Sugar Industry*. Oxford: Oxford University Press.

Furnivall, YS

1944 *Netherlands Indie: A Study Plural Economic*. Cambridge: University Press.

Gandasubrata, Purwoto S.,

2003 *Nama Windu Di Bawah Pohon Beringin, Otobiografi Ketua Mahkamah Agung RI ke-8*. Jakarta: PT. Visindo Media Persada.

- Gandasubrata, Soedana,
Tt *Sejarah dan Silsilah Bupati Banyumas dan Keturunannya*.
- Gandasubrata, S.M.,
1952 *Kenang-Kenangan 1933-1950*. Purwokerto: Pentjetakan Seraju
- Geertz
1974 *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta : Bhratara.
- Gelderer, van.
1974 *Tanah dan Penduduk di Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- Herusatoto, Budiono,
2008 *Banyumas: Sejarah, Bahasa, Watak, Seni, dan Budaya*. Yogyakarta: LKiS
- Kartodirdjo, Sartono,
1986 “Taxes and Society: Regional and Difference in Central Java Around 1830”, dalam *Agrarian History*. Yogyakarta: Gadjah University Press.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk.,
1993 *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat,
1984 *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo,
1995 *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Legg, KR.,
1983 *Patrons, Clients and Politics: New Perspectives on Political Clientilism*. Berkeley, University of California.
- Lombard, Denys
1996 *Nusa Jawa Silang Budaya; Batas-batas Pembaratan I*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Mubyarto, et.al.
 1992 *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial-Ekonomi*.
 Yogya: Aditya Media.
- Mulyasari, Prima Nurahmi
 2014 “Modernisasi Tata Ruang Kota Purwokerto 1900-1935” dalam
Patrawidya Vol. 15 No. 9 Desember
- Nagazumi, Akira (ed)
 1986 *Indonesia dalam Kajian Sejarah Jepang*. Jakarta : Yayasan
 Obor.
- Nakamura, Mitsuo,
 1983 *Bulan Sabit Muncul Dibalik Pohon Beringin*. Terjemahan.
 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nas, Peter
 1986 *The Indonesie City*. Dondrecht Foris Plublications.
- Niel, van,
 1992 *Java Under The Cultivation System*. Leiden: KTILV Press.
- Ogburn,WF,
 1950 *Social Change*, New York: Viking Press.
- Panekoek, AJ.
 1952 *Outline Geomorphology of Java*. Bandung : Balai Pendidikan
 Guru Ilmu Bumi.
- Peper, Bram,
 1985 *Pertumbuhan Penduduk Jawa*. Jakarta : Bhratara.
- Pigeaud,Th.,
 1962 *Java in the fourteenth Century*. Vol IV. Nijhoff: The Hague.
- Priyadi, Sugeng,
 2002 *Banyumas: Antara Jawa & Sunda*. Semarang: Penerbit
 Mimbar bekerjasama dengan The Ford Foundation.
- ,
 2007 *Sejarah Intelektual Banyumas*. Yogyakarta: Aksara Indonesia.

- Romein, J.E.
1985 *Atlas Nasional*. Bandung: Ganaco.
- Schutte, GJ. (ed)
1994 *State and Track in the Indonesian Archipelago*. Leiden: KITLV Press.
- Soedarsono, R.M.,
2003 *Seni Pertunjukan Dari Perspektif Politik, Sosial, dan Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soedjatmoko, Ratmini,
2011 *Sebuah Pendopo di Lembah Serayu: Kisah Keluarga Bupati Banyumas Jaka Kahiman Hingga Gandasubrata*. Jakarta: Pustaka Tanjung.
- Soemoatmodjo, Soekesi,
1985 “Gaya Hidup Bupati Pasisiran Pada Akhir Abad 19 Sampai Permulaan Abad 20”. *Tesis Pasca Sarjana*. Yogyakarta: UGM, Sejarah. (Belum diterbitkan)
- Soemarsaid, Moertono,
1985 *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sujito
1976 *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sukardi, Tanto
2014 *Tanam Paksa di Banyumas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sunaryadi,
2000 *Lengger: Tradisi dan Transformasi*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Sutjipto, FA
1978 *Struktur Birokrasi Mataram*. Yogyakarta : Fakultas Sastra UGM.

Sutrisno, M. FX.,

- 2005 Manusia dan Kebudayaan. Dalam *Pendidikan Multikultur Revitalisasi Hukum Adat Dalam Perspektif Sejarah*. Editor: Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Stutterheim,

- 1931 “Indische Cultuur Geschiedenis” dalam *Djawa Tijdschrift van Het Java-Instituut*, Jogjakarta: *Java Instituut*.

Veldhuisen, C.H.,

- 1993 *Batik Belanda 1840-1940 Pengaruh Belanda Pada Batik dari Jawa Sejarah dan Kisah di Sekitarnya*. Jakarta: Gaya Favorit Press.

Wiryaatmadja

- 1932 *Babad Bajoemas*. Purwokerto : TP.

Zuhdi, Susanto

- 1991 “Perkembangan Pelabuhan dan Kota Cilacap Jawa Tengah 1830-1940”. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Umur	Pddkn	Pekerjaan	Alamat
1	Kasirun, S.Pd.	53	S1	Kasi Kesenian, Sastra dan Perfilman,	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kab. Banyumas, Purwokerto
2	Wiyati Dwi Martitin, SH., M.Hum.	47	S2	Kasi Pengelolaan dan Pelayanan Arsip	Perpusarda Banyumas
3	Subandi	42	-	Penulis dan budayawan	Lemahurug RT 01 RW 07, Pangebatan, Karanglewas, Purwokerto
4	Soegeng Wijono	75		Kolektor Foto Pensiunan PNS	Jalan Gunung Slamet XI/44 Perumahan Purwosari Purwokerto
5	Wibiyanto	73	-	Penulis	Purwokerto
6	Ahmad Tohari	67		Budayawan	Jatilawang, Banyumas
7	Dr.Soedarmadji	80	S1	Sejarahwan Keturunan Gandasubrata	Jl.Yosodarmo Purwokerto
8	RA. Umiasih Setiati Gandasubrata, Alm. (Ibu Yetty, Alm)	67		Ibu Rumah Tangga, Keturunan Gandasubrata	Dalem Kapangeranan, Jalan Budi Utomo No. 294 Banyumas
9	Suseno			Penulis	Karanglewas, Purwokerto
10	Budiono Herusatoto	72	S1	Penulis –Budayawan Pensiunan Pegawai PU	Purwokerto